

**UPAYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANIAN ORGANIK  
(Studi Pada Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Kawasan  
Pengembangan Desa Sumberbrantas Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama  
Sosiologi Lingkungan



Oleh:  
**Imam Bukhori**  
**115120100111021**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

### UPAYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANIAN ORGANIK (Studi Pada Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Kawasan Pengembangan Desa Sumberbrantas Kota Batu)

Oleh Imam Bukhori  
NIM 115120100111021

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Sarjana Pada Tanggal 05 Juli 2018

#### Tim Penguji

##### Pembimbing I

**Lutfi Amiruddin, S.Sos., M.Sc**  
\_\_\_\_\_  
NIK. 201304 860909 1 001

##### Pembimbing II

**Wida Ayu Puspitosari, S.Sos., M.Si**  
\_\_\_\_\_  
NIK. 2016079 00404 2 001

##### Anggota penguji I

**Anik Susanti, S.Pd., M.Si**  
\_\_\_\_\_  
NIK. 201405 86091612001

##### Anggota Penguji II

**Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A.**  
\_\_\_\_\_  
NIK. 2017108709262001

Malang,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Prof. Dr. Unti Ludigdo. AK**

\_\_\_\_\_  
NIP. 196908 14199402 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menyetujui Laporan Skripsi yang Berjudul

### UPAYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANIAN ORGANIK

(Studi Pada Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Kawasan Pengembangan  
Desa Sumberbrantas Kota Batu)

Oleh:

Imam Bukhori  
NIM 115120100111021

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Sarjana Pada Tanggal 05 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Lutfi Amiruddin, S.Sos., M.Sc  
\_\_\_\_\_  
NIK. 201304 860909 1 001

Wida Ayu Puspitosari, S.Sos., M.Si  
\_\_\_\_\_  
NIK. 2016079 00404 2 001

Malang,

Ketua Jurusan Sosiologi

Anif Fatma Chawa, M.Si., Ph.D

\_\_\_\_\_  
NIP. 19740308 200501 2 001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

**Nama : Imam Bukhori**

**NIM : 115120100111021**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul Upaya Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi Pada Implementasi Kebijakan Organik di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang,  
Yang Membuat Pernyataan

Imam Bukhori  
NIM. 115120100111021



# UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini sengaja di buat sebagai tanda syukur peneliti atas perjuangannya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi kepada mereka yang sangat luar biasa:

*Setiap individu adalah kumpulan jamak dari orang lain yang ada di sekelilingnya dan bertautan pada setiap ruang-waktu.*

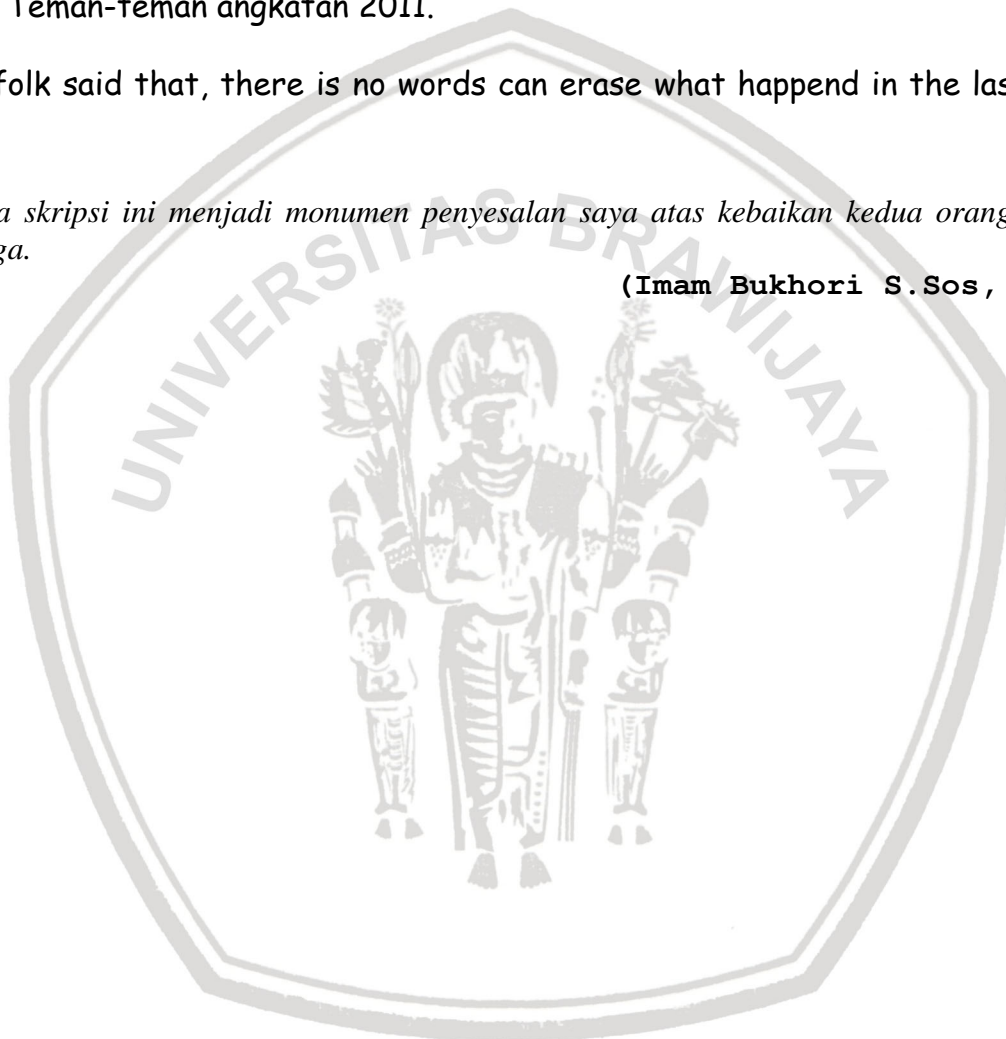
1. Alhamdulillah Ya Allah yang selalu menuntun dan memberi jalan dalam setiap kesulitan dan menjadikan kemudahan itu datang, masio dusoku wakeh.
2. Pak Lutfi dan Ibu Wida, pembimbing terbaik setelah 3 kali ganti pembimbing. Terima kasih atas saran, masukan baik dalam segi tulisan maupun teknik penulisan dan solusi yang diberikan di setiap kebuntuan dalam menyelesaikan setiap bab dan atas ketersediannya meluangkan waktunya untuk bimbingan.
3. Ibu Anik Susanti dan Ibu Dewi Rahayu sebagai dosen penguji, terima kasih telah memberikan sensasi dan kelulusan serta revisi berharganya sehingga sampai berakhirnya ujian skripsi saya masih harus berjuang demi perbaikan.
4. Emakku Sumardiyah dan Bapakku Ngateman yang terus mengingatkan, memarahi dan menangisi anak bandelnya untuk menyelesaikan skripsi hingga wisuda karena semakin lama kuliah maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran SPP. Kasih sayang dan dukungan materi yang diberikan hingga pada akhirnya karya kecil ini yang bisa kupersembahkan sementara.
5. Adikku Hafidhul Kafi, calon hafidz quran yang sekarang udah hafal 15 juz. Ojo koyo Kakakmu sing durhakane kenemenen.
6. Kepala Dusun Jurangkuali, yang memperbolehkanku menjadikan Dusun Jurangkuali sebagai tempat penelitian skripsi.
7. Dosen-dosen Sosiologi Universitas Brawijaya yang dari semester satu hingga semester akhir mengajari banyak hal tentang sosiologi Bu Nike, Bu Anif, Bu Ifah, Bu Titi, Bu Ucca, Mbak Asti, Pak Arief, Pak Imron, Pak Indhar, Pak Lutfi, Pak Amex, akan ilmunya yang diberikan sebagai bekalku dalam menata masa depan.
8. Keluarga Kontrakan Gurami terima kasih atas persahabatan yang akan terus terjaga (Mas Bowi, Mas Idam, Thomsin, Ucli, Febri, Mbah dan Ayah). Ora Gojlokan, Ora Penak.

9. Teman-teman Kelompok KKN, Ika, Keceng, Agnes, Arbi, Anis, Lia, Fetty, Supir dan Arif. Selama hampir 2 bulan kebersamaan hingga sampai aku ujian kompre kalian udah pada menikah dan punya anak.
10. Sobat Ngopi at King Coffee, Supir aka Wijaya, Galih aka Usul, Ifan, Mbah aka Adenda, Febri, Debyo, Jemblung aka Ryan, Chino, Deni aka Denok, Andi, Potel aka Prihat, Triaji dan Mas Mubin owner.
11. Sobat Sanctuary, Ucil, Febri, Wardah, Ninda aka tuhan, dan Jemblung yg sudah sedia menampung kawan homelessnya
12. Teman-teman angkatan 2011.

Somefolk said that, there is no words can erase what happend in the last fifty years.

*Semoga skripsi ini menjadi monumen penyesalan saya atas kebaikan kedua orangtua dan keluarga.*

(Imam Bukhori S.Sos, 2018)





## ABSTRAK

**Imam Bukhori (2018). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Upaya Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi Pada Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Dusun Jurangkuali, Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)***

**Pembimbing: Lutfi Amiruddin dan Wida Ayu Puspitosari**

---

Penelitian ini membahas mengenai praktik implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Batu pada implementasi kebijakan pertanian organik dalam Perwali Batu Tahun 2014 sebagai upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana praktik berjalannya kekuasaan pada upaya pemerintah kota mengimplementasikan kebijakan demi tercapainya pertanian berkelanjutan dan menjadikan Batu sentra produk organik.

Penelitian ini menggunakan konsep tentang penerapan atau implementasi kebijakan publik untuk menganalisis praktik implementasi antar pihak penyelenggara dengan sasaran kebijakan dalam upayanya mentransformasi petani konvensional untuk beralih menjadi petani organik di kawasan pengembangan atau percontohan Dusun Jurangkuali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan secara *purposive sampling*, yaitu informan utama, dan informan tambahan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika praktik implementasi oleh pihak penyelenggara atas petani sasaran dalam upaya mentransformasi pertanian konvensional menjadi organik diwujudkan dalam strategi-strategi pemberdayaan untuk mempengaruhi dan merubah pola tanam serta pola pikir petani di kawasan pengembangan. Praktik implementasi tersebut dapat digambarkan melalui adanya mekanisme teknisalisasi permasalahan dan normalisasi model *top-down* pihak penyelenggara demi tercapainya target menjadikan Batu sentra produk organik. Namun pada pelaksanaan di kawasan pengembangan terdapat dinamika yang memunculkan kendala-kendala tercapainya tujuan yang diharapkan pihak penyelenggara. Terdapatnya dinamika ketika pelaksanaan menandakan kurangnya pihak penyelenggara dan hanya mendasarkan strategi perencanaan secara sepihak sehingga menimbulkan permasalahan antara petani dan petugas pelaksana. Evaluasi dan strategi normalisasi yang dilakukan juga tetap tidak membuahkan hasil dan malah melahirkan dimensi permasalahan baru. Selain itu strategi hibah dan subsidi serta sarana prasarana penunjang yang disiapkan tidak menjamin petani melakukan alih tanam ke pola organik seperti yang diharapkan akan tetapi mengkombinasikan keduanya dengan berbagai alasan masing-masing baik ekonomi maupun kritik atas penerapan alokasi, tidak maksimalnya sarana-prasarana penunjang dan pendampingan dari pihak penyelenggara.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Pertanian Organik, dan Kawasan Pengembangan atau Percontohan.

## ABSTRACT

**Imam Bukhori (2018). Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences. The Practices Implementation of Organic Agriculture Policy (A study at Implementation of Organic Agriculture Policy at Jurangkuali Orchard, Sumberbrantas Village, Bumiaji Sub-District, Batu).**

**Supervised: Lutfi Amiruddin and Wida Ayu Puspitosari.**

---

The research discusses about the practices implementation of organic agriculture policy in Batu City Regulation Years 2014. This policy effort's is to create the sustainable agriculture. The objectives of the study focused to find out and to analyze how's work practices of implementation at the effort of city government to apply their policy to reach sustainable agriculture and to made Batu City into organic product center as their policy goal.

The research applies a concept of implementation to analyze the pactice of govern between the executor side (city government) and the object of policy in effort to transform convensional farmer into organic farmer in developing or specimen area at Jurangkuali orchard. The researcher applies qualitative research method. Observations, interviews, and documentations have been used to collect the data. In addition, purposive sampling is used to determine the selection of informants, the primary and secondary.

The research finds the presence of practices of govern by the executor side over object of policy in effort to transform conventional agriculture into organik has been formed into empowerment strategies to influence dan change the plant pattern as well as mind pattern in developing or specimen area. Practice of implementation can be describe through existence of the problems technical mechanism and the normalization of top-down concept by the executor side to achieve their goal. But, at that time, there are conditions that bringing out obstacles to achieve the government goal. These obstacles indicated lack prepared by the government and base on unilateral plan accordingly with the result that cause set of promlems between farmer and the implementer official. Evaluation and normalization strategy that was done yet not successful instead of cause another problem. Beside that, bequest and subsidy and tool-infrastucture support did not guarantee the way the farmer changed their pattern plant into organic just like the policy concept. The farmer chooses to combine between conventional and organic plant pattern with ther own reason base on situation and condition.

**Keywords:** Implementation Policy, Organic Agriculture, and Developing or Specimen Area.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Kawasan Percontohan Dusun Jurangkuali, Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu”. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan tugas akhir dalam memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan, dukungan, bimbingan, serta pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua, saudara-saudara serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan berupa materi maupun nonmateri.
2. Bapak Lutfi Amiruddin, M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi pertama serta Ibu Wida Ayu Puspitosari, S. Sos., M. Si. selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang telah sabar membimbing, mengajari, dan memberikan banyak masukan serta selalu menyediakan waktu ditengah kesibukan untuk penulis berkonsultasi.
3. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Yusuf, Bapak Aan, dan Bapak Prawito selaku subyek penelitian informan, baik informan utama maupun informan pendukung yang telah meluangkan waktu kepada peneliti dan telah banyak membantu dalam penelitian skripsi.
5. Bapak Jhonny selaku Ketua Kelompok Tani Organik Dusun Jurangkuali yang sudah mengijinkan peneliti melakukan penelitian skripsi di Dusun Jurangkuali.
6. Para penulis buku, penulis artikel, peneliti yang penelitiannya dijadikan sebagai penelitian terdahulu pada skripsi ini, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan sangat terbuka, agar isi dari skripsi ini dapat lebih bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	 8
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kajian Konsep .....	14
2.2.1 Konsep Implementasi .....	14
2.2.2 Pertanian Organik dan Konvensional .....	19
2.4 Skema Kerangka Pemikiran .....	25
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	 29
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	29
3.2 Lokasi Penelitian .....	29
3.3 Fokus Penelitian .....	31
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Jenis dan Sumber data .....	35
3.7 Teknik Analisis Data .....	35
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	 41
4.1 Kondisi Umum Dusun Jurangkuali Desa Sumberbrantas .....	41
4.2 Kondisi Umum Pertanian Desa Sumberbrantas sebelum dan sesudah menjadi Kawasan Percontohan Organik .....	47
4.3 Deskripsi Informan .....	53
 <b>BAB V</b> .....	 59
5.1 Peraturan Pemerintah Kota Batu Tentang Kebijakan Pertanian Organik .....	59
5.1.1 Mekanisme Implementasi Kebijakan Organik Sebagai Upaya Transformasi Pertanian Di Kota Batu .....	63
5.2 Dinamika Implementasi Kebijakan Organik dan Permasalahannya Di Kawasan Percontohan Sumberbrantas .....	69
5.3 Dimensi Permasalahan yang Timbul Pasca Implementasi Kebijakan Organik Di Kawasan Percontohan Desa Sumberbrantas .....	91

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
6.1 Kesimpulan.....	96
6.2 Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2. Informan Penelitian.....	36
Tabel 3. Luas Daerah Dan Tata Guna Lahan Desa Sumberbrantas .....	42
Tabel 4. Potensi Hortikultura desa Sumberbrantas .....	43
Tabel 5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	44
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	46
Tabel 7. Klasifikasi Kawasan Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah .....	52
Tabel 8. Daftar Anggota kelompok Petani Kawasan Percontohan Sumberbrantas .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	26
---	----





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Foto

Lampiran 2. Lampiran Transkrip Wawancara



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengembangan pertanian organik di Indonesia sudah dicanangkan sejak tahun 2000 oleh Departemen Pertanian dengan harapan bahwa Indonesia sudah dapat masuk di dalam percaturan pasar dunia. Perlunya campur tangan pemerintah dalam bidang pertanian organik dibutuhkan agar pengembangan yang dimaksudkan dapat berjalan lebih intensif. Beberapa pioner telah bermunculan baik yang termasuk di dalam suatu kelompok maupun individu, misalnya: di Cisarua, Sragen, Malang, Lawang, Padang, Lampung, Pontianak, Bali, Yogyakarta, Solo, Jakarta, Bandung dan lain-lain. Baik mereka yang bergerak dalam memproduksi bahan segar maupun dalam bentuk olahan (Agustina, 2011:180).

Kebijakan terkait pertanian organik juga telah dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Batu berupa “Batu Go Organik”. Melalui Dinas Pertanian Dan Kehutanan program tersebut telah diberlakukan sejak tahun 2012 dengan menggunakan sistem desa atau kawasan percontohan (Sofi'i, 2014). Desa percontohan yang dimaksud adalah dengan menunjuk wilayah pertanian secara spesifik untuk dijadikan lokasi uji coba pertanian organik. Langkah ini diambil pemerintah setempat sebagai upaya untuk melakukan transformasi di bidang pertanian dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Salah satu situs yang menjadi lokasi percontohan adalah Dusun Jurangkulai Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji.

Program Pemerintah Kota Batu di bidang pertanian bertujuan untuk mengatasi permasalahan pertanian. Beberapa permasalahan diantaranya berupa degradasi kualitas dan produktivitas tanah, ketergantungan petani pada obat-obatan pertanian, serta adanya residu pestisida pada tanah dan produk pertanian yang beredar di pasaran. Maka langkah yang diambil Pemerintah Kota Batu adalah dengan menerapkan sistem pertanian organik sekaligus berusaha mengatasi permasalahan pertanian yang ditimbulkan dari penerapan sistem pertanian kimiawi.

Upaya Pemerintah Kota Batu mensukseskan kebijakan pertanian organik dengan menggunakan sistem percontohan dengan menunjuk wilayah-wilayah tertentu untuk dijadikan laboratorium uji coba pertanian organik. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi petani di Batu agar berbondong-bondong beralih ke pertanian organik jika wilayah percontohan dimaksud menuai keberhasilan. Sehingga langkah yang diambil pemerintah dengan pengembangan kawasan percontohan juga dibarengi dengan pemberian hibah bibit dan pupuk organik untuk menstimulus para petani setempat agar bersedia beralih menjadi petani organik.

Kendati demikian, keberlangsungan program *go organik* pada ranah praktisnya mau tak mau telah melahirkan konsekuensi yang tidak remeh-temeh. Pertama, adanya program *go organik* telah menimbulkan pemaksaan kerangka pikir baru bagi para petani melalui berbagai upaya Pemerintah Kota Batu dalam mensukseskan programnya. Kedua, memaksa para pemilik lahan yang menjadi lokasi percontohan untuk beralih menanam organik. Ketiga, perampasan hak atas cara bertani di ladangnya sendiri. Selain itu pelaksanaan program organik tersebut

tanpa pengawalan ketika panen dan saat pemasaran serta tidak adanya jaminan bagi para petani percontohan untuk mendapatkan sertifikat organik.

Polemik dalam pelaksanaan program *go organik* muncul karena dangkalnya persiapan yang dilakukan penyelenggara dalam merancang kebijakan dan pelaksanaannya. Pemerintah Kota Batu tidak secara menyeluruh melakukan kajian di kalangan petani sebagai sasaran tetapi hanya menentukan titik lokasi percontohan organik. Pemerintah kota melalui dinas terkaitnya kemudian membuat rancangan kebijakan yang langsung diterapkan melalui sosialisasi, sekolah lapang, studi banding, dan rapat-rapat serta praktik lapangan melalui petugas penyuluh lapang serta subsidi atau hibah bagi petani untuk menunjang program.

Namun pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan telah luput dalam memperhatikan kondisi sosial geografis dari masyarakat sasaran program. Pemerintah kota sebagai perwujudan sebuah birokrasi telah melakukan apa yang oleh Li dalam bukunya *the will to improve* disebut sebagai praktik kepengaturan. Sebuah praktik yang dijelaskan Foucault sebagai pengarahan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang dikalkulasi sedemikian rupa untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan hidup, peningkatan kemakmuran, dst (dalam Li, 2011:9)

Gelanggang kekuasaan dalam penyelenggaraan program *go organik* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dengan segala otoritas kekuasaannya telah menimbulkan permasalahan dalam tahap pelaksanaannya. Sehingga berbagai permasalahan muncul seiring digelarnya program pertanian organik. Permasalahan yang timbul salah satunya adalah kendala pemasaran dan harga

jual. Kendala ini disebabkan tidak adanya jaminan harga jual produk dari pemerintah dan sulitnya mendapatkan sertifikat organik (Muiz, 2015). Sehingga para petani harus mencari pasar sendiri untuk menjual produknya tanpa label organik yang kemudian akan dihargai sama dengan produk pertanian lain yang bukan organik.

Selain itu menurut Siswanto Asisten I Sekretaris Kota Batu, dalam pantauan tim evaluasi yang diterjunkan oleh Wali Kota Batu, terungkap jika pertanian organik di Batu masih berjalan kurang lebih 40% saja. Minimnya petani yang menggunakan pertanian organik tersebut disebabkan sulitnya petani dalam menerapkan pola pertanian tersebut. Serta fakta kebutuhan keluarga petani yang membuat mereka memilih tetap menggunakan pola pertanian kimiawi (Sofi'I, 2014).

Permasalahan mendasar yang timbul dari upaya pelaksanaan program ini dilatarbelakangi oleh benturan sistem pertanian antara pertanian organik yang diusung oleh Pemerintah Kota Batu melalui Kelompok Tani Organik dengan pertanian lokal (konvensional) yang telah dipraktikkan oleh petani setempat sebagai model pertanian sebelum hadirnya program organik. Tentunya pelaksanaan program yang sedang dicanangkan harus dapat berkontestasi dengan pola pertanian setempat dan mampu memberi solusi kongkrit bagi petani setempat.

Berbagai usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Batu tersebut tidak lain bertujuan untuk mengubah dan membentuk perilaku para petani program khususnya untuk meninggalkan pertanian konvensional. Mulai dari subsidi atau hibah, sekolah lapang, studi banding, petugas penyuluh lapang adalah langkah



untuk mensukseskan program dengan mendikte para petani secara terus-menerus untuk beralih menanam organik. Meskipun secara kasat mata tidak ditemukan adanya paksaan tetapi jika dilihat lebih lanjut maka program pertanian organik yang diusung Pemerintah Kota Batu tersebut telah mencerabut para petani dari kebiasaan bertani yang telah mereka geluti turun temurun sebelumnya.

Berlakunya program organik yang menggunakan sistem percontohan dengan menunjuk lokasi spesifik tersebut telah memaksa para petani yang turun-temurun menempati lahan garapan sebelum datangnya program percontohan untuk beralih menanam organik. Meskipun tidak semua lahan petani menjadi situs percontohan tetapi biar bagaimanapun telah mengurangi luas lahan garapan mereka secara konvensional yang bakal berakibat pada turunnya jumlah panen petani. Selain itu, diharuskannya petani menanam organik di lokasi percontohan juga memaksa para petani memiliki sarana produksi yang berbeda yaitu untuk konvensional dan organik. Hal ini kemudian menjadi beban ganda bagi petani terkait dalam membagi waktu, tenaga, dan modal dalam menyikapi pertaniannya.

Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti karena terdapat iklim sosial yang menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pihak pemerintah kota dan kelompok tani di lokasi percontohan Dusun Jurangkuali Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji dalam perencanaan dan realisasi program. Selain itu penyelenggaraan program organik yang berlangsung telah menimbulkan berbagai permasalahan seperti yang disebutkan di atas seiring dengan terdapatnya benturan sistem pertanian setempat sebelum hadirnya program. Dengan demikian, studi ini akan mengulas praktik pengaturan perilaku petani dan dimensi dari

relasi kuasa yang timpang dalam polemik implementasi kebijakan *go organik* di kawasan percontohan.

Dari pemaparan latar belakang permasalahan di atas peneliti bermaksud mengkaji pelaksanaan program *go organik* yang sedang diujicobakan oleh Pemerintah Kota Batu. Bagaimana sebuah program pertanian hadir dengan bingkai pemberdayaan kelompok dan petani untuk tujuan mensejahterahkan masyarakat dan memperbaiki kerusakan lingkungan pertanian dilangsungkan. Sekaligus melihat bagaimana cara program tersebut direncanakan dan diterapkan serta konsekuensi-konsekuensi apa yang terjadi setelah program berjalan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana implementasi kebijakan pertanian organik oleh pemerintah kepada petani sayur konvensional di kota Batu?
- 1.2.2 Dimensi-dimensi sosial apa saja yang timbul pasca program *go organik* diselenggarakan di Kawasan Percontohan Desa Sumberbrantas, Bumiaji, Kota Batu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Kajian implementasi kebijakan *go organik* di Kota Batu memiliki tujuan untuk mengupas polemik dalam upayanya melakukan transformasi pertanian konvensional ke pertanian organik. Sehingga studi yang dilakukan akan berfokus pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hasil dari implementasi kebijakan tersebut di kawasan percontohan Desa Sumberbrantas. Selain itu, tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengkaji permasalahan dan kendala-kendala yang mewarnai upaya implementasi pertanian organik antara penyelenggara program dengan petani percontohan Dusun Jurangkuali Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji. Selain itu adalah untuk mengkaji dimensi-dimensi sosial apa

saja yang timbul setelah program berjalan. Sehingga dapat diketahui bias-bias yang tidak diinginkan dari sebuah penyelenggaraan kebijakan program pemerintahan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumbangsih dan pengembangan dalam kajian penelitian ilmiah serta kajian ilmu sosiologi.
- b. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat khususnya dalam kajian kebijakan pertanian dalam ranah sosiologi
- c. Sebagai sebuah sajian informasi dan wawasan bagi kajian ilmu sosiologi, khususnya bagi peneliti yang akan mengkaji sosiologi dalam kebijakan publik terkait pertanian organik.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Kajian ini dapat digunakan sebagai rujukan informasi dan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan pertanian pada ranah perencanaan serta pelaksanaan jika polemik penyelenggaraan program dapat ditemukan jawabannya.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan peraturan pertanian organik adalah penelitian dari Ratna (2011). Penelitian Ratna ingin mengkaji sejauh mana implementasi pertanian apel organik dapat meningkatkan pendapatan petani. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip sistem pertanian organik di daerah penelitian belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik oleh petani. Oleh karena itu, sistem pertanian organik di daerah penelitian belum dapat dikatakan sebagai pertanian organik. Hal tersebut terlihat dari tingkat implementasinya yang masih rendah yaitu 31% dari yang dikehendaki. Rata-rata tingkat pendapatan usahatani apel, petani yang mengaku organik lebih rendah dibandingkan petani non organik. Hal ini disebabkan karena tingkat produksi yang dihasilkan petani yang mengaku organik lebih rendah walaupun menerima harga lebih besar dibanding non organik, dan tingkat biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanian organik tidak terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani apel (Ratna, 2011).

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan Ratna (2011) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lingkup kajiannya. Hasil penelitian Ratna menjelaskan implementasi pertanian organik yang belum terlaksana sepenuhnya ditunjukkan dari besaran biaya produksi dan hasil produksinya yang lebih rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Sedangkan dalam penelitian ini akan menganalisis lingkup yang lebih luas selain dari biaya dan hasil produk tani

melainkan faktor-faktor lain di luar itu yang mengiringi berlangsungnya implementasi program. Jika dalam penelitian Ratna hanya menjelaskan implementasi pada lingkup petani maka kajian peneliti akan mengulas dari sisi pemerintah dan petani sebagai sebuah kesatuan program yang tentu memiliki posisi dan porsi masing-masing dalam percaturan implementasi program pertanian organik.

Penelitian kedua terkait pemberdayaan petani pernah dilakukan oleh Roidah (2010). Tujuan dari penelitian Roidah adalah (1) Mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan anggota kelompok federasi "Jaya Kusuma" pada program pengembangan pertanian terpadu secara partisipatif di lahan kering, (2) Mendeskripsikan kemampuan anggota kelompok federasi "Jaya Kusuma" dalam menerapkan pertanian organik, (3) Menganalisis hubungan antara kegiatan pemberdayaan dengan kemampuan anggota kelompok federasi dalam menerapkan pertanian organik. Penentuan lokasi secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Penentuan responden dalam penelitian ini adalah metode acak sederhana (*Simple Random Sampling*), Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan bantuan scoring dan analisis *Rank-Spearman*.

Dari hasil analisis statistik dengan menggunakan *Rank-Spearman* diperoleh bahwa  $T_{hitung}$  1,36 sedangkan  $T_{tabel}$  2,052 sehingga terima  $H_0$  dan tolak  $H_1$  artinya tidak terdapat hubungan antara kegiatan pemberdayaan dengan kemampuan petani dalam menerapkan pertanian organik. Karena kegiatan pemberdayaan pertanian organik masih tergolong baru dan belum berjalan sempurna di desa Maron, sehingga petani belum banyak yang mengetahui pertanian organik. Kegiatan pemberdayaan di



Desa Maron belum dapat dikatakan berhasil, karena sebagian besar anggota kelompok federasi "Jaya Kusuma" masih ragu-ragu akan produktivitas padi gogo menurun jika beralih ke pertanian organik (Roidah, 2010).

Perbedaan lingkup kajian penelitian dengan Roidah (2010) adalah fokus sebelumnya membahas tentang kelompok tani dalam memberdayakan anggotanya untuk menerapkan pertanian padi organik. Sedangkan pada penelitian kali ini lingkup kajiannya lebih mendalam dan luas tentang strategi penerapan program pertanian organik oleh Pemerintah Kota Batu hingga sampai pada tataran kelompok petani yang oleh peneliti sebelumnya tidak ditampilkan.

Selain itu, Roidah (2010) pun hanya berhenti pada kritik kelompok tani yang gagal memberdayakan petani tetapi tidak melihat faktor lain yakni penyelenggara program yang berada di atas kelompok tani. Sebaliknya lingkup studi kali ini akan mengulas tentang kesiapan dari penyelenggara dalam melaksanakan programnya serta dimensi-dimensi lain sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan program tersebut. Sehingga gambaran keseluruhan dari penyelenggara kebijakan hingga sasaran kebijakan dapat disajikan data hasil studi yang saling berkaitan.

**Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Ratna (2011)</b>	<b>Roidah(2010)</b>	<b>Bukhori (2018)</b>
<b>Judul</b>	Analisis Implementasi pertanian apel organik di desa Bumiaji, Kota Batu.	Pemberdayaan Anggota Kelompok Federasi "Jaya Kusuma" Melalui Penerapan Pertanian Organik Dalam Program Pengembangan Pertanian Terpadu Secara Partisipatif di Lahan Kering: studi kasus di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.	Upaya Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Kawasan Pengembangan Desa Sumberbrantas Kota Batu)
<b>Teori</b>			Konsep Implementasi Kebijakan
<b>Metode</b>	Menggunakan nilai rata-rata akhir	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan bantuan skoring dan analisis <i>Rank-Spearman</i> .	Metode Kualitatif Deskripti
<b>Hasil Penelitian</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip sistem pertanian organik di daerah penelitian belum sepenuhnya diimplementasikan	Tidak terdapat hubungan antara kegiatan pemberdayaan dengan kemampuan petani dalam menerapkan pertanian organik.	Praktik penyelenggaraan implementasi kebijakan pertanian organik mengalami kegagalan di kawasan percontohan desa Sumberbrantas.

	<p>dengan baik oleh petani. Oleh karena itu, sistem pertanian organik di daerah penelitian belum dapat dikatakan sebagai pertanian organik. Hal tersebut terlihat dari tingkat implementasinya yang masih rendah yaitu 31% dari yang dikehendaki. Rata-rata tingkat pendapatan usahatani apel, petani yang mengaku organik lebih rendah dibandingkan petani non organik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanian organik tidak terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani apel (Ratna, 2011).</p>	<p>Karena kegiatan pemberdayaan pertanian organik masih tergolong baru dan belum berjalan sempurna di desa Maron, sehingga petani belum banyak yang mengetahui pertanian organik. Kegiatan pemberdayaan di Desa Maron belum dapat dikatakan berhasil, karena sebagian besar anggota kelompok federasi "Jaya Kusuma" masih ragu-ragu akan produktivitas padi gogo menurun jika beralih ke pertanian organik (Roidah, 2010).</p>	<p>Faktor yang menyebabkan gagalnya implementasi terdapat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimensi atau dinamika social yang ditimbulkan dari kegagalan tersebut antara lain; kerugian ekonomi dan sosial. Kegagalan ekonomi seperti gagal panen, terbatasnya pasar organik, hibah subsidi yang tidak sebanding dengan luas lahan garapan petani. Serta permasalahan sosial berupa konflik antar penyelenggara, kelompok dan petani di kawasan percontohan.</p>
--	---	--	---

<b>Perbedaan</b>	<p>Ruang lingkup implementasi pertanian organik dari sisi besaran biaya produksi dan hasil produksinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Jika dalam penelitian Ratna hanya menjelaskan implementasi pada lingkup petani maka dalam penelitian ini akan mengulas dari sisi pemerintah dan petani sebagai sebuah kesatuan program yang tentu memiliki posisi dan porsi masing-masing dalam percaturan implementasi program pertanian organik.</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas tentang kelompok tani dalam memberdayakan anggotanya untuk menerapkan pertanian padi organik. Sedangkan pada penelitian kali ini lingkup kajiannya lebih mendalam dan luas tentang strategi penerapan program pertanian organik oleh Pemerintah Kota Batu hingga sampai pada tataran kelompok petani.</p>	<p>Jika dalam penelitian Ratna hanya menjelaskan tentang implementasi pada lingkup petani maka dalam penelitian ini akan mengulas dari sisi pemerintah dan petani sebagai sebuah kesatuan program yang tentu memiliki posisi dan porsi masing-masing dalam percaturan implementasi program pertanian organik.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian Roidah pada penelitian lingkup kajiannya lebih mendalam dan luas tentang strategi penerapan program pertanian organik oleh Pemerintah Kota Batu hingga sampai pada tataran kelompok petani.</p>
------------------	--	---	--

Sumber : Data Olahan Pribadi (2018)

## 2.2 KajianKonseptual

### 2.2.1 Konsep Implementasi

#### 1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan (Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, 2008: 117).

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986: 15). Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat (Edward III, George C, 1990:1).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan” (Purwanto dan Sulistyastuti, 1991:21).



Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986: 148). Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” (Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, 1983: 139). Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan bahwa untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya.

dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), the are for critical factories to policy implementation they are : “communication, resources, disposition, and bureauratic structure” (Agostiono, 2010: 154). Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup : 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup : 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan

dan responsivitas kelompok sasaran (Grindle (dalam Budi Winarno), 2002: 21).

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan – tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masingmasing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Grindle (dalam Budi Winarno), 2002: 21).

Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau

kakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan topdown dan pendekatan bottom-down (Sabatier, 1986: 21-48).

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan sehingga proses implementasi akan mengalami perbedaan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan derastis (rasional), seperti telah dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial

yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program – program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

### 2.2.2 Pertanian Organik dan Konvensional

Sebagai satuan ekosistem, sistem pertanian merupakan suatu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya (Poerwanto. 2012:14). Pertanian harus menjamin terjaganya keberlanjutan ekologis agar selalu seimbang dan mampu memproduksi hasil yang diharapkan. Pretty (1995) (dalam Agustina, 2011:7), mengemukakan bahwa tantangan mendasar dalam pelaksanaan pertanian berkelanjutan atau *sustainable agriculture* (SA) adalah bagaimana menggunakan daya manfaat potensi internal secara baik. Dengan kata lain bahwa yang dapat dilakukan adalah meminimalkan penggunaan masukan dari luar sistemnya dengan cara meregenerasi daya potensi internal lebih efektif atau dengan mengombinasikannya dengan masukan yang berasal dari luar. Suatu hal penting



yang menjadi salah satu tujuan *sustainable agriculture* ini adalah munculnya kemandirian petani dalam menyediakan saprodinya baik yang berasal dari lahannya sendiri maupun olahan bahan disekitarnya beserta pengetahuan lokal yang dimilikinya.

Teknologi yang digunakan di dalam SA disebut dengan *Green Technology* atau teknologi hijau. Di dalam teknologi hijau, pertanian organik merupakan salah satu bentuk dari kegiatan pertanian yang berlandaskan prinsip-prinsip di dalam *sustainable agriculture*. Maka teknologi hijau ini dapat diwujudkan di dalam pertanian organik (Agustina, 2011:8).

Sistem pertanian organik adalah suatu sistem produksi pertanian dimana bahan organik, baik makhluk hidup maupun yang sudah mati, merupakan faktor penting dalam proses produksi. Penggunaan pupuk organik (alami atau buatan) dan pupuk hayati serta pemberantasan hama, penyakit dan gulma secara biologis adalah contoh penerapan sistem pertanian organik. Arti yang lebih luas, sistem pertanian organik mencakup bidang peternakan dan perikanan yang terintegrasi dengan bidang pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan (Sugito, dkk, 1995:1)

Menurut IFOAM (*International Federation of Organic Agriculture Movements*) prinsip-prinsip pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan dan prinsip perlindungan (Agustina, 2011). *Pertama*, prinsip kesehatan: pertanian organik harus melestarikan dan menyehatkan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan individu dan komunitas tidak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Tanah yang sehat

akan menghasilkan tanaman yang sehat yang akan mendukung kesehatan hewan dan manusia. Kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem kehidupan. Secara khusus pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Mengingat hal tersebut maka harus dihindari menggunakan pupuk kimia, pestisida, obat-obatan bagi hewan yang berefek merugikan bagi kesehatan.

*Kedua*, prinsip ekologi: pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus. Sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan ekosistem perairan. Budidaya pertanian haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam. Pengelolaan organik harus disesuaikan dengan kondisi, ekologi, budaya dan skala lokal. Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologi melalui pola sistem pertanian, membangun habitat, pemeliharaan keragaman genetik dan pertanian. Mereka yang menghasilkan, memproses, memasarkan, atau mengonsumsi produk-produk organik harus melindungi dan memberikan keuntungan bagi lingkungan secara umum, termasuk didalamnya tanah, iklim, habitat, keragaman hayati, udara dan air

*Ketiga*, prinsip keadilan: prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan: seperti

petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan ketersediaan pangan maupun produk lain dengan kualitas yang baik. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara adil, secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang.

*Keempat*, prinsip perlindungan: pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Para pelaku pertanian organik didorong untuk melakukan efisiensi dan produktifitas tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraan. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjamin bahwa pertanian organik menyehatkan, aman dan ramah lingkungan.

Hadirnya sistem pertanian organik merupakan tantangan atas gagalnya pertanian revolusi hijau atau pertanian kimiawi dalam membuktikan kemampuannya mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan dalam jangka panjang (Sugito dkk, 1995:1). Berbagai permasalahan tersebut antara lain, Revolusi Hijau dengan programnya lebih menekankan pada usaha untuk peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, akan tetapi martabat petani kurang diperhatikan. Akibatnya, muncul masalah pencemaran lingkungan, hama yang resisten terhadap pestisida, hilangnya varietas-varietas unggul lokal, pendangkalan danau oleh gulma air yang semakin subur akibat pencucian hara dari sawah, lahan sawah mengalami degradasi, petani yang keracunan pestisida dan sebagainya. (Poerwanto, dkk. 2012:9).

Dampak negatif lainnya dari penerapan revolusi hijau di Indonesia dan juga di Negara-negara lainnya adalah besarnya ketergantungan petani terhadap

input pertanian dari luar. Misalnya, petani sangat tergantung kepada benih unggul, tersedianya pupuk kimia dan pestisida yang harus dibeli dari luar. Hal ini menyebabkan hilangnya kemandirian petani. Petani menjadi rentan terhadap kondisi sarana produksi pertanian (saprotan) dari luar. Padahal disekitar lahannya melimpah sumber daya yang dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi langkanya saprotan. Di lain pihak ketika panen, petani tidak mendapatkan untung banyak karena uangnya habis untuk biaya-biaya pembelian saprotan tersebut. (Poerwanto, dkk. 2012:26).

Perlunya input luar yang banyak juga menimbulkan masalah dalam penyediaan pupuk kimia. Petani sering tidak kebagian pupuk akibat kurangnya pasokan. Petani pun sudah sangat bergantung pada pestisida. Dalam benak mereka agar produksi berhasil, tanaman harus selalu dipupuk kimia dan disemprot pestisida. Ketika pupuk tidak ada, mereka merasa tidak bisa bercocok tanam. Kebiasaan menyemprot tanaman dengan pestisida, baik ada atau tidak ada hama menyebabkan efek lain yang berdampak pada lingkungan. Efek tersebut antara lain tercemarnya air dan tanah dengan bahan kimia beracun, punahnya keanekaragaman hayati di sekitar lahan pertanian, resistennya hama terhadap pestisida, dan tingginya residu pada produk pangan. (Poerwanto, dkk. 2012:20).

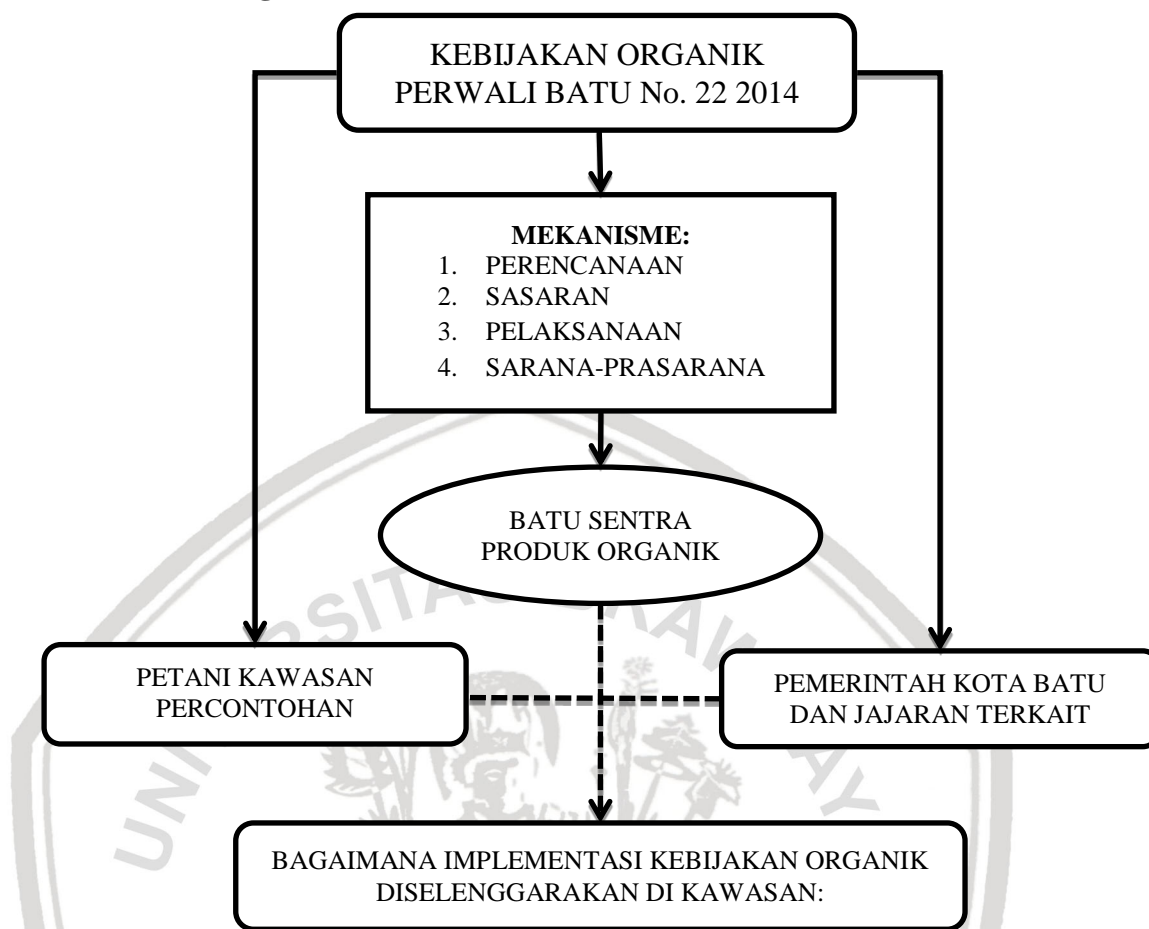
Tingginya kebutuhan pupuk telah mengubah budaya petani dan menjadikan petani tidak percaya lagi tanamannya dapat berproduksi baik tanpa pupuk. Ketergantungan petani terhadap pupuk menjadi tinggi; bertani artinya harus memupuk, kalau tidak ada pupuk tidak berani bertani karena khawatir gagal. Hal tersebut menjadikan petani bergantung pada input dari luar yang sebelumnya tidak mereka gunakan. Sebelum revolusi hijau, petani menanam

dengan menggunakan benih yang dipilih dari rumpun terbaik tanamannya, memupuk dengan pupuk kandang atau kompos yang dihasilkan sendiri dan tidak melakukan penyemprotan dengan pestisida, kecuali biopestisida yang juga gratis. (Poerwanto, dkk. 2012:5). Maka dalam hal ini pemerintah kota dalam kebijakan penyelenggaraan pertanian organik salah satu tujuannya merupakan upaya memberikan solusi kongkrit yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan pertanian kimiawi demi perbaikan kualitas pertanian di Indonesia.

Jika dikontekstualisasikan dengan yang terjadi di lapangan, maka benturan pertanian konvensional petani setempat dengan pertanian organik pemerintah kota Batu menjadi penting dimasukkan untuk menjadi landasan kajian. Sehingga terjadinya benturan dalam implementasi program organik akan menjadi ranah pertarungan kekuasaan top-down dan bottom-up yang tentunya akan melibatkan agen-agen dari tiap lapisan untuk mempertaruhkan kepentingan masing-masing. Selanjutnya, dari ranah pertarungan tersebut akan dianalisis dimensi-dimensi sosial yang timbul pasca program pertanian organik diselenggarakan di kawasan percontohan Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji.



### 2.3 Skema Kerangka Pemikiran



**Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran**

**Keterangan:** Skema dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana Pemerintah Kota Batu menjalankan kebijakannya dalam mengimplementasikan program pertanian organik di kawasan percontohan organik Desa Sumberbrantas serta dimensi permasalahan yang muncul sebagai imbas dari polemik yang terjadi. Perwali Kota Batu Tahun 2014 Tentang Sistem Pertanian Organik

**Penjelasan Kerangka Berfikir:**

Pemerintah Kota Batu sedang gencar mengimplementasikan kebijakan pertanian organik di beberapa kawasan percontohan organik, salah satunya adalah di kawasan percontohan Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Tujuan (*Output*) dari pengimplementasian program tersebut adalah terciptanya sektor pertanian yang sehat dan tidak merusak ekosistem lingkungan sehingga

Kota Batu menjadi Sentra Produk Organik. Sekaligus dapat meningkatkan perekonomian petani dengan pemasaran hasil pertanian organik yang lebih unggul di pasaran dibandingkan dengan pertanian konvensional.

Sasaran dari program ini adalah para petani yang lahannya berada pada lokasi kawasan percontohan yang telah ditentukan titiknya oleh Pemerintah Kota Batu. Para petani tersebut diwajibkan untuk melakukan penanaman sayur secara organik. Demi melancarkan hal tersebut pemerintah memberikan bantuan subsidi bibit dan pupuk kepada para petani yang disalurkan melalui kelompok, mengadakan sosialisasi langsung ke petani program, dan menghadirkan petugas penyuluh lapang untuk mengenalkan cara menanam organik dengan praktik langsung.

Upaya pencapaian implementasi berupa Batu sentra produk organik mengisyaratkan langkah strategis pihak penyelenggara untuk menyusun formula atau *planning* penyelenggaraan atas petani kawasan. Formula penyelenggaraan tidak hanya berfokus pada perubahan fisik menjadi pola tanam organik tetapi juga pola pikir petani agar serupa dengan pihak penyelenggara. *Planning* tersebut akan memuluskan upaya implementasi kebijakan. Pihak penyelenggara telah menyusun formula *top-down* terkait pentingnya menjadi organik yang selanjutnya diintruksikan melalui sosialisasi yang intensif pada petani kawasan. Hal tersebut disusun berdasar isu-isu yang berkait erat dengan permasalahan pertanian konvensional, kesehatan petani dan konsumen, serta kualitas nilai jual produk untuk kesejahteraan petani.

Normalisasi atau mekanisme kontrol juga telah dirancang untuk dipraktikkan di kawasan percontohan organik. Mekanisme kontrol yang dimaksud

seperti aturan perundangan sebagai dasar hukum, penempatan tim teknis atau pelaksana di masing-masing kawasan. Manajemen kontrol secara sosial ini dilakukan untuk menciptakan kepatuhan sekaligus antisipasi demi menghindari adanya tindakan membangkang dari petani kawasan. Terciptanya kepatuhan para petani kawasan tanpa perlu menghadirkan sosok aparat pemerintah kota sebagai penyelenggara akan memuluskan langkah implementasi kebijakan atas petani kawasan. Namun demikian dalam tahap pelaksanaan di lapangan terdapat kendala-kendala yang berujung pada polemik antara pemerintah selaku penyelenggara kebijakan program organik dengan masyarakat sasaran program, yang dalam hal ini adalah petani di kawasan pengembangan organik Desa Sumberbrantas. Polemik dalam implementasi tersebut akhirnya melahirkan dampak berbagai permasalahan bagi petani sebagai dimensi-dimensi sosial dari suatu penyelenggaraan program.

Sebagaimana dijelaskan dalam konsep implementasi kebijakan bahwa pemerintah sebagai wujud dari aparat negara memiliki kecenderungan untuk mengatur, mendisiplinkan masyarakat untuk tercapainya keberhasilan suatu kebijakan. Upaya yang dimaksud adalah perihal cara Pemerintah Kota Batu dalam mempengaruhi, mendisiplinkan, dan merubah perilaku masyarakat untuk mengikuti tatanan program organik dalam pertanian yang mereka jalankan. Kecenderungan sebuah birokrasi pemerintahan adalah upayanya untuk memaksakan kehendaknya agar tercapai keberhasilan dengan model *top-down*, yang tentu dalam hal ini akan menciptakan dimensi-dimensi lain sebagai konsekuensi dari kebijakan yang dijalankan dalam wujud sebuah program.

Dari penjelasan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan pertanian organik. Sekaligus mencoba mengidentifikasi dimensi-dimensi permasalahan lain yang muncul seiring berlangsungnya program pertanian organik tersebut. Sehingga dilakukannya penelitian ini adalah sebagai bentuk kritik atas program pemerintah kota yang sedang dijalankan di kawasan pengembangan atau percontohan Di Desa Sumberbrantas.



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010:23). Penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji fenomena secara alamiah, sebab mengharuskan peneliti untuk turun langsung bersama kehidupan obyek penelitian melalui sebuah proses untuk mendapatkan data secara mendalam.

Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh peneliti untuk mendeskripsikan upaya implementasi kebijakan pertanian organik di kawasan pengembangan Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Selain itu juga untuk menggambarkan dimensi-dimensi permasalahan sosial yang muncul sebagai konsekuensi penyelenggaraan kebijakan. Penggunaan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat memperoleh data mendalam dan alamiah tentang bagaimana upaya Pemerintah Kota Batu menyelenggarakan pertanian organik atas petani di kawasan pengembangan demi mensukseskan program organik.

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*, bila peneliti hanya sedikit memiliki peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam kehidupan nyata (Yin, 2014:1). Dalam pendekatan studi kasus, peristiwa



yang ada tidak dapat dimanipulasi sebab berdasarkan observasi dan wawancara. Tipe studi kasus yang digunakan adalah deskriptif. Tujuan dari penelitian studi kasus deskriptif adalah menggambarkan fenomena yang diteliti dengan cara dideskripsikan (Salim, 2006). Data yang didapat harus dideskripsikan secara jujur, tanpa memanipulasi dan harus sesuai fakta.

Alasan menggunakan studi kasus dalam penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan bagaimana upaya pelaksanaan program go organik di Desa Sumberbrantas antara Pemerintah Kota Batu dengan petani di kawasan pengembangan sebagai upaya mensukseskan kebijakannya di bidang pertanian. Terdapat berbagai permasalahan yang menimbulkan polemik dalam pelaksanaan kebijakan pertanian organik di Kota Batu terutama di kawasan organik Desa Sumberbrantas. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang bagaimana upaya implementasi kebijakan tersebut dijalankan

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Cakupan penyelenggaraan kebijakan batu go organik adalah seluruh wilayah Kota Batu di tiga kecamatan dengan model kawasan percontohan organik. Salah satu yang menjadi kawasan percontohan adalah Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji. Desa Sumberbrantas dipilih sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi alasan munculnya berbagai polemik dalam pelaksanaan program di lapangan. Penelitian ini menitikberatkan tentang upaya Pemerintah Kota Batu dalam menyelenggarakan implementasi kebijakan pertanian organik dan dimensi sosial yang timbul setelah program pertanian kawasan dijalankan.

Alasan lain pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kawasan pengembangan berada di wilayah dengan tingkat kemiringan lahan yang curam karena kontur wilayah yang berbukit-bukit serta curah hujan yang tinggi sedangkan tanaman sayur sangat peka dengan kondisi cuaca yang basah apalagi dengan aturan pertanian organik yang mengharuskan petani absen dalam penggunaan obat berbahan kimia. Sehingga penanganan tanaman pasca hujan menjadi kendala alam yang paling dirasakan disana. Dengan demikian penelitian ini sekaligus bermaksud mengkaji alasan Pemerintah Kota Batu menjadikan Desa Sumberbrantas sebagai salah satu kawasan organik dan strategi yang digunakan pemerintah dalam menyikapi kendala alam serta timbulnya permasalahan yang timbul pasca program diberlakukan.

### 3.4 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono, fenomena dan kasus sosial dalam penelitian sangatlah luas. Jika dalam penelitian kuantitatif terdapat batasan masalah untuk membatasi penelitian dengan satu atau lebih variabel, maka dalam penelitian kualitatif batasan masalah disebut fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2014:32).

Fokus penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kota Batu dalam upayanya menerapkan kebijakan organik atas petani di kawasan pengembangan untuk mensukseskan programnya sekaligus berupaya melakukan kajian tentang timbulnya dimensi-dimensi permasalahan pasca implementasi program organik tersebut. Di dalam implementasi program terdapat praktik *governmentality* melalui dominasi relasi kuasa antara Pemerintah Kota Batu dengan petani di kawasan organik yang akan dianalisis menggunakan konsep *governmentality* Michele

Foucault. Peneliti berusaha mendeskripsikan praktik governmentality pada upaya transformasi petani melalui penyelenggaraan kebijakan, serta mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang timbul setelahnya. Dari proses tersebut, nantinya dapat diketahui bagaimana strategi politik Pemerintah Kota Batu dalam menjalankan programnya sehingga dimensi-dimensi sosial yang dimaksud muncul sebagai bias sebuah pelaksanaan program.

### 3.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam studi kualitatif lebih menekankan kualitas informan, bukan pada kuantitas atau jumlahnya. Prosedur penentuan informan pada penelitian kualitatif secara umum memiliki karakter sebagai berikut (dalam Salim, 2006:12):

1. Tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kekhususan kasus sesuai dengan masalah penelitian.
2. Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, bisa berubah di tengah jalan sesuai pemahaman dan kebutuhan yang berkembang sampai menemukan titik jenuh.
3. Tidak diarahkan pada keterwakilan melainkan pada kecocokan konteks siapa dengan jenis informasi apa.

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive* atau teknik sampel bertujuan. Teknik *purposive* bertujuan untuk memilih informan sebagai dasar berbagai pertimbangan yaitu informan yang dianggap paham mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif informan terbagi yang terdiri dari (Suyanto, 2007:172):

1. Informan Utama

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah pengurus Gabungan Kelompok Tani Desa Sumberbrantas, Dinas pertanian dan petugas penyuluh lapang. Ketua Gapoktan dijadikan sebagai salah satu informan utama sebab informan tersebut merupakan perwakilan petani yang terlibat langsung dalam kesepakatan implementasi program organik. Selain itu, dinas pertanian dan petugas penyuluh lapang serta kelompok tani merupakan pihak yang dianggap paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan program organik tersebut.

## 2. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Sumberbrantas. Alasannya, perangkat desa cukup mengetahui tentang program pertanian organik yang sedang dilangsungkan di kawasan tersebut, serta dilibatkan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan pemerintah meskipun tidak terlibat langsung dalam proses perencanaan kegiatannya. Selain itu masyarakat yang menjadi petani di luar kawasan juga dijadikan sebagai informan tambahan untuk dapat memberikan informasi tambahan mengenai pandangan mereka tentang pelaksanaan program organik tersebut.

**Tabel 1. Informan Penelitian:**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Bapak Yusuf	Staf Praktisi Organik Dinas Pertanian Kota Batu	Informan utama Dinas Pertanian
2.	Mas Aan	Penyuluh Pertanian	Informan Utama Tim

		Pos Sumberbrantas	Pelaksana
3.	Pak Joni	Ketua Kelompok Anjasmara 1	Informan utama kelompok tani
4.	Pak Prawito	Ketua Kelompok Tani Anjasmara 4	Informan utama Kelompok tani
5.	Pak Samiran	Petani	Informan utama
6.	Darmaji	Kadus Jurangkuali	Informan tambahan
7.	Pak Kusil	Petani	Informan tambahan

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dalam metode kualitatif. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur sebagai upaya untuk memahami perilaku yang kompleks anggota masyarakat tanpa mengenakan sejumlah kategorisasi terlebih dahulu yang bisa membatasi ruang lingkup penelitian (Bungin, 2001:134). Walaupun tak berstruktur, namun peneliti harus memiliki pedoman agar tidak terkesan asal-asalan.

Teknik wawancara digunakan sebagai cara mendalami informasi dari informan baik yang terlibat secara langsung maupun tidak terlibat secara langsung. Melalui wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan kebijakan program pertanian organik yang dijalankan Pemerintah Kota Batu pada petani di kawasan percontohan Desa Sumberbrantas beserta berbagai dimensi sosial dari polemik permasalahan yang timbul.

#### 2. Dokumentasi



Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat kabar, catatan harian, arsip foto, majalah, artikel dan buku. Dalam penelitian ini peneliti akan menambahkan foto sebagai tambahan data primer berupa dokumentasi (Moleong, 2010:216-219).

### 3.6 Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2010:157), data primer atau data utama dalam penelitian kualitatif merupakan data yang didapat dari kata-kata dan tindakan. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber asli tanpa perantara melalui observasi langsung dan hasil wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diambil melalui proses interaksi langsung dengan penyelenggara program dan petani Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti literatur, buku, berita, artikel, majalah, jurnal yang membahas tentang praktik pelaksanaan kebijakan pertanian organik serta data-data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data

bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data

berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

## 2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330) Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode,

penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan

untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat.

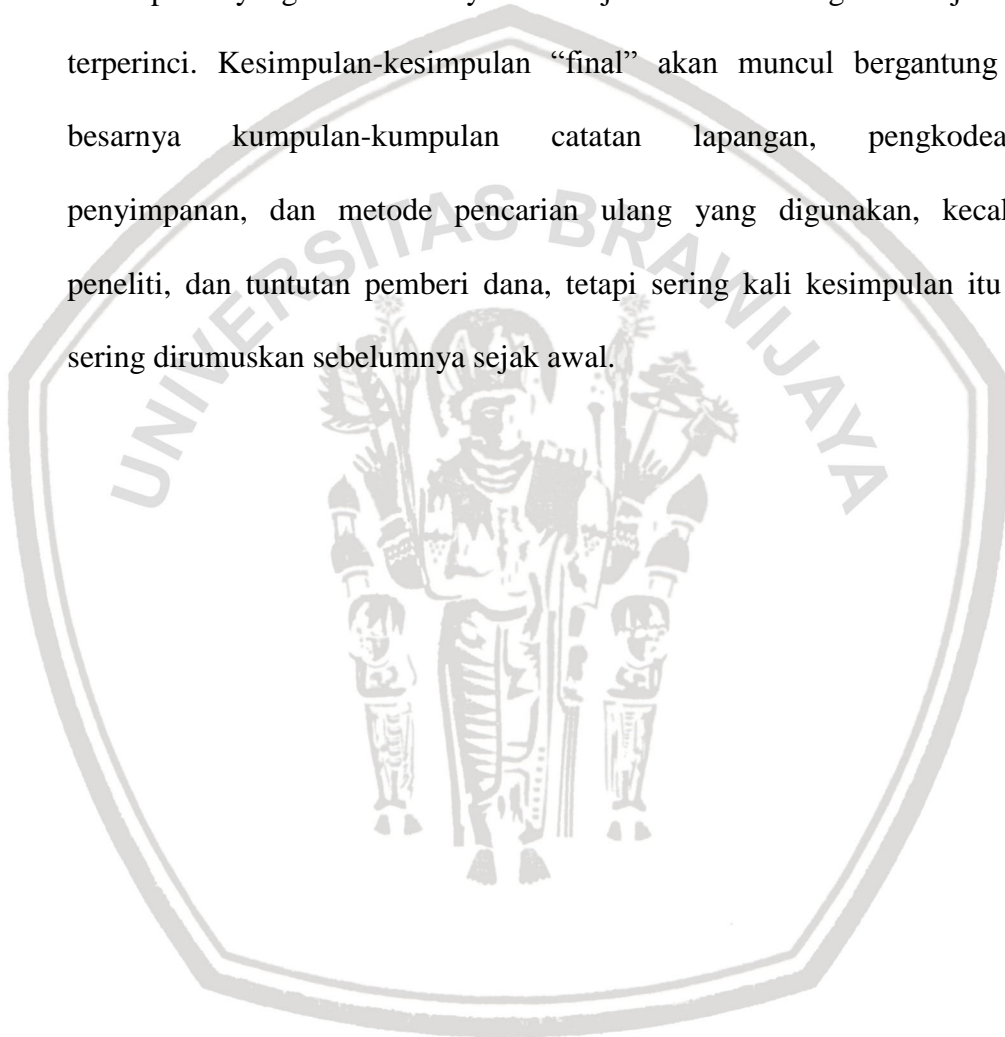
Murti B., 2006 menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin R.K, 2003 menyatakan bahwa pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340).

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.



### 3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.



## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Kondisi Umum Desa Sumberbrantas

Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Kota Batu merupakan desa yang terletak di wilayah barat daya lereng Gunung Arjuno dan sebelah timur Gunung Anjasmoro sebelah selatan Gunung Welirang merupakan daerah pegunungan dan mempunyai hamparan lahan pertanian yang sangat subur, yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Penduduk Desa Sumberbrantas hampir keseluruhannya adalah petani yang pada umumnya menghasilkan produk pertanian sayur mayur dan hortikultura yang sangat baik kualitasnya. Di desa tersebut sesuai dengan namanya terdapat mata air sungai Brantas yang mengalir ke beberapa wilayah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur.

Desa Sumberbrantas memiliki luas wilayah lebih kurang 541 hektar yang terbagi dalam 3 dusun, yaitu Dusun Jurangkuali dengan luas wilayah 270,5000Ha, Dusun Lemah Putih seluas 180,4764Ha, dan Dusun Krajan seluas 90,1600Ha. Luas wilayah desa yang terbagi menjadi 3 dusun tersebut secara tataguna lahan masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsinya, antara lain penggunaannya sebagai kawasan pemukiman, pekarangan, pertanian, sekolahan, tempat ibadah, makam, lapangan, dan lain-lain. Berikut sajian data distribusi tataguna lahan desa yang bersumber dari profil monografi desa sumberbrantas:

**Tabel 3. Luas Daerah dan Tataguna Lahan Desa Sumberbrantas**

No.	Tataguna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	134,5710	24,86
2	Pekarangan	51,6320	9,54
3	Pertanian	318,3234	58,82
4	Makam	1,5000	0,27
5	Lapangan	1,0000	0,18
6	Sekolahan	0,8000	0,14
7	Tempat rekreasi	22.0000	4,06
8	Musholla	1,1000	0,20
9	Masjid	0,0700	0,01
10	Budidaya Jamur	10,0000	1,84
11	Lain-lain	0,1600	0,02
<b>Total</b>		<b>541,1364</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Monografi Desa 2015

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar tata guna lahan di wilayah Sumberbrantas digunakan untuk pertanian yaitu sebesar 318,32Ha atau sebesar 58,82% dari total luas wilayah Desa. Oleh karena itu, pengambilan fokus penelitian di bidang pertanian menjadi cocok bila dilakukan di Desa Sumberbrantas. Tata guna lahan yang maksimal difungsikan penduduk desa sebagai pertanian menunjukkan adanya pengaruh topografi wilayah yang memiliki karakteristik di dataran tinggi yakni 1.400m s/d 1.700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan tinggi bersuhu rata-rata 8 s/d 18 derajat celcius.

Topografi Desa Sumberbrantas yang berada di ketinggian dengan pemakaian tataguna lahan di bidang pertanian tentu mempengaruhi jenis komoditas yang berkesesuaian dengan kondisi alamnya. Jenis komoditas tanam di lahan pertanian Sumberbrantas mayoritas adalah produk holtikultura dan sayur-mayur. Berikut daftar komoditas tanam yang ada di lahan pertanian penduduk desa:

**Tabel 4. Potensi Hortikultura Desa Sumberbrantas**

No.	Komoditas	Luas Lahan (ha)	Produksi (ton)
1	Kentang	100	2.000
2	Wortel	25	1.500
3	Kobis	75	3.750
4	Petsai	25	1.500
5	Kembang Kol	2	30
6	Paprika	0,25	-
7	Jamur	15	-
8	Jeruk Siam/Kepruk	1	50
9	Apel	7	178
10	Hortensia	0,5	1.500 tanaman
11	Calalili	2,5	1.000 tanaman

Sumber: Data Monografi Desa 2015

Berdasarkan data yang tersaji menunjukkan keadaan umum pertanian penduduk Desa Sumberbrantas didominasi dengan komoditas kentang seluas 100Ha dan kobis seluas 75Ha, serta wortel dan petsai yang masing-masing dengan luas 25Ha. Kondisi ini menunjukkan adanya keseragaman dan tidak adanya keanekaragaman komoditas untuk dapat bersaing antar penduduk desa dengan produk pertanian yang nyaris sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa kelemahan bagi penduduk desa jika harga komoditas tertentu mengalami penurunan harga di pasaran, maka akan langsung berimbas pada hampir seluruh penduduk yang notabene memiliki kesamaan produk tanam. Namun keseragaman komoditas ini menunjukkan bahwa Desa Sumberbrantas menjadi sentra komoditas kentang dan kobis yang memiliki lahan luas dan mampu memproduksi ribuan ton pertahunnya.

Luasnya lahan dan produk utama yang menjadi andalan penduduk Desa Sumberbrantas adalah kentang dan kobis juga menjadi alasan Pemerintah Kota Batu mendaulat petani Desa Sumberbrantas untuk menerapkan sistem pertanian organik dengan komoditas unggulannya. Hal ini juga berkaitan dengan dasar masa

depan bagi penduduk setempat untuk memperbaiki kualitas tanah dan produk pertanian Desa Sumberbrantas yang telah mengalami kerusakan ekosistem karena kelebihan pupuk kimia dan residu pestisida. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Yusuf mewakili pihak Dinas Pertanian bahwa latar belakang diterapkannya kebijakan pertanian organik salah satunya adalah untuk menyelamatkan lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian yang dapat merusak ekosistem, upaya untuk menghasilkan produk yang sehat bagi konsumen, dan sebagai upaya untuk meningkatkan harga jual demi kesejahteraan para petani. Berikut kutipan wawancaranya:

“Latar belakang kebijakan tersebut digulirkan adalah untuk peningkatan kawasan pariwisata pada sektor pertanian karena sesuai dengan visi dan misi dari Pemerintah Kota Batu untuk menjadikan Kota Batu sebagai salah satu sentra produk organik. Itu pertama, kedua menyelamatkan lingkungan dengan menerapkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Maksudnya penerapan kebijakan ini berkaitan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian yg merusak ekosistem. Ketiga, untuk menghasilkan produk yang sehat bagi konsumen, karena bagaimanapun masyarakat sekarang mulai memperhatikan kualitas dari apa yang mereka konsumsi. Terakhir adalah harga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dengan tingkat jual produk yang bisa 2 sampai 3 kali lipat dibanding pertanian konvensional.”(wawancara Yusuf, 27 Januari 2017)

Selain itu alasan tersebut, sebaran mata pencaharian penduduk juga tidak lepas dari kondisi alamnya yaitu sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Distribusi mata pencaharian penduduk Desa Sumberbrantas dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Buruh Tani	737	30,39
2	Petani	1.566	49,16
3	PNS	6	0,39
4	Pegawai Swasta	266	17,1
5	Pedagang	46	2,96
<b>Total</b>		<b>1555</b>	<b>100</b>



Sumber: Data Monografi Desa 2015

Mata pencaharian merupakan suatu upaya manusia untuk mempertahankan diri dalam kehidupan, karena dengan itu manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari total jumlah penduduk Desa Sumberbrantas yang memiliki mata pencaharian sebesar 1555 jiwa dari total penduduk sebesar 4196 jiwa. Berdasarkan besaran jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian telah mengindikasikan adanya beban berlebih tiap satuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Mengingat hadirnya kebijakan organik yang tergolong baru bagi para petani, tentunya faktor keadaan perekonomian keluarga menjadi pertimbangan tersendiri bagi para petani untuk beralih menggunakan sistem pertanian organik.

Selain itu, besaran jumlah mata pencaharian penduduk setempat didominasi petani dan buruh tani mengingat tata guna lahan hampir 75% dimanfaatkan pada sektor pertanian. Sehingga tabel di atas juga memperlihatkan bahwa penduduk setempat telah menggeluti pertanian dengan pola tanam yang telah membentuk disiplin dan strategi bertahan hidup mereka dari waktu ke waktu. Maka hadirnya program pertanian organik ini akan memiliki imbas tersendiri pada pola tanam lama atau konvensional penduduk setempat dan sekaligus menjadi tantangan bagi pihak penyelenggara program untuk merubah pola lama pertanian konvensional masyarakat setempat untuk beralih ke pola tanam baru yakni pertanian organik.

Tantangan pihak penyelenggara kebijakan organik dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Batu lain tidak adalah terkait upaya untuk merubah pola pikir penduduk desa yang telah menggunakan pola tanam konvensional sejak dulu untuk dapat beralih menerapkan pola tanam baru berupa pertanian organik. Upaya

merubah pola pikir penduduk akan menghadapi tantangan berupa ragamnya tingkat pendidikan penduduk desa dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Hal ini tentu berpengaruh pada cara bagaimana penyelenggara akan menyikapi dan menyiapkan strategi agar implementasi kebijakan pertanian organik yang sedang mereka selenggarakan dapat diserap serta dipahami oleh semua penduduk desa. Berikut distribusi penduduk Desa Sumberbrantas berdasarkan tingkat pendidikannya:

**Tabel 6. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Presentase
1	TK	161	3,84
2	SD	2329	55,5
3	SMP	526	12,54
4	SMA	231	5,5
5	Akademi	20	0,48
6	Sarjana	47	1,12
7	Lain-lain	882	21,02
<b>Total</b>		<b>4196</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Monografi Desa 2015

Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa telah menempuh pendidikan pada jenjang SD yaitu sebesar 55,5%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Sumberbrantas memiliki varian tingkat pendidikan yang pernah ditempuh. Sehingga dapat dipahami juga jika sebagian besar penduduk akan memiliki pola pemahaman yang berbeda atas sosialisasi teknologi pertanian organik yang masih baru bagi petani setempat. Kondisi tersebut seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara kebijakan dalam melakukan sosialisasi untuk menyesuaikan strategi sosialisasi pada petani yang memiliki perbedaan tingkat pendidikan. Maka proses penyelenggaraan kebijakan pertanian organik pada tingkat teknis di lapangan akan menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dalam

menyampaikan informasi kepada petani. Penyampaian informasi berupa sosialisasi sekaligus menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah pertanian organik dapat dipahami oleh petani percontohan untuk kemudian diterapkan atau tidak sama sekali.

#### **4.2 Kondisi Umum Pertanian Desa Sumberbrantas sebelum dan sesudah menjadi Kawasan Percontohan Organik**

Penduduk Desa Sumberbrantas sangat dipengaruhi oleh lingkungan hidup tempat mereka tinggal baik kondisi sosial ekonomi dan budaya yang tidak bisa terlepas dari lingkup pertanian. Kondisi ini berbanding lurus dengan topografi alam yang saling berkaitan dengan profesi dan potensi pertanian yang ada di sana. Sehingga penduduk desa secara langsung maupun tidak langsung sebagian besarnya telah menggantungkan laju hidup mereka pada pertanian. Sistem pertanian penduduk desa mau tidak mau harus menjadi pertarungan yang akan menentukan kelangsungan hidup mereka di masa depan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum situasi dan kondisi pertanian di Desa Sumberbrantas sebelum dan sesudah diselenggarakannya program kawasan percontohan organik:

##### **4.2.1 Kondisi Umum Pertanian Sebelum menjadi Kawasan Organik**

Sistem pertanian penduduk desa sebelum hadirnya program pertanian organik Pemerintah Kota Batu adalah sistem pertanian kimiawi yang berakar dari revolusi hijau atau yang biasa disebut dengan pertanian konvensional. Pola pertanian konvensional ditandai dengan intensitas penggunaan bahan kimiawi dan pestisida untuk menghilangkan penyakit tanaman sekaligus upaya mempercepat pertumbuhan tanaman demi pencapaian hasil yang maksimal. Penggunaan sistem

pertanian konvensional memiliki orientasi hasil, yang dalam hal ini tanaman akan dipacu dengan obat kimia untuk mempercepat tumbuh dan memperbanyak kuantitas hasil panen sehingga mengabaikan kualitas produk serta kapasitas tanah dalam menampung bias pemakaian bahan kimia yang berlebih.

Sistem pertanian konvensional yang berorientasi hasil tersebut akhirnya menuai berbagai dampak negatif yang antara lain berupa degradasi kualitas tanah, residu pestisida, kesehatan petani, dan juga pencemaran lingkungan baik air maupun udara. Sehingga Pemerintah Kota Batu dalam hal ini mengeluarkan kebijakan pertanian organik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh pertanian konvensional tersebut. Meskipun tujuan diterapkannya pertanian berkelanjutan berupa pertanian organik oleh pemerintah demi perbaikan sistem pertanian masyarakat. Akan tetapi mengingat pola pertanian konvensional telah mengakar dan digunakan petani setempat sejak dulu serta menjadi perilaku kebiasaan baik itu salah maupun benar tentunya akan berbenturan dengan pola pertanian organik yang masih sangat baru bagi petani Sumberbrantas yang diharuskan menanam di kawasan.

a. Sejarah penggunaan pertanian konvensional di lahan pertanian

Penggunaan sistem pertanian konvensional di lahan pertanian Kota Batu telah dimulai sejak orde baru ketika repelita dilaksanakan. Gencarnya intensifikasi penggunaan teknologi revolusi hijau melalui penggunaan bibit unggul, penanganan hama dengan pestisida dan subsidi usaha tani telah mampu membawa indonesia meraih swasembada. Kesuksesan yang diraih di bidang tanaman padi juga merambat ke tanaman pangan lainnya termasuk hortikultura. Di Kota Batu sendiri, lebih khusus Jurangkuali Desa Sumberbrantas telah melakukan pola

pertanian konvensional dengan menghasilkan produk hortikultura yang berasal dari teknologi revolusi hijau.

Kendati demikian, prestasi mentereng Indonesia yang telah meraih swasembada telah mengalami krisis dan cacat dengan penurunan hasil panen nasional. Turunnya hasil panen di berbagai daerah disebabkan tidak produktifnya lahan garapan petani karena timbunan dari residu pestisida, ledakan hama dan organisme pengganggu tanaman yang sulit dikendalikan oleh petani dan mengharuskan penanganan yang intens melalui penyemprotan pestisida dan bahan kimia lainnya. Beban biaya produksi pertanian akhirnya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan hasil produksi yang mengalami penurunan.

Permasalahan serupa juga dialami para petani percontohan di Desa Sumberbrantas yang merasakan ketergantungan dengan pestisida dan obat kimiawi lainnya dalam merawat tanaman mereka. Adanya serangan hama yang bertubi-tubi mengharuskan para petani melakukan penyemprotan obat, curah hujan yang tinggi juga memberikan efek buruk pada daun ketika tidak segera ditangani dengan penyemprotan pestisida dan sebagainya. Sehingga dalam benak petani tanaman harus selalu diobat untuk dapat merasakan panen. Pemikiran semacam ini merupakan efek dari penggunaan teknologi pertanian konvensional yang telah sejak dulu dipraktikkan oleh petani setempat.

Kebiasaan dan perilaku para petani sangat sejalan dengan pola pertanian konvensional yang mengandalkan orientasi hasil dengan efektifitas pemakaian pestisida dan bahan kimiawi lainnya. Efek samping seperti degradasi kesuburan tanah, kontaminasi air irigasi, residu pada produk pertanian, dan kesehatan petani tidak terlalu dirasakan serta diperhatikan oleh sebagian petani. Sikap abai para



petani tersebut mengingat kebiasaan menangani berbagai permasalahan tersebut telah lama dijalani, sehingga praktik pertanian konvensional telah terjalin erat sebagai ritme kerja para petani setempat.

b. Dampak penggunaan pertanian konvensional

Sebagai wujud dari pertanian yang menggunakan teknologi revolusi hijau, maka sangat dimungkinkan berlangsungnya dampak berkepanjangan dari penerapan pertanian konvensional. Dampak yang terjadi di pertanian Kota Batu antara lain degradasi lahan, residu atau kontaminasi pestisida pada tanah air dan produk pertanian, serangan hama yang makin intens dan kebal obat serta gangguan kesehatan manusia. Penyebab dari dampak penggunaan sistem pertanian konvensional adalah dari pemakaian bahan-bahan kimia seperti pestisida dan obat-obatan kimiawi lainnya yang terlalu banyak dan intens demi mengendalikan hama pengganggu tanaman dan mensiasati iklim. Sehingga kepekaan tanah dan komposisi unsur hara menjadi tidak stabil.

Situasi dan kondisi ketidakstabilan ekosistem mengharuskan adanya penanganan berupa konversi lahan dan selanjutnya beralih menerapkan pertanian berkelanjutan. Pemerintah Kota Batu berdasarkan pertimbangan tersebut akhirnya mengeluarkan solusi untuk mengatasi permasalahan pertanian tersebut dengan menerapkan kebijakan berupa pertanian organik. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam visi dan misi Walikota dan merupakan bagian dari pengembangan pariwisata pertanian dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui produk unggulan organik jika program organik berhasil nantinya.

#### 4.2.2 Kondisi Umum Pertanian Setelah menjadi Kawasan Pengembangan Organik

Upaya transformasi sistem pertanian dari konvensional ke organik tidak serta merta akan menjadi perkara yang mudah bagi penyelenggara maupun petani sasaran. Kemungkinan munculnya dampak dari benturan kepentingan akan melahirkan dimensi-dimensi sosial dan ekonomi baik yang diinginkan maupun yang tidak sama sekali. Hal ini mengingat upaya mengubah perilaku petani konvensional untuk dapat beralih mengikuti kemauan penyelenggara kebijakan pertanian organik tidak akan semudah membalikkan tangan. Beragam faktor akan sangat menentukan dalam peralihan yang sedang diupayakan pemerintah, petani memiliki pertimbangannya sendiri untuk dapat beralih sebagaimana pemerintah sebagai penyelenggara akan bersikeras untuk mensukseskan implementasi kebijakannya.

Kebijakan pertanian organik yang sedang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Batu di sejumlah desa di Kota Batu untuk kawasan percontohan merupakan sebuah solusi yang berdasar pada alasan permasalahan pertanian akibat eksekusi penggunaan bahan kimia berlebihan. Hadirnya pertanian organik bertujuan untuk memperbaiki ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah Kota Batu dalam hal ini mengencangkan sosialisasi guna penerapan sistem pertanian berkelanjutan sekaligus memompa petani untuk beralih dan berubah menjadi petani organik sehingga ekosistem lingkungan yang sehat dan kesejahteraan mereka dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dijelaskan dalam pasal 5 bahwa,

Pemerintah Daerah telah merencanakan perlindungan lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian pada kawasan pertanian beririgasi teknis dan lahan kering atau tadah hujan. Jenis kawasan yang dimaksud yaitu lahan marginal, tanah terlantar, dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Bentuk pelaksanaannya berupa sebuah kebijakan, strategi, program, dan evaluasi.

Salah satu bentuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan telah tercantum dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek serta termasuk dalam Dokumen Penataan Ruang Daerah antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RTDR Kota Batu. Beberapa wilayah atau kawasan yang termasuk Dalam RTRW meliputi:

**Table 7. Klasifikasi Kawasan Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah**

No.	JENIS KAWASAN	KELURAHAN/DESA
1	Tanaman Hortikultura (Apel, Jeruk, dan Sayuran)	Pandanrejo, Giripurno, Bumiaji, Songgokerto, Sumberejo, Punten, Gunungsari, Bulukerto, Sumbergondo, Tlekung, Oro-oro Ombo, Ngaglik, Pesanggrahan, Sumberbrantas dan Tulungrejo
2	Tanaman Hias/Bunga	Sidumulyo, Sumberejo, Temas, Pesanggrahan, Sisir, Pandanrejo dan Gunungsari.
3	Tanaman Pangan	Pendem, Torongrejo, Giripurno, Pandanrejo, Beji, Mojorejo, Junrejo, Dadaprejo, Sisir, dan Temas.

Sumber: Data olean pribadi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Tahun 2012

Berdasarkan data tersebut Kawasan Pertanian Desa Sumberbrantas yang menjadi lokus kajian dalam penelitian ini merupakan salah satu dari 5 wilayah yang ditunjuk menjadi kawasan pertanian berkelanjutan yang dalam hal ini adalah kebijakan pertanian organik. Kawasan pertanian yang ada di Desa Sumberbrantas ditunjuk menjadi kawasan percontohan karena memiliki karakteristik wilayah yang cocok. Menurut pernyataan kepala praktisi organik dinas pertanian dan kehutanan Kota Batu dipilihnya Sumberbrantas karena alasan antara

lain, ekosistemnya mendukung dan dekat dengan sumber air dan memungkinkan untuk meminimalisir adanya residu irigasi sehingga tidak memerlukan treatment tertentu. Berikut kutipan pernyataan beliau:

Awal kita untuk *launching* organik itu alasan di 5 wilayah. Di 5 wilayah ini ekosistemnya mendukung. Jadi kalo misalkan di Sumberbrantas itu kawasan yang kita kembangkan 10 ha itu dekat dengan sumber air. Walau pun nanti bukan dekat dengan sumber air kayak di desa Pendem. Nanti ada *treatment-treatment* sendiri untuk air ini... (wawancara Bpk Ysf 27 Januari 2017)

Namun demikian, upaya perubahan perilaku para petani konvensional untuk beralih menjadi petani organik merupakan persoalan tersendiri. Berbagai permasalahan muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Salah satu yang menjadi wujud permasalahan adalah kesiapan para petani dalam menerima sistem pertanian baru yang harus mereka terapkan sebagai pengganti sistem pertanian konvensional yang sudah mereka terapkan sejak dulu. Perbandingan sistem pertanian menjadi pertimbangan dan keraguan bagi para petani yang masih awam dengan pertanian organik. Sehingga proses peralihan sistem pertanian oleh petani masih berjalan setengah-setengah yakni dengan masih diterapkannya pertanian semi organik atau kombinasi dari pertanian konvensional dan organik.

#### 4.3 Deskripsi Informan Penelitian

##### a. Informan Utama Dinas Pertanian Kota Batu

Bapak Yusuf Staf Praktisi Pertanian Organik Dinas Pertanian Kota Batu. Beliau merupakan salah satu yang turut serta dalam perencanaan kebijakan pertanian dibawah pemerintahan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Oleh karena itu, alasan dipilihnya beliau sebagai informan utama pada penelitian yang dilakukan adalah karena kapasitasnya yang relevan

dengan kajian utama permasalahan penelitian yaitu implementasi kebijakan pertanian organik dalam bentuk program kawasan percontohan organik.

Posisi strategis yang diduduki beliau sebagai praktisi organik sekaligus pakar organik Dinas merupakan jalan masuk utama bagi peneliti untuk dapat menelusuri kedalaman informasi terkait kebijakan pertanian pemerintah kota yang sedang dijalankan. Sebagaimana keperluan peneliti untuk menelisik bagaimana kebijakan tersebut dirancang, tujuan dibuatnya, dan cara kebijakan tersebut diimplementasikan pada petani sasaran, serta dimensi-dimensi sosial apa saja yang timbul dalam proses transformasi pertanian antara penyelenggara kebijakan dan petani di kawasan percontohan.

Selain itu, beliau juga memiliki keterlibatan dari sejak pertama kali kebijakan tersebut dirancang hingga saat ini. Keterlibatan beliau menjadi keuntungan tersendiri bagi peneliti untuk dapat mencari data tentang gambaran mekanisme dan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam kurun waktu pelaksanaan kebijakan. Sehingga kajian tentang pertanian berdasarkan pada tingkat penyelenggara kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Batu dapat diperoleh data yang kredibel dan lengkap serta orisinil mengingat posisi dan keterlibatan beliau di dalam pemerintahan sebagai praktisi organik Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

**b. Informan Utama Tim Teknis Pelaksana atau Penyuluh**

Mas Aan sebagai Petugas Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kota Batu, di Pos Sumberbrantas. Beliau merupakan petugas penyuluh yang khusus ditugaskan oleh Dinas Pertanian di Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji. Alasan peneliti memilih beliau sebagai informan utama yang mewakili tim



pelaksana atau penyuluh pertanian adalah karena posisinya yang strategis sebagai penyuluh khusus di desa tempat penelitian ini dilakukan. Sehingga beliau dianggap berkapasitas dan kompeten untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan dan penyuluhan yang dilakukan sekaligus dapat dijadikan jalan peneliti dalam penelusuran lebih jauh terkait permasalahan yang dihadapi selama berlangsungnya kebijakan di tingkat tim pelaksana atau penyuluh.

Posisi strategis yang diduduki beliau akan memberi masukan informasi orisinal sebagai data yang sangat dibutuhkan peneliti untuk menggambarkan situasi implementasi kebijakan yang diwakilkan kepada beliau selaku tim penyuluh lapang. Sehingga tugas dan peran tim pelaksana di lapangan dapat dipetakan dalam percaturan kebijakan pertanian organik yang sedang berlangsung di Kota Batu. Hal ini mengingat posisi genting tim penyuluh sebagai eksekutor dan ujung tombak pelaksana atau sebagai penyambung lidah kepada petani sasaran program di kawasan percontohan. Maka dengan dipilihnya beliau akan sangat berguna dalam mengisi benang merah permasalahan penelitian.

c. Informan Utama Kelompok Tani

Bapak Ketua Kelompok Joni sebagai Ketua Kelompok Tani Anjasmara 1 dan Bapak Prawito sebagai Ketua Kelompok Tani Anjasmara 4. Kedua Ketua Petani tersebut dipilih sebagai informan utama di level kelompok tani memiliki alasan sebagai berikut. Pertama, posisi strategis sebagai ketua kelompok menjadikan informasi yang diperoleh nantinya akan langsung bersumber dari pimpinan perhimpunan petani tersebut sehingga

tidak diperlukan lagi klarifikasi kepada anggota yang berkedudukan lebih tinggi. Kedua, dipilihnya kedua ketua kelompok tani bukan dalam rangka membandingkan atau memperlebar fokus penelitian melainkan pertimbangan keterlibatan sebagian anggota dari kedua kelompok sebagai petani sasaran program pada implementasi kebijakan pertanian organik di kawasan percontohan Desa Sumberbrantas. Sekaligus ketiga, untuk menghindari informasi yang samar atau patah jika hanya memilih salah satu kelompok tani sebagai informan penelitian dan sebagai upaya menelusuri lebih jauh sumber permasalahan dalam implementasi kebijakan pada level kelompok tani yang bertanggungjawab sebagai wadah para petani desa dan distributor hibah bibit dan pupuk dari Pemerintah Kota.

d. Informan Utama Petani Kawasan Percontohan

Pak Samiran Sebagai Informan Utama Petani Kawasan Percontohan dan Anggota Kelompok Tani. Pemilihan beliau sebagai informan utama petani percontohan dikarenakan peneliti memiliki pertimbangan sebagai berikut. Pertama, keterlibatan beliau pada kelompok tani telah berlangsung sejak berdirinya kelompok di tahun 80an hingga terbelah menjadi 2 kelompok anjasmara 1 dan 4. Kedua, beliau merupakan bagian dari kelompok anjasmara 1 dan mulai mengundurkan diri secara sepihak dari kelompok tersebut dan beralih memanfaatkan jasa pembelian dan distribusi sarana produksi pertanian dari kelompok anjasmara 4 atas pertimbangan sendiri. Sehingga ketiga, peneliti menimbang pentingnya beliau untuk menjadi informan utama petani percontohan dengan informasi dari pengalamannya berkecimpung di dalam kelompok tani dan sekarang berada di dua kelompok yang berbeda. Meskipun

informan dari level petani kawasan percontohan tidak hanya beliau, tetapi peneliti memilih menempatkan beliau sebagai yang utama atas dasar-dasar pertimbangan sebelumnya.

e. Informan Tambahan Perangkat Desa Sumberbrantas

Bapak Darmaji Sebagai Kepala Dusun Jurangkuali, Desa Sumberbrantas, sebagai petani kawasan percontohan dan anggota kelompok tani. Dipilihnya beliau sebagai informan tambahan memiliki alasan karena jabatan yang didudukinya sebagai kepala dusun sekaligus mewakili informasi yang dipunyai pihak Desa Sumberbrantas. Pertimbangan ini mengingat struktur perangkat desa telah mengalami perubahan karena telah berlangsung pemilihan kepala desa di tahun 2016 silam sehingga peneliti merasa akan ada keterputusan informasi jika memilih perangkat desa yang baru saja bertugas. Selain itu, beliau bapak Darmaji merupakan kepala Dusun Jurangkuali dimana kedua kelompok tani Anjasmara bertempat dan juga sebagian besar petani yang menjadi sasaran implementasi kebijakan kawasan percontohan organik bertempat tinggal.

Berikut daftar petani yang termasuk dalam lahan 12 hektar demo plotting atau kawasan percontohan organik di Dusun Jurangkuali Desa Sumberbrantas yang sebagian diantaranya turut menjadi informan penelitian:

**Table 8. Daftar Anggota Kelompok Petani Kawasan Percontohan Sumberbrantas**

No	Nama	Jabatan	Ket.	No.	Nama	Jabatan	Ket.
1	Pak Muntholib	Anggota		13	Pak Prawito	Ketua 4	Informan utama
2	Pak Joni	Ketua 1	Informan utama	14	Haji Tasrip	Anggota	
3	Ibu Rupini	Anggota		15	Haji Ngadi	Anggota	
4	Pak	Anggota		16	Haji Joko	Anggota	

	Slamet				Lesmono		
5	Haji Imam	Anggota		17	Pak Kusil	Anggota	Informan tambahan
6	Pak Sutaat	Anggota		18	Pak Darto	Anggota	
7	Pak Manan	Anggota		19	Pak Dasiman	Anggota	
8	Pak Darkasi	Anggota		20	Pak Juni	Anggota	
9	Dien Tien/ Cino	Anggota		21	Ibu Heri	Anggota	
10	Pak Noto	Anggota		22	Supini	Anggota	
11	Pak Samiran	Anggota	Informan utama	23	Pak Rateno	Anggota	
12	Darmaji	Kadus Jurangkuali	Informan tambahan	24	Ibu Maryam	Anggota	

Sumber: Data olahan pribadi, 2018



## **BAB V PEMBAHASAN**

### **5.1 Peraturan Pemerintah Kota Batu Tentang Kebijakan Pertanian Organik**

Peraturan Pemerintah Kota Batu tentang kebijakan pertanian organik yang saat ini sedang dalam proses implementasi atau penerapan merupakan bagian dari agenda yang juga tertuang dalam visi-misi pemerintahan. Sebagai sebuah peraturan pemerintah sudah tentu telah melalui berbagai proses perencanaan dan sudah memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan. Kekuatan hukum yang telah mendasari diberlakukannya kebijakan tersebut akhirnya mengharuskan adanya suatu implementasi agar apa yang telah dirancang selanjutnya dapat dicapai keberhasilan. Berikut gambaran umum perihal agenda yang terkait peraturan kebijakan pertanian organik Pemerintah Kota Batu:

Penyelenggaraan pertanian organik di kawasan percontohan bersumber pada Perda Kota Batu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Perwali Kota Batu Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Pertanian Organik. Implementasi pertanian organik memiliki tujuan untuk memperbaiki ekosistem lingkungan dengan mengurangi beban pencemaran lingkungan pertanian, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengkonsumsi makanan sehat, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dengan membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dapat memberi kepastian usaha bagi produsen produk. Hal ini sekaligus dapat memberi jaminan kepastian peredaran produk organik yang memenuhi syarat kepada masyarakat.



Adapun ruang lingkup penyelenggaraan kebijakan pertanian organik berdasarkan peraturan walikota antara lain, sebagai berikut:

1. Penerapan dan Budidaya Pertanian Organik
2. Sarana Produksi dan Pengolahan
3. Peran Serta Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Media Massa, Masyarakat, dan Petani
4. Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pertanian
5. Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Produksi Pertanian Organik
6. Pembinaan dan Pengawasan
7. Pemberian Insentif
8. Penerapan Sanksi dalam Penerapan Sistem Pertanian Organik.

Tahapan penerapan sistem budidaya organik di kawasan percontohan atau pengembangan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai berikut:

1. Mengurangi penggunaan imputan anorganik secara bertahap dengan menggunakan imputan organik secara terus-menerus hingga menggunakannya secara penuh
2. Komoditas yang dikembangkan dalam pertanian organik terdiri dari tanaman pangan, hortikultura unggulan, dan peternakan organik.

Selanjutnya, upaya memberdayakan penggunaan pupuk organik secara penuh dilaksanakan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Tahun I : Peningkatan kualitas unsur agroekosistem;
- b. Tahun II : Optimalisasi penggunaan input organik;
- c. Tahun III : Menumbuhkan keseimbangan agroekosistem dan pengelolaan usaha sekawasan;

- d. Tahun IV : Pertanian organik memenuhi skala ekologis dan ekonomis dengan manajemen holistik;
- e. Tahun V : Pertanian organik berkelanjutan dan bersertifikat.

Peranan pemerintah daerah dalam percaturan pertanian organik berdasarkan peraturan Walikota yaitu pertama, menyediakan lahan untuk pengembangan sistem pertanian organik. Kedua memberikan subsidi, insentif, dan penghargaan kepada Gapoktan, Kelompok Tani, dan Petani. Ketiga, melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana kebijakan pertanian organik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dalam kebijakan pertanian organik diantaranya sebagai berikut: pemberian insentif berupa pengurangan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas lahan pertanian organik, pengembangan usaha organik dan pemberian bantuan pupuk dan bibit tanaman organik. Insentif lain yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah berupa bantuan tunai bagi kelompok dan Gapoktan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan program pertanian kawasan. Menurut keterangan informan Dinas Pertanian dan Kehutanan Bapak YSF setiap Gapoktan akan mendapatkan secara langsung transfer tunai sejumlah 25 juta rupiah yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pemberian insentif oleh Kepala Dinas.

Teknis implementasi kebijakan pertanian organik sebagaimana dimaksudkan adalah dengan menyediakan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tahun 2012 dalam pasal 51 tentang

penyuluhan dan pendampingan. Berikut penjelasan teknis pendampingan yang dimaksud:

- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- 2) Fasilitasi penyuluhan berupa penyediaan paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa yang termasuk di dalam kawasan usaha tani.
- 3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- 4) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar petani dapat melakukan:
  - a. tata cara budidaya, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

Penjelasan mengenai teknis implementasi dalam upaya pemberdayaan petani setempat diulas lebih lanjut dalam Perwali Batu Tahun 2014 pasal 22 tentang pembinaan dan pengawasan sistem pertanian organik, sebagai berikut:

- a) Pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dilaksanakan oleh Dinas, Penyuluh Pertanian Lapangan, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, dan instansi terkait lainnya.
- b) Dinas melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.
- c) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani dan produsen pupuk organik.

- d) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- e) Pembinaan Sistem Pertanian Organik dapat melibatkan partisipasi dari pihak lain yang kompeten dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Instansi terkait lingkup pertanian.
- f) Kegiatan pembinaan dan pengawasan meliputi:
  - 1) teknik pembuatan pupuk organik;
  - 2) teknik budidaya pertanian organik;
  - 3) penanganan panen dan pasca panen; dan
  - 4) pengolahan dan pemasaran hasil pertanian organik.

Selain pemberian reward berupa hibah dan insentif kepada petani, pemerintah kota dalam implementasi kebijakan pertanian organik juga menerapkan pasal sanksi. Sanksi dimaksudkan bagi petani maupun kelompok yang tidak turut serta melaksanakan pertanian organik di kawasan percontohan atau pengembangan yang telah ditunjuk. Pasal tentang sanksi yang dimaksud terdapat dalam Perwali Batu Tahun 2014 pasal 25 yang menyebutkan adanya penangguhan insentif/subsidi/hibah bagi Gapoktan/Poktan/Petani.

#### **5.1.1 Mekanisme Implementasi Kebijakan Organik Sebagai Upaya Transformasi Pertanian Di Kota Batu**

Kebijakan pertanian organik dengan sistem kawasan percontohan atau percobaan telah dimulai sejak tahun 2012 hingga sekarang. Terdapat lebih kurang 5 titik kawasan yang berlokasi di 5 desa yaitu Desa Pendem, Desa Tulungrejo,

Desa Torongrejo, Desa Sumberejo, dan Desa Sumberbrantas. Latar belakang digulirkannya kebijakan organik oleh pemerintah kota memiliki tujuan luhur, antara lain; *pertama*, untuk kepentingan peningkatan kawasan pariwisata sektor pertanian berdasarkan visi dan misi kota untuk menjadikan Kota Batu sebagai salah satu sentra produk organik. *Kedua*, untuk kepentingan menyelamatkan lingkungan sehingga dengan penerapan kebijakan ini penggunaan bahan kimia pertanian yang merusak ekosistem dapat dikurangi. *Ketiga*, untuk kepentingan kesehatan bagi konsumen karena dengan penerapan pertanian berkelanjutan seperti organik akan mampu menghasilkan produk yang sehat untuk dikonsumsi. Dan *keempat*, untuk kepentingan peningkatan pendapatan bagi petani dengan nilai jual produk organik yang dapat mencapai dua sampai tiga kali lipat dibanding produk pertanian konvensional.

“Latar belakang kebijakan tersebut digulirkan adalah untuk peningkatan kawasan pariwisata pada sektor pertanian karena sesuai dengan visi dan misi dari Pemerintah Kota Batu untuk menjadikan Kota Batu sebagai salah satu sentra produk organik. Itu pertama, kedua untuk menyelamatkan lingkungan dengan menerapkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Maksudnya penerapan kebijakan ini berkaitan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian yg merusak ekosistem. Ketiga, untuk menghasilkan produk yang sehat bagi konsumen, karena bagaimanapun masyarakat sekarang mulai memperhatikan kualitas dari apa yang mereka konsumsi. Terakhir adalah harga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dengan tingkat jual produk yang bisa 2 sampai 3 kali lipat dibanding pertanian konvensional.”(wawancara Bpk Ysf 27 Januari 2017)

Pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya menghendaki

tercapainya suatu keberhasilan yaitu kota batu menjadi sentra produk pertanian organik. Indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut nantinya dapat ditinjau dari konversi lahan yang telah mencapai 100% bebas kimiawi dan setiap petani kawasan telah mendapatkan sertifikat organik. Sehingga pada tahap pelaksanaan kebijakan ini menjadi sangat krusial sebagai penentu



keberhasilan pemerintah kota dalam upayanya mentransformasi petani konvensional menjadi petani organik.

Upaya implementasi kebijakan pertanian yang dilakukan pemerintah kota selain bertujuan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan juga sebagai usaha besar pemerintah kota dalam mengupayakan kesejahteraan para petani di batu. Tujuan mulia pemerintah kota didasari akan kenyataan bahwa kuantitas luas wilayah pertanian di kota batu yang sempit akan kalah bersaing dengan kota-kota lain dengan wilayah pertanian yang lebih luas. Sehingga upaya transformasi pertanian merupakan langkah pemerintah dalam memperbaiki kualitas produk pertanian kota batu untuk dapat memiliki nilai lebih dalam persaingan dengan kota lain yang lebih luas di Indonesia. Hasil dari transformasi ini lain tidak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani setempat melalui keunggulan kualitas produk pertaniannya.

Secara garis besar upaya yang dilakukan pemerintah kota batu pada tahap implementasi antara lain, pertama pembentukan tim pelaksana atau tim teknis yang terdiri dari pihak dinas pertanian dan praktisi pertanian dari perguruan tinggi terkait untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi. Kedua dengan menyiapkan sarana prasarana penunjang pertanian termasuk dana hibah. Serta ketiga bantuan sertifikasi organik. Masing-masing tahapan teknis implementasi akan dijelaskan lebih terperinci untuk menggambarkan ketersinambungan dalam pelaksanaannya di kawasan pertanian organik. Sehingga hubungan penyelenggara kebijakan dengan sasaran kebijakan dalam hal ini para petani kawasan tidak terputus tetapi sebagai sebuah rangkaian penyelenggaraan kebijakan yang saling berdialog dalam upaya transformasi pertanian di kawasan. Berikut penjelasan tahap-tahap teknis

implementasi yang telah disiapkan pemerintah kota batu melalui dinas pertanian dan kehutanan:

a. Pendampingan dan Sosialisasi

Pada fase sosialisasi dan pendampingan yang sebelumnya pemerintah kota melalui dinas pertanian dan kehutanan telah membentuk tim teknis atau pelaksana yang bertugas menjalankan implementasi di kawasan percontohan. Tujuan dibentuknya tim teknis adalah untuk mengenalkan dan membimbing petani konvensional di kawasan untuk dapat beralih menjadi pertanian organik. Hal ini mengingat pola pertanian organik masih menjadi barang baru bagi para petani setempat yang telah terbiasa menerapkan pertanian konvensional. Sehingga dengan dibentuknya tim teknis dapat menjadi panduan bagi para petani yang telah ditunjuk menjadi petani organik agar tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan peralihan pola pertanian.

“Iya kalo dulu ada itu tim teknis. Kalo sekarang itu datanya tidak ada, kan sekarang itu kita limpahkan ke unibraw dan tahun ini unmuh. Dan sama evaluasi untuk tahun ini kerjasama sama Unibraw.” (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)

“kita sebenarnya brawijaya kita libatkan,..” “timnya buanyak dulu, ada teknisnya yang dari brawijaya, dari unmuh, dinas juga saya termasuk. Lengkapnya data ada di dinas.”(Aan)

Proses pendampingan dan sosialisasi secara rutin telah disusun dan dijadwalkan oleh pihak dinas. Terdapat beberapa model pendampingan dan sosialisasi yang telah dirumuskan dinas, antara lain; menempatkan tenaga pendamping atau penyuluh di setiap desa yang disebut Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 1 sampai 2 orang dengan kegiatan sosialisasi rutin setiap satu bulan sekali, kemudian sosialisasi oleh tim teknis berdasarkan program organik dinas terdapat 4 kali dalam setahun. Selain itu

terdapat juga model pendampingan berupa pelatihan atau praktik lapangan melalui sekolah lapang.

“Iya dari dinas itu tiap desa kan ada penyuluh pertanian. Ada THL (tenaga harian lepas) juga dari pusat yang di, apa yang digaji dari pusat. Ada yg satu desa 2 orang, PPL dari dinas yang PNS, ada yang dari pusat THL itu. Itu yang memberi pendampingan selalu.” (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)

“Pertama yang rutin itu dilakukan oleh penyuluh. Penyuluh itu di setiap desa kan ada. Itu kan mereka ada pertemuan rutin tiap bulan pada kelompok. Pada waktu penyuluhan tiap bulan ini, atau kadang-kadang malah ga tiap bulan, kadang-kadang setiap hari kegiatan kan ke lapangan. Itu yang sosialisasi langsung. Tapi yang diprogram oleh dinas dari waktu itu ya hampir beberapa kali, 4 kali ada. Dan setiap kita lakukan itu, sosialisasi, pelatihan. Sosialisasi itu kan bersifat satu arah-satu arah. Tapi kalau pelatihan, kita ada praktik ke lapangan melalui sekolah lapang, kemudian *wis banyak wis mas,..*” (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)

Strategi pendampingan dalam upaya penyelenggara melakukan persuasi terhadap petani adalah dengan menerapkan pola konversi dari konvensional ke organik secara bertahap. Tahapan peralihan tersebut dimulai dengan mengurangi penggunaan kimia sebesar 25% selama satu musim, kemudian 50% ditahap berikutnya, tahap ketiga dengan pengurangan sebesar 75%, dan terakhir pengurangan penggunaan organik hingga lepas sama sekali. Sehingga proses konversi lahan benar-benar berubah menggunakan pola tanam organik murni.

“Pertama dulu memang berat kita untuk merubah mindset petani untuk beralih dari kimia menjadi organik itu memang berat. Karena apa, ekosistem kita ini kan sudah terlanjur terkontaminasi oleh kimia. Tapi dengan jalan kita mulai bertahap-tahap, kita kurangi. Awalnya memang kita kurangi dulu, tidak langsung lepas kimia tidak tapi bertahap. Yang pertama itu 25%, yg kedua 50% persen, 75% meningkat terus sampai lepas sama sekali.” (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)

b. Alokasi Hibah dan Bantuan Dana

Pada fase alokasi dana dan bantuan hibah berupa bibit dan pupuk dalam implementasi pertanian organik di kawasan sumberbrantas telah berdasar pada Surat Keputusan Walikota. Sebagaimana prosedur pengalokasian diberikan secara langsung kepada kelompok tani, gapoktan dan petani kawasan. Upaya pemberian

bantuan saprodi pertanian organik berupa bibit dan pupuk adalah strategi penyelenggara kebijakan untuk meyakinkan petani agar bersedia beralih dari konvensional ke organik.

“Bukan subsidi lagi, tapi hibah itu. Kita bantu semua saprodinya, pakai SK(Surat Keputusan) Wali Kota, langsung dikasihkan. Ada itu mulai tahun kemarin, ada bantuan modal usaha, sampai sekarang 10 juta perkelompok, gapoktan 25 juta, berbentuk uang itu selain tadi saprodi, tunai langsung masuk rekeningnya ketua kelompoknya. Itu kita caranya untuk meyakinkan petani itu kita bantu dengan saprodinya, bibit dan saprodi organiknya.” (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)

“ya dikasihkan gitu aja, gratis.” (Aan)

Pemberian bantuan saprodi dari pemerintah tersebut juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya produksi ketika beralih menggunakan pola tanam organik. Sebab proses peralihan atau konversi lahan dari konvensional ke organik tentu memiliki jangka waktu pemulihan kembali kualitas lahan garapan. Sehingga ketika proses peralihan menyebabkan produktivitas lahan menurun, para petani tidak mengalami kerugian karena telah dibantu dengan hibah saprodi.

“Jadi diharapkan, memang kalau pertama berubah langsung ke organik itu tahun pertama itu produktivitasnya memang menurun 50%.Tapi dengan kita bantu untuk saprodinya petani tidak akan rugi, karena mereka sudah, biaya produksinya berkurang, dia tinggal tenaga kan gitu.” (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)

c. Pemasaran dan Bantuan Sertifikasi

Berlangsungnya suatu implementasi kebijakan pertanian sudah seharusnya menyiapkan sarana-prasarana penunjang demi tercapainya keberhasilan dan keberlanjutan dari suatu program. Program kawasan organik selain perlu menyiapkan proses produksi juga perlu menyiapkan proses setelahnya yaitu pemasaran suatu produk hasil panen. Sehingga siklus dari awal tanam hingga ke tangan konsumen dapat terjalin dengan baik.

Pemerintah kota batu dalam upayanya menunjang implementasi pertanian organik telah menyiapkan pasar untuk produk hasil panen organik petani. Pasar



yang telah disiapkan berupa *Batu Kota Wisata Resource* milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu memasarkan produk organik. Selain itu, pihak Dinas akan memberikan bantuan rutin pemasaran yang rencananya akan diadakan di *Balai Amongtani Spot* Kota Batu sehingga petani memiliki izin berjualan. Berikut pernyataan informan terkait:

“Untuk pasar, kita ada BUMDnya kota batu yaitu batu kota wisata resource, itu yang untuk membantu pemasarannya produk organik. Kemudian untuk yang rutin, yang dibantu oleh dinas ya itu nanti tiap minggu rencana ada ini di Amongtani spot nanti, kita suruh izin berjualan itu.” (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)

“produknya kita bantu untuk pemasarannya.” (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)

## **5.2 Dinamika Implementasi Kebijakan Organik dan Permasalahannya Di Kawasan Percontohan Sumberbrantas**

Tahap pelaksanaan kebijakan pertanian organik pemerintah kota batu di kawasan percontohan Desa Sumberbrantas sejak 2012 telah melahirkan berbagai dinamika permasalahan. Dinamika permasalahan yang timbul dalam proses implementasi kebijakan tersebut antara lain bersumber dari pihak penyelenggara kebijakan yakni pemerintah kota, kelompok petani sasaran kebijakan program pertanian kawasan, dan pihak ketiga atau selanjutnya dikategorikan sebagai faktor eksternal. Ketiga kategori dinamika permasalahan tersebut merupakan penyumbang gagalnya upaya pemerintah kota Batu dalam mentransformasi pertanian kota menjadi sentra produk organik melalui kebijakannya.

Upaya pemerintah kota mensukseskan program pertanian kawasan dengan memberdayakan petani setempat yang sekaligus bertujuan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan serta demi mensejahterahkan petani ternyata tidak serta merta dapat diterima dan diterapkan begitu saja oleh petani. Penolakan yang



dilakukan petani tentu saja memiliki alasan tersendiri berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing petani yang beragam. Pemaparan selanjutnya akan mengupas kegagalan implementasi program dari ketiga kategori yang telah disebutkan sebelumnya sehingga terdapat timbal-balik keterkaitan sumbangsih antar elemen baik penyelenggara program, sasaran, maupun pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias sudut pandang yang hanya condong ke salah satu dari ketiga kategori tersebut. Berikut ketiga kategori dinamika permasalahan yang menyertai implementasi kebijakan pertanian organik di kawasan percontohan desa Sumberbrantas:

#### 5.2.1 Kategori dinamika permasalahan pada pihak penyelenggara

Dinamika permasalahan yang muncul dalam tataran pihak penyelenggara program dapat ditemui sudah sejak dari awal mula kebijakan organik dirancang hingga tahapan pelaksanaan. Tahap awal perencanaan kebijakan yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan lebih konkritnya telah meniadakan adanya unsur keterlibatan petani setempat. Salah satu wujud dari ketidakterlibatan sasaran program dalam tahap perencanaan adalah terkait penentuan plot atau lokasi kawasan pengembangan atau percontohan organik dengan hanya berdasar pada rekomendasi BAPPEDA. Penetapan plot lokasi kawasan pengembangan berdasar rekomendasi tersebut telah menghilangkan asas ragam kebutuhan petani dan kondisi geografisnya. Hal ini kemudian memunculkan polemik ketika program diterapkan pada para petani yang menempati titik plot lokasi kawasan percontohan yang telah ditentukan pemerintah salah satunya di Desa Sumberbrantas.

...waktu itu masih percobaan di 5 desa, sekarang sudah berkembang menjadi 14 desa. ... Kita menentukan plot percobaan tersebut berdasarkan rekomendasi dari BAPPEDA, jadi bukan tebang pilih asal jalan. (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)  
Kawasan Pertanian Desa Sumberbrantas yang menjadi lokus kajian

dalam penelitian ini merupakan salah satu dari 5 wilayah yang ditunjuk menjadi kawasan pertanian berkelanjutan yang dalam hal ini adalah kebijakan pertanian organik. Kawasan pertanian yang ada di Desa Sumberbrantas ditunjuk menjadi kawasan percontohan karena memiliki karakteristik wilayah yang cocok. Menurut pernyataan kepala praktisi organik dinas pertanian dan kehutanan Kota Batu dipilihnya Sumberbrantas karena alasan antara lain, ekosistemnya mendukung dan dekat dengan sumber air dan memungkinkan untuk meminimalisir adanya residu irigasi sehingga tidak memerlukan treatment tertentu. Berikut kutipan pernyataan beliau:

Awal kita untuk *launching* organik itu alasan di 5 wilayah. Di 5 wilayah ini ekosistemnya mendukung. Jadi kalo misalkan di Sumberbrantas itu kawasan yang kita kembangkan 10 ha itu dekat dengan sumber air. Walau pun nanti bukan dekat dengan sumber air kayak di desa Pendem. Nanti ada *treatment-treatment* sendiri untuk air ini... (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 14 Tahun 2012

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dijelaskan dalam pasal 5 bahwa, Pemerintah Daerah telah merencanakan perlindungan lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian pada kawasan pertanian beririgasi teknis dan lahan kering atau tadah hujan. Jenis kawasan yang dimaksud yaitu lahan marginal, tanah terlantar, dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Bentuk pelaksanaannya berupa sebuah kebijakan, strategi, program, dan evaluasi. Salah satu bentuk perlindungan lahan pertanian

berkelanjutan telah tercantum dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek serta termasuk dalam Dokumen Penataan Ruang Daerah antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RTDR Kota Batu. Beberapa wilayah atau kawasan yang termasuk Dalam RTRW meliputi:

**Tabel 9. Klasifikasi Kawasan Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah**

No.	JENIS KAWASAN	KELURAHAN/DESA
1	Tanaman Hortikultura (Apel, Jeruk, dan Sayuran)	Pandanrejo, Giripurno, Bumiaji, Songgokerto, Sumberejo, Punten, Gunungsari, Bulukerto, Sumbergondo, Tlekung, Oro-oro Ombo, Ngaglik, Pesanggrahan, Sumberbrantas dan Tulungrejo
2	Tanaman Hias/Bunga	Sidumulyo, Sumberejo, Temas, Pesanggrahan, Sisir, Pandanrejo dan Gunungsari.
3	Tanaman Pangan	Pendem, Torongrejo, Giripurno, Pandanrejo, Beji, Mojorejo, Junrejo, Dadaprejo, Sisir, dan Temas.

Sumber: Data olean pribadi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Tahun 2012

Argumentasi atau alasan yang menjadi landasan penentuan plot atau lokasi kawasan percontohan mengandaikan sisi penilaian yang hanya dimiliki oleh pihak penyelenggara saja. Kondisi ini menggambarkan apa yang disebut sebagai strategi *top-down* dalam konsep implementasi yang dalam hal ini pihak pemerintah sebagai penyelenggara merasa berhak dan harus memperbaiki kualitas masyarakat setempat. Susunan argumentasi atau alasan-alasan yang dimuat sebagai latar belakang penentuan lokasi kawasan lain tidak adalah cerminan kalkulasi pengetahuan pihak penyelenggara atas kondisi masyarakat sasaran untuk kemudian mewujudkan hak untuk mengatur. Kontrol terhadap petani sasaran dilakukan melalui seperangkat aturan dengan mendorong orang untuk mengatur diri mereka

sendiri sesuai dengan norma dan tujuan yang dianggap paling ideal oleh masyarakat.

Upaya penyelenggara kebijakan untuk merubah perilaku para petani konvensional untuk beralih menjadi petani organik akhirnya menjadi persoalan tersendiri. Berbagai permasalahan muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Salah satu yang menjadi wujud adalah kesiapan para petani dalam menerima sistem pertanian baru yang harus mereka terapkan sebagai pengganti sistem pertanian konvensional yang sudah mereka terapkan sejak dulu. Perbandingan sistem pertanian menjadi pertimbangan dan keraguan bagi para petani yang masih awam dengan pertanian organik. Sehingga proses peralihan sistem pertanian oleh petani masih berjalan setengah-setengah yakni dengan masih diterapkannya pertanian semi organik atau kombinasi dari pertanian konvensional dan organik.

Dinamika permasalahan penyelenggara selanjutnya yang muncul dalam kebijakan organik ini adalah pada fase sosialisasi dan pendampingan. Munculnya permasalahan pada tahap ini bersumber dari kelemahan sistem sosialisasi dan pendampingan yang dibuat oleh penyelenggara yaitu dengan pembentukan tim teknis (tim pelaksana kebijakan organik) dan penempatan petugas penyuluh lapang di tiap desa. Pembentukan tim teknis yang seharusnya menjadi alat strategis dalam mensukseskan implementasi kebijakan organik dan sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah dan petani sebaliknya telah menjadi boomerang. Sisi negatif dari adanya tim teknis implelementasi kebijakan

ini adalah sistem pelimpahan wewenang yang dilimpahkan kepada pihak di luar pemerintah yaitu tenaga ahli dari universitas-universitas terkait pertanian. Meskipun tidak semua komponen tim teknis berisi pihak dari universitas tetapi hal ini memicu dinamika pada saat pengimplementasian proses sosialisasi dan pendampingan di kawasan.

Rumusan pendampingan dan sosialisasi yang telah dirancang sebelumnya sedemikian rupa oleh dinas tidak berjalan dengan maksimal. Beberapa permasalahan muncul pada ranah praktiknya, seperti tim teknis yang dibentuk penyelenggara hanya melakukan sosialisasi tanpa melakukan pendampingan di lapangan sehingga petani mengalami kebingungan. Petani kawasan merasa bahwa tim teknis yang terbentuk hanya sebatas tim tanpa adanya tugas dan fungsi yang seharusnya mendampingi.

“kalo pendampingan itu apa ya, dibentuk tim pendampingan. Istilahnya yo gak ada pendampingan, oh iki kudu ngene-ngene gak ada. Yo istilahnya penyuluhan gitu aja, nanti itu tetep aja istilahnya apa ya pengawasan tetep pengurus-pengurus kelompok organik, yo juga repot juga. Kan kita juga sama-sama sibuknya. Istilahnya dilematis.”(Prw)

“Jadi selama ini pendampingan dibrukne ndek penyuluh.” “... Meskipun timnya banyak tapi kan gini, mereka cuma sebatas tim gitu loh.” “... Mereka cuma sebatas sosialisasi, ngomong ya dosen kan tahu sendiri gini-gini-gini, selanjutnya selesai mereka, uangnya masuk mereka hehe, selesai, evaluasi terus. Evaluasi ditoto wisan, asal bapak senang.” (Aan)

Strategi implementasi melalui sosialisasi dan pendampingan yang seharusnya mampu menjadi alat transformasi petani sasaran sebaliknya meninggalkan keraguan dan rasa pesimistis para petani. Keraguan dan pesimistis petani disebabkan ketidakkonsistenan dari sistem sosialisasi dan pendampingan dari pihak penyelenggara sehingga upaya mentransformasi



nilai-nilai pertanian organik tidak maksimal tersalurkan. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan yang ada kadarnya berujung pada ketidakpahaman petani terkait pola tanam organik sehingga ketika petani melaksanakan penanaman dengan pola organik mengalami kegagalan.

Lebih lanjut, meskipun sebagian anggota tim teknis terdiri dari dosen Perguruan Tinggi tertentu yang mampu memberikan gambaran yang gamblang terkait bagaimana menerapkan pertanian organik dalam sosialisasi. Tetapi yang lebih dibutuhkan oleh petani kawasan adalah praktiknya di lapangan, karena bagaimanapun pertanian organik yang berhasil diwujudkan di luar daerah akan jauh berbeda dengan karakteristik kawasan percontohan yang ada di Kota Batu terlebih Sumberbrantas. Sehingga kendala utamanya pada tahap ini adalah panduan pendampingan agar petani dapat menyikapi dengan jelas terkait bagaimana menerapkan pertanian organik.

“Walaupun toh sekarang dosen, entah itu dosen unmu, ub, dan sebagainya ngomong gampang-gampang, toh kenyataan itu berbeda. Ini ada namanya prof indhar dari unmu ngomong “pertanian organik itu mudah”, prakteknya dimana? Kita bingung. Katanya di banyuwangi ada, tetapi spesifik lokal itu tidak bisa disamakan gitu loh, contohnya gini, pertanian di Banyuwangi akan berbeda dengan pertanian di Batu, apa yang diterapkan di batu juga belum tentu dapat diterapkan di Banyuwangi dan sebaliknya, seperti itulah kendalanya. Katakanlah orang ngomong mudah-mudah-mudah, dikala ok mudah, tapi saat praktek lapangan belum tentu.” (Aan)

Selain itu mekanisme sosialisasi yang selama ini diterapkan oleh tim pelaksana tidak mampu mengedukasi dengan baik para petani sasaran. Tim yang terbentuk cenderung hanya melakukan sosialisasi asal-asalan dan selanjutnya semua pekerjaan dilimpahkan pada petugas penyuluh desa. Hal ini mengakibatkan kurang intensifnya proses pendampingan dan

sosialisasi mengingat kurangnya tenaga ahli di lapangan. Meskipun sebenarnya tim yang terbentuk merupakan gabungan dari beberapa praktisi pertanian yang seharusnya berkemampuan untuk mendampingi dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Petugas Penyuluh desa sebagai berikut:

Mereka bergerak cuma sebatas sosialisasi setelah itu evaluasi, terus lapangannya gimana. Mosok dibrukno karo penyuluh kan gak mungkin toh. Itu visi-misi kota e, tapi kenyataannya tim gak jalan gitu loh permasalahannya. timnya buanyak dulu, ada teknisinya yang dari brawijaya, dari unmuh, dinas juga saya termasuk. Lengkapnya data ada di dinas. ...Jadi selama ini pendampingan dibrukne ndek penyuluh. Walaupun toh endingnya jadi, itu hasilnya penyuluh bukan dari tim. Meskipun timnya banyak tapi kan gini, mereka cuma sebatas tim gitu loh. Turun ning lapang, kon dampingi ae, permasalahannya seperti apa bingung mesti. Mereka cuma sebatas sosialisasi, ngomong ya dosen kan tahu sendiri gini-gini-gini, selanjutnya selesai mereka, uangnya masuk mereka hehe, selesai, evaluasi terus. Evaluasi ditoto wisan, asal bapak senang. Jadi permasalahannya kompleks, akhirnya mbalek di penyuluh, yok opo sih kita seng bendino ketemu ya, yowis. (Aan)

Gejala yang timbul pada proses sosialisasi dan pendampingan tersebut merupakan gambaran dari lemahnya upaya kontrol petani kawasan yang disebabkan oleh kesalahan pihak penyelenggara sendiri. Tim teknis yang seharusnya menjadi gambaran kepanjangan tangan dari pemerintah tidak terlalu menjadi mesin panoptic dalam mengawasi petani sasaran kebijakan. Lemahnya alat kontrol penyelenggara kebijakan telah memberi ruangpara petani untuk tidak terlalu merasa perlu menerapkan pertanian organik.

Jika ditelisik lebih jauh upaya kontrol populasi dalam implementasi di atas tidak mencerminkan kuatnya pihak penyelenggara implementasi dan terdapat ketidakeektian penggunaan model *top-down*. Artinya, negara

mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan menginternalisasikan penundukan supaya menjadi populasi yang patuh. Sebagai bentuk kepanjangan tangan pemerintah, upaya implementasi pihak penyelenggara tidak lain dapat juga dipandang sebagai suatu cara yang *legitimate* dan benar dalam mengatur sesuatu, yakni populasi dan sumber daya.

Penempatan petugas penyuluh dalam hal ini juga telah menambah sisi negatif dari pihak penyelenggara dalam upaya mentransformasi petani kawasan menjadi petani organik. Sebagaimana disebutkan dalam Perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tahun 2012 dalam pasal 51 tentang penyuluhan dan pendampingan yang menempatkan petugas sejumlah 1-2 orang di setiap desa. Petugas Penyuluh Lapang dengan jumlah tersebut bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang merupakan mayoritas petani tentunya tidak akan efektif dalam proses pendampingan maupun pengawasan. Kekurangan tenaga penyuluh menyebabkan proses sosialisasi dan pendampingan diluar tim teknis kebijakan juga menyumbang tidak maksimalnya mekanisme kontrol dalam upaya implementasi kebijakan.

“Pertama yang rutin itu dilakukan oleh penyuluh. Penyuluh itu di setiap desa kan ada. Itu kan mereka ada pertemuan rutin tiap bulan pada kelompok. Pada waktu penyuluhan tiap bulan ini, atau kadang-kadang malah ga tiap bulan, kadang-kadang setiap hari kegiatan kan ke lapangan. Itu yang sosialisasi langsung. Tapi yang diprogram oleh dinas dari waktu itu ya hampir beberapa kali, 4 kali ada. Dan setiap kita lakukan itu, sosialisasi, pelatihan. Sosialisasi itu kan bersifat satu arah-satu arah. Tapi kalau pelatihan, kita ada praktik ke lapangan melalui sekolah lapang, kemudian wis banyak wis mas,..” (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)

Skala intensitas sosialisasi program yang demikian adanya telah menyebabkan tujuan pemberdayaan menjadi tidak konsisten. Upaya

edukasi pada para petani demi tercapainya keberhasilan program organik menjadi tidak sepenuhnya tersalurkan dan dapat dipahami dengan baik. Hal ini berdampak pada keraguan petani untuk menerapkan pola tanam organik secara langsung sehingga terbatasnya pengetahuan dan cara pengaplikasian pola tanam organik dijadikan alasan para petani untuk membangkang. Alasan para petani hingga saat ini belum mampu menerapkan program secara penuh salah satunya mengingat intensitas sosialisasi dan proses pendampingan yang kurang memadai tersebut.

Berdasarkan keterangan dari petugas penyuluh lapang telah terdapat jadwal rutin sosialisasi dan pendampingan baik dari tim teknis maupun dari penyuluh. Agenda rutin tim teknis lebih kurang terdapat 2 sampai 3 kali pertemuan dalam setahun sedangkan dari tim penyuluh yang ditempatkan di tiap kawasan terjadwal 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Memang jika melihat intensitas pertemuan dari kedua tim pendampingan tersebut telah memadai untuk mendedukasi program pemberdayaan bagi petani kawasan mengingat jumlah petani yang termasuk dalam kawasan percontohan organik terbilang sedikit. Namun yang terjadi di lapangan ketika sosialisasi berlangsung tidak semua petugas pendamping memahami permasalahan pertanian di kawasan seperti ungkapan dari Mas Aan:

“Jadi selama ini pendampingan dibrukne ndek penyuluh.” “... Meskipun timnya banyak tapi kan gini, mereka cuma sebatas tim gitu loh.” “... Mereka cuma sebatas sosialisasi, ngomong ya dosen kan tahu sendiri gini-gini-gini, selanjutnya selesai mereka, uangnya masuk mereka hehe, selesai, evaluasi terus. Evaluasi ditoto wisan, asal bapak senang.” (Aan)

“Mereka bergerak cuma sebatas sosialisasi setelah itu evaluasi, terus lapangannya gimana. Mosok dibrukno karo penyuluh kan gak

“mungkin toh. Itu visi-misi kota e, tapi kenyataannya tim gak jalan gitu loh permasalahannya.” (Aan)

Jumlah kehadiran petani peserta sosialisasi pun terbilang hanya sebagian dari jumlah petani sasaran program pemberdayaan yang seharusnya turut serta. Beberapa petani yang hadir juga merupakan anggota inti dari kelompok tani yang bersangkutan dengan program sedangkan sisanya adalah petani yang tidak termasuk anggota inti kelompok. Berdasarkan keterangan penyuluh, ketidakhadiran para petani lebih disebabkan karena waktu sosialisasi yang berbenturan dengan kegiatan mereka di lahan. Beberapa sosialisasi yang pernah diadakan sebelumnya juga mendapati masalah yang sama terkait waktu yang berbenturan sehingga peserta yang hadir sering berganti-ganti. Hal ini menyebabkan target sosialisasi sering terputus dalam memahamkan petani program secara berkala. Kendala ini bagi tim penyuluh menjadi tantangan dalam upaya mereka memberdayakan para petani karena sulitnya membangun kedekatan hubungan tersebut.

Permasalahan lain yang ditemukan ketika sosialisasi berlangsung adalah kendala Bahasa antara pemateri dan petani peserta. Kendala Bahasa yang ditemui adalah banyaknya istilah-istilah pertanian yang tidak dapat dipahami oleh petani. Perbedaan istilah-istilah tersebut berhubungan dengan penamaan baik itu jenis tanaman, penyakit dan obat yang berbeda antara pemateri dan petani. Kesulitan-kesulitan dalam proses sosialisasi tersebut menambah alasan gagalnya upaya pemberdayaan petani setempat. Upaya pemahaman pola tanam organik yang tidak berkesinambungan



itulah yang sering dijadikan alasan petani untuk tidak menerapkan pola tanam organik seperti yang diinginkan para pendamping.

Upaya implementasi pertanian organik dalam bungkus pemberdayaan petani kawasan akhirnya mengalami kemandegan dalam tahan sosialisasi yang bermasalah. Munculnya permasalahan yang ada dapat dilihat sebagai ketidaksiapan dari pihak penyelenggara yang tidak mempertimbangkan kondisi dan situasi para petani sasaran secara penuh. Hal ini terlihat dari proses sosialisasi yang serba tidak bersambung antara wacana organik yang diusung penyelenggara kurang dapat ditransfer sekaligus dipahami oleh petani. Sebaliknya kebingungan cenderung dialami oleh petani kawasan yang hingga saat ini tidak dapat menerapkannya.

Dinamika permasalahan pihak penyelenggara selanjutnya adalah permasalahan alokasi hibah dan saprodi organik. Proses pengalokasian hibah saprodi yang terjadi di kawasan percontohan tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah direncanakan pihak penyelenggara. Berbagai permasalahan timbul dalam proses pengalokasian bantuan tersebut. Dinamika permasalahan yang muncul antara lain, tidak cukupnya bantuan saprodi pada petani kawasan. Berikut pernyataan informan:

“...dan saprodinya itu kalo dihitung-hitung itu tidak cukup.” “..Itu tidak sesuai dengan luasannya loh. Dengan luasan segitu, dinas cuma mengcover berapa, akhirnya yo ga cukup gitu loh. Jadi gak sebanding,(Aan)

“...dan istilahnya waktu itu bantuannya hanya sedikit, tidak banyak. Tidak sampe separohnya. Waktu itu bantuannya hanya dapet 2 ton benih, *niku kangge* kawasan 10 hektar niku wau. 2 ton itu mungkin hanya buat 1 hektar kurang itu, paling ya kisaran luasan 7000meter persegi.”(Prw)

“ya malah berkurang, terus berkurang (bantuan dari tahun ke tahun).” (Prw)

Jangka waktu pemberian bantuan juga hanya dalam 1 kali musim

tanam pertahunnya sejak dimulainya pertanian kawasan. Sedangkan para petani tidak mudah untuk mendapatkan saprodi organik karena tidak semua toko setempat menjual barang kebutuhan organik. Sehingga para petani dan kelompok mengalami krisis saprodi ketika proses peralihan pola tanam dari konvensional ke organik. Berikut pernyataan informan:

“kita itu dikasihnya 1 tahun hanya sekali,..”(Prw)

“...dan bantuan dari dinas itu cuma untuk 1 kali musim tanam, selanjutnya mereka suruh nyari sendiri. Sedangkan waktu itu masa transisi jadi mereka yo bingung tah. Akhirnya mereka mbalek lagi (konvensional).” (Aan)

“...ditambah itu cuma 1 kali musim tanam tok. Itulah yang menjadi dinamikanya, akhirnya mereka gagal panen, mereka minta kompensasi dinas, mbulet ae wis rame akhirnya.” (Aan)

Selain pemberian subsidi yang kurang dan hanya satu kali dalam setahun, masih terdapat dinamika lain yang dihadapi petani kawasan yaitu waktu datangnya bantuan tidak pasti dan kualitas atau mutu dari hibah bibit tersebut. Berdasarkan pengalaman petani bantuan bibit yang diberikan kualitasnya kurang terjamin dan banyak yang busuk. Sehingga para petani hanya memakai sisa bibit yang masih bagus dan menambal kekurangannya dengan membeli ke penangkar bibit tanaman setempat. Hal ini dikarenakan jika harus menunggu bibit bantuan dinas datang atau mengajukan komplain kualitas bibit untuk diganti akan memakan waktu tanam karena harus menunggu. Sedangkan tanah garap sudah siap untuk ditanami lagi. Berikut pernyataan informan terkait:

“...kadang apa ya, bantuan itu datangnya dadakan gitu loh. Setelah datang masih dilakukan pengecekan pengawasan terlebih dahulu, nah kita kan petani selak kesusu nandur. Wis olehe mek

sak mono, dibagi yo gak roto. Yowis akhire kene golek dewe ning penangkar-penangkar.”(Prw)

“...istilahnya apa ya, kita kemarin dapat bantuan benih kentang gitu. Kentang itu ditandurkan gitu, kita bener dapat benih sertifikat tapi mutunya kurang bagus. Beda kalo kita mengusahakan sendiri meskipun tidak sertifikat tapi kita tahu oh ini bibit bagus ini tidak. Bibit bantuan ya tetap dipake, tapi ya rata-rata gagal. Akhirnya yang dipake ya yang masih bagus itu kita tanem lagi gitu, banyak yang busuk rata-rata yang bibit bantuan itu. (Prw)

Permasalahan dalam tahap pengalokasian bantuan saprodi organik

menjadi alasan bagi petani untuk kembali menanam dengan pola konvensional seperti semula. Kesulitan yang dialami petani dalam mendapatkan saprodi organik diluar bantuan dari pemerintah juga menjadi beban mengingat tidak mudah untuk mendapatkannya. Sedangkan sistem maupun prosedur pengalokasian bantuan belum maksimal dirasakan meskipun implementasi kebijakan telah berlangsung lama.

Dinamika permasalahan terakhir yang dapat ditemukan adalah perihal pemasaran dan sertifikasi produk organik. Penjelasan pihak dinas terkait kesiapan pasar dengan rumusan sarana dan prasarana penunjang pada sub bab sebelumnya berbanding terbalik dengan pernyataan petani kawasan maupun petugas pendamping. Menurut para petani bantuan pemasaran yang harusnya mereka dapat akses ternyata belum pernah dirasakan dari awal hadirnya program kawasan organik hingga sekarang. Ketidakpastian jaminan pemasaran pada akhirnya mengharuskan mereka menjual produk hasil panen ke tengkulak. Sehingga meskipun produk hasil panen mereka menggunakan pola tanam organik, akan tetap dihargai sama dengan yang konvensional. Berikut pernyataan informan Prw:

“Belum ada. Dari awal dulu belum ada. Makanya kita itu ragu-ragu,... Kita gagal itu karena pasarnya belum jelas.” (Prw)

“...ya ke pemborong, tengkulak sini. Contohnya kemarin lobak itu kita jual ke pasar, pasar bawah.” (Prw)

“Istilahnya dinas itu ya cuma ngomong nanti saya jualkan, nanti saya bantu saya bawaan pengusaha yang bisa menyerap. Ya mek istilahnya sekedar ngomong. Ya kan dilematis kita... Lah kalo pasarnya belum jelas, ya kita rugi total wis. Makanya sampe sekarang kita belum berani ya itu.” (Prw)

Keluhan tentang pemasaran produk pertanian juga disampaikan

oleh petugas penyuluh pertanian setempat. Ketidakefektifan pihak dinas dalam menyediakan jaringan pasar yang mampu menampung hasil panen petani kawasan membuat mereka bingung harus menjual kemana. Pasar organik yang belum tertata tersebut mengharuskan petani yang telah melakukan konversi menjual produknya ke tengkulak karena pasarnya belum jelas. Berikut pernyataan Aan:

“itu tahun-tahun awal 2011, 2013, dan seterusnya pun seperti itu terulang.” (Aan)

“Sampai detik ini pun pemasaran masih belum efektif. Sekarang kita punya produk organik belum panen ini, pure organik itu, kita sudah melalui proses konversi, itu mereka bingung menjualnya. Jadi permasalahan di bawah itu tidak ada pasar, belum tertata.” (Aan)

“Sekarang produk-produk organik saya itu dijual ke tengkulak dengan konvensional. ...Kalo pasar belum siap mau gimana? Barang sudah ada.” (Aan)

Permasalahan pasar yang belum tertata dan tersedia bagi petani

menjadikan petani lebih memilih menanam dengan konvensional. Pilihan yang diambil petani tersebut juga berasal, didukung dengan belum adanya sertifikat organik dari produk yang mereka hasilkan. Hal ini mengingat untuk mendapatkan sertifikat organik para petani diharuskan untuk melengkapi persyaratan baik itu administratif maupun standar-standar lain oleh lembaga terkait di Bidang Sertifikasi Organik. Berikut pernyataan informan Bapak YSF:



“...Sertifikasi organik itu bukan hanya proses produksinya di lahan saja, tapi juga meliputi proses administrasi, antara lain yaitu pencatatan, kemudian status tanahnya, luas tanahnya, sejarah lahan, ada general sistem CSnya, banyak sekali. Itu harus lengkap, itu wah dokumennya tebal itu. Kemarin yang 4 itu aja petani ga mampu, kita bantu dari tim di lapangan. Ada BPL (badan penyuluh lapang) dan staf kita dari dinas itu membantu untuk administrasinya itu tadi. Karena walaupun dia sudah bilang organik sampai ada bukti labnya, tetapi kalau catatan administrasi tadi tidak dipenuhi, itu juga tidak lolos. Karena administrasi tadi itu malah penilaian yang hampir 100% oleh LSOS (lembaga sertifikasi organik selolima), kurang lebih lembaganya ada 8 di Indonesia itu. Jadi LSO yang telah diakreditasi oleh KAN Kementerian Pertanian. Jadi pembagian region yang berhak melakukan sertifikasi. (wawancara Bpk Ysf 27 januari 2017)

Meskipun terdapat bantuan dari dinas untuk melakukan sertifikasi organik tetapi petani masih mengalami keraguan jika beralih ke organik penuh. Hal ini mengingat jaminan adanya pasar yang bersedia menyerap hasil panen dengan jumlah besar hingga saat ini belum ada. Berdasarkan keterangan petugas pendamping bahwa pasar organik yang ada saat ini hanya mampu menyerap atau meminta hasil organik dengan skala kecil dengan ritme mingguan. Sedangkan kebiasaan para petani setempat adalah melakukan pola tanam dengan sistem hamparan lahan yang luas. Berikut kutipan pernyataan Aan:

“Wiih kita punya pasar gini-gini-gini di sini ada di sana ada, oke kita layani. Sekarang saya punya wortel itu kalo panen 1 samapi 2 ton, siapa yang mau menyerap segitu? Wong saya telusuri pasarnya, permintaan 1 minggu itu 30-50 kilo, Itu permintaan dengan jenis tanaman yang berbeda. pusing gak? Sedangkan petani itu tidak mau ribet di situ, buat nata lahan itu. Petani kebiasaan hamparan, langsung ngeloss.” (Aan)

#### 5.2.2 Kategori dinamika permasalahan implementasi pada kelompok (&) petani kawasan



Polemik dalam implementasi program kawasan percontohan di Sumberbrantas pada ranah kelompok dan petani tentunya memiliki bagian tersendiri sebagai bagian dari penyebab kegagalan program. Sebagai berikut:

a. Perbedaan Masa Tanam (waktu awal tanam)

Setiap petani memiliki pertimbangan yang beragam dalam menentukan waktu awal tanam di lahan garapan mereka. Sebagian dari petani kawasan masih menggunakan kalender jawa dalam menentukan hari pertama memulai proses menggarap lahan. Sebagian yang lain berpaku pada cuaca yang sedang berlangsung di wilayah mereka. Terdapat juga petani yang menentukan awal tanam berdasarkan hitungan perkiraan panen agar mendapatkan harga yang mahal karena permintaan pasar pada bulan-bulan tertentu. Beragamnya perbedaan penentuan masa awal tanam para petani di kawasan percontohan tentu memberikan dampak terhadap implementasi kebijakan organik yang sedang berlangsung. Salah satu bentuk dampak yang langsung bersinggungan dengan hal tersebut adalah kebutuhan saprodi pertanian organik yang tentu akan mempengaruhi mekanisme sistem alokasi. Adanya kebutuhan alokasi yang beragam tersebut hingga kini belum dapat diformulakan ulang oleh pemerintah kota sebagai penyelenggara kebijakan program.

ya istilahnya gak pasti. Soalnya apa ya, disini tidak terpengaruh musim. Jadi istilahnya kita bisa mrediksi oh kalo bulan ini panennya sing apik harganya ini. Jadi kita tidak terpancang dengan bulan tahun ini harus nanem ini dibulan tertentu, tapi berubah berubah. Kita nanemnya disini macem-macem. Kita termasuk disini lahannya sedikit kisaran 350hektar, terus pemilik lahannya kan juga orang banyak, ya istilahnya yang luas hanya orang-orang tertentu, itu kita nanamnya macem-macem. (Prw)

b. Perbedaan Varietas Tanam Antar Petani Yang Minim

Selain perbedaan penentuan masa awal tanam diantara petani di Kawasan Percontohan juga terdapat permasalahan minimnya perbedaan varietas tanam di setiap musim. Minimnya perbedaan jenis varietas tanam biasanya dipengaruhi oleh cuaca pada saat awal tanam, pemenuhan kebutuhan komoditas yang sedang diminati pasar atau yang harga jualnya tinggi ketika masuk waktu panen. Menurut pernyataan dari Petugas Penyuluh para petani di kawasan percontohan Sumberbrantas memiliki kebiasaan tanam dengan sistem “gebyah uyah” atau perilaku menanam yang serentak. Sistem gebyah uyah disini dimaksudkan ketika sebagian petani menanam 1 jenis tanaman maka petani yang lain akan mengikuti semuanya. Berikut pernyataan dari penyuluh:

“Wiih kita punya pasar gini-gini-gini di sini ada di sana ada, oke kita layani. Sekarang saya punya wortel itu kalo panen 1 samapi 2 ton, siapa yang mau menyerap segitu? Wong saya telusuri pasarnya, permintaan 1 minggu itu 30-50 kilo, Itu permintaan dengan jenis tanaman yang berbeda. pusing gak? Sedangkan petani itu tidak mau ribet di situ, buat nata lahan itu. Petani kebiasaan hamparan, langsung loss. (Aan)

Perbedaan varietas tanam yang minim diantara petani satu kawasan diatas berimbas pada permasalahan pemasaran yang akhirnya bertumpuk pada saat panen dengan satu jenis produk yang jumlahnya sangat besar. Jumlah panen yang begitu besar dalam satu kurun waktu ini menyulitkan pihak penyelenggara untuk membantu proses pemasaran. Pihak penyelenggara mengaku kesulitan untuk menemukan pembeli yang mampu menampung jumlah produk yang sebegitu banyak dalam satu waktu. Para pembeli baik itu perusahaan atau swalayan cenderung membeli dari produsen dengan sistem kuota perhari atau perminggu

dengan besaran terbatas tetapi kontinu sedangkan para petani kawasan yang menggunakan sistem gebyah uyah tidak cocok dengan sistem permintaan yang sedikit-sedikit dan berkala tersebut.

Wiih kita punya pasar gini-gini-gini di sini ada di sana ada, oke kita layani. Sekarang saya punya wortel itu kalo panen 1 samapi 2 ton, siapa yang mau menyerap segitu? Wong saya telusuri pasarnya, permintaan 1 minggu itu 30-50 kilo, Itu permintaan dengan jenis tanaman yang berbeda. pusing gak? Sedangkan petani itu tidak mau ribet di situ, buat nata lahan itu. Petani kebiasaan hamparan, langsung loss. Sekarang produk-produk organik saya itu dijual ke tengkulak dengan konvensional. (Aan)

Proses pemasaran yang tidak menentu hingga saat ini mengharuskan para petani kawasan menjual produknya kepada tengkulak setempat atau pemborong dari luar daerah tersebut. Produk yang dijual ke pemborong tidak memerlukan kuota tetapi menggunakan sistem tebas sekali panen dengan harga satuan menurut pemborong. Penentuan satuan harga oleh pemborong menghilangkan unsur pola tanam para petani meskipun telah menggunakan pupuk subsidi organik sehingga harga yang diperoleh petani kawasanpun sama dengan petani konvensional diluar kawasan organik. Hal ini juga dijadikan alasan oleh para petani kawasan percontohan untuk tidak meneruskan atau mengikuti program pertanian organik seperti yang telah disosialisasikan oleh para petugas.

#### c. Tidak Sinambungnya Sosialisasi dan Praktik Lapang

Implementasi program pertanian organik di kawasan percontohan pada tahap sosialisasi dan turun lapang kendala utamanya adalah tidak sinambung materi sosialisasi dengan pendampingan di lapangan yaitu ketika diterapkan. Materi sosialisasi yang disampaikan pada saat pertemuan oleh tim pelaksana sebagian besar membingungkan para petani

peserta program dikarenakan bahasa yang digunakan oleh pemateri masih terlalu ilmiah. Kebingunan yang sering dialami lebih cenderung pada pengistilahan jenis-jenis penerapan yang berbeda dengan pengistilahan yang biasa diterapkan oleh petani setempat sehingga ketika diterapkan dilapangan akan berbeda.

Permasalahan yang muncul selain karena pemateri yang berasal dari kalangan akademisi atau praktisi organik adalah karena setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak semua petani peserta program percontohan turut hadir sedangkan mekanisme sosialisasi yang disiapkan oleh pihak penyelenggara adalah bertahap. Hal ini berakibat pada sebagian petani peserta tidak mengikuti tahapan sosialisasi yang berkala materinya sehingga materi organik yang diperoleh pun tidak lengkap. Konsekuensinya adalah ketika memasuki tahap praktik lapang tidak semua petani paham dengan urutan-urutan dari penerapan pola tanam organik. ketidaksinambungan inilah yang kemudian implementasi pola tanam organik di kawasan percontohan berjalan setengah-setengah yang kemudian oleh petani setempat dikatakan sebagai “semi organik”.

### 5.2.3 Kondisi Eksternal Penyumbang Gagalnya Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Kawasan Percontohan

Pokok permasalahan dalam proses penyelenggaraan kebijakan pertanian organik tidak hanya berasal dari pihak pemerintah kota dan pihak sasaran kebijakan yakni petani kawasan percontohan khususnya di Sumberbrantas saja. Pihak lain yang turut menyumbang kegagalan implementasi kebijakan organik terdapat juga dari pihak luar atau

eksternal seperti adanya pelimpahan kerja pada pihak luar berupa tim ahli dari universitas yang dikontrak untuk menjadi tim pelaksana, dan dilibatkannya kontraktor dengan sistem tender untuk menyediakan saprodi organik meskipun telah terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pasar lokal maupun nasional yang belum terjangkau untuk diakses.

Kondisi eksternal tersebut merupakan representasi dari pihak ketiga yang seharusnya berada di luar penyelenggara. Keterlibatan pihak kontraktor dengan sistem tender misalnya, telah menunda distribusi saprodi yang seharusnya dapat dibagikan tepat waktu kepada para petani percontohan. Keterlambatan distribusi mengharuskan para petani untuk menunda waktu tanam atau membeli saprodi dari penjual setempat dengan uang pribadi. Petani akhirnya mengalami kerugian materiil berupa tambahan modal untuk saprodi, biaya sewa lahan, dan obat untuk menanggulangi kendala cuaca jika menunda waktu tanamnya.

Faktor eksternal lain atau keterlibatan pihak ketiga yang turut menyumbang gagalnya implementasi program organik yaitu tenaga ahli dari kampus yang bertugas sebagai Tim Pelaksana namun tidak maksimal dalam bekerja. Tenaga ahli dari kampus berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Pertanian adalah tim ahli dari Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang masing-masing bergantian setiap tahunnya. Imbas dari tidak maksimalnya kinerja tim ahli tersebut menjadikan para petani percontohan mengalami kebingungan dan kebuntuan dalam menerapkan pola pertanian organik. Kebuntuan petani ditengarai dari kurang intensnya proses pendampingan oleh tim ahli



sehingga forum konsultasi organik bagi para petani tidak tertampung. Ketidapahaman petani secara konsep dan praktik menyebabkan mandegnya penerapan pola pertanian organik di kawasan percontohan. Hal ini mengingat pertimbangan petani yang takut merugi perihal modal bercocok tanam yang besar namun belum sepenuhnya memahami teknik penerapan organik.

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Batu juga perlu mendapat sorotan perihal peran sertanya yang tidak maksimal dalam menyediakan saprodi organik dan penyediaan pasar untuk menampung hasil panen para petani kawasan. Meskipun data wawancara menunjukkan bahwa BUMD kota telah menyediakan saprodi dan menyiapkan pasar namun kenyataannya berkebalikan dengan data yang dipaparkan oleh tim penyuluh dan petani kawasan. Para petani mengklaim bahwa selama perjalanan implementasi program pihak pemerintah belum mampu menyalurkan saprodi secara proporsional dan tepat waktu serta dengan kualitas yang baik. Selama proses penerapan dari awal hingga 2017 ini ketersediaan pasar yang mampu menampung hasil panen petani kawasanpun belum dijumpai sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi para petani untuk tidak menerapkan pola tanam organik selama pasar belum tersedia.

### **5.3 Dimensi Permasalahan yang Timbul Pasca Implementasi Kebijakan Organik Di Kawasan Percontohan Desa Sumberbrantas**

Penerapan implementasi pertanian organik yang mengalami kegagalan telah menimbulkan beberapa permasalahan sosial dan ekonomi bagi para petani di kawasan percontohan Desa Sumberbrantas. Permasalahan sosial dan ekonomi yang lahir sebagai dampak gagal penerapan kebijakan, antara lain permasalahan ekonomi dapat ditengarai pada beban dan kerugian materiil para petani, antara lain berupa biaya produksi, gagal panen, beban waktu dan tenaga, serta kesulitan mendapatkan kepastian pasar. Permasalahan sosial ditemukan dari adanya perselisihan kepentingan yang berujung pada berjaraknya antar petani, kelompok dan pihak penyelenggara, adanya persinggungan dalam alokasi hibah dan bantuan subsidi, serta keluar-masuknya anggota kelompok terkait ketidakjelasan program organik yang sedang dijalankan. Penjelasan dimensi sosial dan ekonomi sebagai dampak pasca penyelenggaraan kebijakan organik akan dijelaskan secara terpisah dalam sub-sub bab sebagai berikut.

#### **5.3.1 Dimensi Permasalahan Ekonomi**

Dimensi ekonomi sebagai bias dari gagal penyelenggaraan kebijakan organik tidak dapat dipungkiri telah merubah kondisi petani. Percepatan pelaksanaan program organik secara langsung telah memaksa para petani untuk berubah dan menyesuaikan pola tanam baru. Perubahan yang spontan dialami para petani percontohan mengharuskan mereka untuk patuh dan merelakan lahan garapannya menjadi bidang percontohan organik. Beralihnya fungsi lahan dengan sistem konversi mengakibatkan keuntungan materiil petani berkurang drastis. Beban biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk proses konversi pun terbilang

tidak murah dan mengharuskan petani percontohan untuk beralih menggunakan saprodi khusus organik.

Pelaksanaan program organik selain membebani petani dengan biaya produksi juga menimbulkan konsekuensi berikutnya berupa waktu dan tenaga. Beban waktu dan tenaga untuk menerapkan pola tanam organik bagi para petani yang terbiasa dengan sistem konvensional menjadi kendala tersendiri. Para petani kawasan harus membagi perlakuan pola tanam pada 2 lahan mereka yang berbeda yakni untuk lahan konvensional dan lahan pertanian mereka yang beralih menjadi kawasan percontohan. Perbedaan penanganan tanaman mengharuskan mereka memiliki disiplin tinggi untuk membagi waktu dan tenaga sehingga dapat diperoleh keberhasilan hingga panen. Para petani memang mampu sepenuhnya mengalihkan seluruh lahan kepemilikannya menjadi lahan organik, namun para petani memiliki pertimbangan bahwa program pemerintah tersebut belum jelas keberhasilannya. Maka sejauh ini yang dapat dilakukan para petani kawasan tetap membagi kepemilikan lahannya menjadi 2 macam penanganan untuk mengantisipasi jika yang organik tidak sepenuhnya berhasil.

Penanganan yang tidak maksimal petani kawasan berakibat pada terjadinya gagal panen. Gagal panen organik para petani kawasan percontohan selain faktor penanganan petani dalam membagi waktu dan tenaganya juga disebabkan oleh ketidaksiapan penyelenggara dalam memfasilitasi dan mendampingi para petani kawasan. Ketidaksiapan pihak penyelenggara misalnya dalam memaksimalkan sosialisasi maupun pendampingan petani dalam penerapan pola pertanian organik, keterlambatan distribusi hibah saprodi yang mesti menunggu tahun anggaran dalam pemerintahan sehingga para petani dipaksa

menunda waktu tanam atau membeli saprodi sendiri. Tertundanya masa tanam karena menunggu datangnya alokasi hibah saprodi berujung pada perubahan cuaca pada bulan-bulan tertentu atau yang lebih parah bergantinya musim dan situasi permintaan pasar sehingga ketika masa panen para petani kesulitan untuk menjual hasil panen.

Kesulitan mencari pasar yang dialami para petani tersebut tidak lain juga diakibatkan kurang terlibatnya lembaga-lembaga pemerintahan terkait dalam memfasilitasi ketersediaan pasar baik lokal maupun nasional. Sejauh ini dari awal diselenggarakannya program pertanian organik di kawasan percontohan masih belum terdapat pasar yang bersedia menampung hasil panen petani nantinya. Para petani kawasan hingga saat ini masih menjual produknya ke tangan-tangan tengkulak dengan harga yang disamakan dengan produk pertanian konvensional. Permasalahan pemasaran produk panen petani kawasan menjadi kebutuhan yang seharusnya mampu difasilitasi atau dijamin oleh pihak penyelenggara sehingga motivasi para petani setempat untuk menerapkan pertanian organik semakin tinggi dan tanpa ragu-ragu.

### 5.3.2 Dimensi Permasalahan Sosial

Salah satu dimensi yang muncul sebagai bias dari gagalnya penerapan pertanian organik di kawasan percontohan adalah permasalahan sosial. Dimensi permasalahan sosial memang tidak dapat dibuktikan secara kasat mata dan seekstrim permasalahan materiil namun gejala ini dapat berimbas pada perubahan tatanan sosial yang telah berlangsung sebelumnya. Salah satu fenomena yang ditemukan peneliti adalah *pertama* terdapatnya *gap* atau adanya jarak antar petani, kelompok tani, dan pihak penyelenggara. Terdapatnya jarak tersebut didasari

ketidaktransparan pihak penyelenggara maupun kelompok terhadap petani percontohan sehingga jalur komunikasi diantara mereka sering berseberangan.

Miskomunikasi yang terjadi diantara pihak berimbas pula pada hilangnya kepercayaan para petani kawasan. Dampak buruk dari pudarnya kepercayaan diantara stakeholder salah satunya mengakibatkan keluar-masuknya anggota kelompok tani. Efek lainnya yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan pada pihak penyelenggara sehingga intensitas serta komitmen dalam menjalankan program organik tidak berjalan dengan semestinya. Para petani yang merasa dipermainkan atau merasa tidak diperhatikan dan difasilitasi dengan baik oleh kelompok maupun pihak penyelenggara menjadi enggan untuk turut serta dalam mensukseskan program ini.

Adanya dugaan permasalahan perihal alokasi hibah saprodi yang telah menjadi prasangka diantara petani, kelompok tani dan penyelenggara ditengarai peneliti berdasarkan data wawancara perihal masalah transparansi alokasi hibah saprodi. Perselisihan yang terjadi perihal alokasi hibah saprodi didasari terjadinya miskomunikasi dan ketidaktransparan stakeholder serta keterlambatan pada saat distribusi ke petani kawasan. Selain itu hal mendasar yang menjadi latar belakang tidak proporsionalnya alokasi hibah adalah sebaran kepemilikan lahan yang menjadi situs kawasan percontohan. Sebagian petani percontohan ada yang memiliki lahan kurang dari  $\frac{1}{4}$  hektar sedangkan lainnya ada yang lebih sehingga pembagian menjadi tidak merata. Terlebih diantara para petani kawasan terdapat beberapa yang tidak tergabung dalam anggota kelompok tani.

Kesimpangsiuran distribusi saprodi organik di kawasan percontohan diperparah dengan tidak proporsionalnya jumlah alokasi hibah yang diberikan



oleh Pemkot. Hibah saprodi yang disediakan penyelenggara tidak proporsional dengan kebutuhan luas kawasan percontohan sehingga distribusi ke petani mengalami kekurangan yang signifikan dan mengharuskan petani untuk mencari saprodi tambahan ke pihak lain. Risiko yang kemudian ditanggung oleh petani akhirnya menambah beban modal produksi yang seharusnya diperingan dengan adanya hibah saprodi dari pemerintah kota. Alokasi hibah yang tidak proporsional tersebut menimbulkan prasangka buruk petani kawasan pada pihak penyelenggara bahwa terdapat unsur penyelewengan saat distribusi.

Preseden buruk para petani maupun kelompok pada pihak penyelenggara didukung dengan sering terlambatnya hibah saprodi sampai ke kawasan percontohan akibat pihak ketiga yang menggunakan sistem tender. Keterlambatan yang terjadi juga dikarenakan sistem penganggaran yang berdasarkan pada aturan administrasi pemerintahan padahal masa tanam para petani berbeda hitungannya dengan sistem anggaran yakni berdasarkan dengan cuaca dan kebutuhan serta permintaan pasar. Preseden buruk yang terjadi seharusnya mampu menjadi pijakan bagi pihak penyelenggara untuk memperbaiki sistem dari tahun ke tahun namun apa yang terjadi hingga saat ini masih tidak ditemui keberhasilan dalam pelaksanaan program organik di kawasan percontohan Sumberbrantas.

## BAB VI KESIMPULAN

### 6.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kebijakan pertanian berkelanjutan yang sedang diterapkan oleh pemerintha kota batu berupa “Batu go organik” dalam proses implementasintya menimbulkan polemik diantara penyelenggara dan sasaran kebijakan. Sebagaimana tujuan dilakukannya kajian tentang implementasi kebijakan pertanian Pemerintah Kota Batu dalam upayanya mentransformasi pertanian konvensional ke pertanian organik telah didapati beberapa temuan yang akan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang mendasari penelitian ini. Beberapa temuan yang dapat disajikan sebagai kesimpulan dalam laporan skripsi ini antara lain meliputi dinamika proses implementasi kebijakan dari awal kebijakan direncanakan hingga keadaan yang berlangsung saat ini khususnya di kawasan percontohan atau pengembangan Dusun Jurangkuali Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, sebagai berikut:

Pertama, fase perencanaan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah kota batu sedemikian rupa pada kenyataannya kurang melibatkan petani sasaran kebijakan. Meskipun tujuan hadirnya kebijakan tersebut adalah untuk mencegah kerusakan ekosistem pertanian sebagai bias dari penerapan pola pertanian konvensional dan sebagai solusi yang mengupayakan peningkatan kesejahteraan para petani melalui produk organik yang unggul. Sebaliknya yang terjadi adalah proses perancangan program hanya berdasar pada aturan perundang-undangan dan juga rekomendasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tanpa menggali lebih dalam lagi mengenai kesiapan dari tiap-tiap wilayah yang akan dijadikan kawasan percontohan atau pengembangan pertanian organik. Hal ini lah

yang pada akhirnya menimbulkan polemik ketika program pertanian kawasan tersebut telah sampai dalam tahap implementasi di lapangan.

Kedua, sistem yang disiapkan oleh pemerintah kota batu tidak bekerja secara maksimal khususnya tim pelaksana atau tim teknis yang bertugas mendampingi para petani kawasan dalam menerapkan pola tanam organik mulai on farm hingga off farm. Tim pendampingan yang disediakan pihak penyelenggara terlebih tidak berbanding lurus dengan jumlah petani kawasan yaitu hanya menempatkan 1 sampai 2 orang tenaga pendamping dari dinas di setiap desa. Padahal pada kenyataannya sebaran petani di lokasi kawasan terbilang banyak dan beragam karakteristiknya serta kurangnya tenaga pendamping berimbas pada kurang intensifnya proses bimbingan yang dilakukan. Proses pendampingan yang tidak intensif ini berujung pada penerapan pola tanam organik yang salah karena petani tidak sepenuhnya memahami perihal pola pertanian organik yang masih baru tersebut sehingga kebanyakan petani kawasan memilih untuk tidak melanjutkan dengan alasan takut merugi jika gagal.

Ketiga, permasalahan alokasi hibah saprodi organik juga turut menjadi penyumbang tidak suksesnya implementasi kebijakan organik di kawasan percontohan dusun jurangkuali desa sumberbrantas. Alokasi hibah yang disiapkan pemerintah kota tidak berkesesuaian dengan sebaran luas kawasan percontohan beserta jumlah petaninya. Distribusi hibah saprodi yang selama ini berlangsung hanya diberikan satu kali dalam setahun padahal masa tanam para petani kawasan berlangsung lebih dari 3 kali dalam setahun dengan varian jenis komoditas yang berbeda. Terlebih jika distribusi hibah saprodi mengalami keterlambatan dapat berimbas pada keterlambatan masa tanam bagi petani sehingga akan berimbas

pada bergesernya perhitungan musim serta kebutuhan pasar yang akan berdampak pada kerugian. Selain itu penyebab bermasalahnya sistem distribusi alokasi hibah saprodi dikarenakan pemerintah menggunakan sistem tender atau pelimpahan jasa dari pihak ketiga yaitu kontraktor untuk menyediakan saprodi organik program sehingga berdampak pula pada seringnya keterlambatan dan kualitas dari saprodi. Pola sistem anggaran di pemerintahan juga menjadikan waktu alokasi hibah menyesuaikan jadwal distribusinya sedangkan masa tanam petani lebih berdasar pada perubahan musim dan kebutuhan pasar pada bulan-bulan tertentu sehingga petani memilih untuk tidak berpangku tanam dengan saprodi dari pemerintah dan membeli sendiri dari pihak lain.

Keempat, sertifikasi dan pemasaran produk hasil panen petani salah satu yang menyebabkan tidak berhasilnya upaya transformasi pertanian yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu. Pemerintah kota batu sampai saat ini belum memaksimalkan kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah untuk menyediakan pasar bagi petani kawasan sehingga yang terjadi hasil panen petani dijual ke tengkulak. Pasar yang belum tersedia merupakan imbas akhir dari ketidaksiuksesan penyelenggaraan kebijakan karena memang dari awal perencanaan, proses pendampingan, alokasi hibah saprodi, maupun sertifikasi tidak berjalan sesuai yang yang dirancang sehingga produk yang dihasilkan petani pun belum dapat dikatakan *pure organic*.

Kelima, konsekuensi dari penyelenggaraan kebijakan organik yang tidak sepenuhnya sukses memberikan konsekuensi bagi kedua pihak baik penyelenggara maupun petani kawasan. Konsekuensi bias implementasi kebijakan berupa dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi permasalahan sosial yang lahir

antara lain, konflik antar petani dalam kelompok, keluar masuknya anggota kelompok tani, hilangnya kepercayaan pada tenaga pendamping yang dianggap tidak serius oleh petani. Dimensi permasalahan ekonomi yang dialami oleh petani antara lain, kerugian pada masa konversi lahan yang mengurangi kuantitas hasil panen petani hamper 50 persen dari pola tanam konvensional yang biasa mereka gunakan, tambahan biaya saprodi organik jika distribusi hibah saprodi dari pemerintah kurang atau mengalami keterlambatan serta kualitasnya kurang baik, harga jual produk yang harus disamakan dengan produk konvensional jika dijual pada tengkulak.

Kebijakan pertanian sebagai upaya mensejahterahkan petani dan kepentingan perbaikan ekosistem lingkungan serta penjaminan sebaran produk yang sehat bagi konsumen seperti yang direncanakan sepenuhnya tidak berjalan sesuai ketika diterapkan. Perlunya evaluasi lebih mendalam pada sumber permasalahan-permasalahan yang telah menjadi temuan dalam penelitian ini harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah setempat jika memang langkah transformasi pertanian ini tetap menjadi satu-satunya solusi yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah kota. Temuan ini sekaligus menjadi penutup dan kesimpulan yang diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan sebagai salah satu dari lingkup kajian kebijakan publik sehingga langkah yang diambil pemerintah selanjutnya mampu mengurai sumber permasalahan tersebut.



## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Praktis

Peneliti berharap untuk pembaca agar tidak lupa menyertakan kritik dan saran guna membangun khazanah perihal implementasi kebijakan pertanian organik di Indonesia khususnya di wilayah Kota Batu. Berkaca dari perkembangan kajian perencanaan pembangunan berkelanjutan dan berasaskan lingkungan yang sedang marak digalakan saat ini, peneliti menghimbau agar para pembaca lebih teliti dan sadar akan pentingnya memahami setiap kebijakan yang ada. Hal ini mengingat bahwa tidak semua kebijakan nasional atau daerah yang diimplementasikan akan langsung berkesesuaian dengan wilayah sasaran dengan beragam karakteristiknya. Maka penting kiranya bagi pembaca untuk dapat mengambil intisari dari tulisan ini untuk dapat dijadikan wawasan tambahan dalam melihat berlangsungnya implementasi kebijakan publik.

### 6.2.2 Saran Akademis

Kajian mengenai implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menambah pengetahuan akan kontestasi sebuah kebijakan publik. Lazim diketahui bahwa setiap kebijakan publik akan mempertemukan antara penyelenggara kebijakan dan sasaran kebijakan sehingga khazanah pembahasan perihal pertemuan 2 kepentingan yang berbeda akan selalu menjadi bahasan yang menarik untuk dikulik. Sajian penulisan ini kiranya dapat menjadi landasan untuk mengkaji kebijakan publik di bidang pertanian khususnya di wilayah Kota Batu.

Peneliti menyadari keterbatasan lingkup kajian yang dilakukan sehingga untuk kepentingan penelitian yang lebih holistik di masa depan sangat

dibutuhkan. Himbauan yang dapat menjadi bagian kajian bagi penelitian selanjutnya adalah kajian mengenai geografis pada tiap-tiap titik kawasan percontohan atau pengembangan pertanian organik yang tersebar di tiap desa di Kota Batu. Kajian geografis ini penting dilakukan sebagai bahan landasan bagi penyelenggara kebijakan agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda di setiap titik kawasan percontohan organik. Kajian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengenai pasar yang akan sangat dibutuhkan bagi para petani kawasan percontohan. Kesiapan pasar harus penting menjadi kajian prioritas lainnya mengingat dalam sistem produksi pertanian organik tidak hanya menyiapkan in farm saja tetapi hingga off farm atau kebutuhan-kebutuhan pasca panen dalam hal ini pemasaran dan distribusi. Pentingnya menyiapkan pasar yang memadai bagi para petani kawasan didasarkan pada kebiasaan para petani di kawasan yang masih menganut pola tanam serentak dalam satu musim tertentu sehingga jumlah kuantitas satu jenis produk dalam satu kali panen akan sangat besar jumlahnya sehingga pasar yang siap menampung akan sangat membantu kebutuhan off farm petani. Selanjutnya, kajian lain yang perlu dilakukan adalah pendampingan bagi para petani kawasan yang terhitung masih baru mengenal pertanian organik dari tahun 2012 hingga sekarang masih berlangsung penyelenggaraan kebijakan organik. Pentingnya kajian mengenai pendampingan atau tim pelaksana teknis di lapangan sangat dibutuhkan mengingat sampai saat ini kredibilitas para pendamping masih diragukan oleh para petani kawasan. Keraguan yang dialami petani kawasan dapat disebabkan oleh sistem kebijakan yang masih menggunakan tenaga ahli dari luar kedinasan yaitu bantuan pihak ketiga dari universitas-universitas. Selain itu, tenaga ahli yang disiapkan oleh

pihak dinas dirasa kurang karena hanya menempatkan 1-2 orang tenaga pendamping disetiap desa sehingga secara kuantitas dan kualitas pendampingan menjadi tidak intensif. Ketidakintensifan proses pendampingan di lapangan dapat menyebabkan pesan yang ingin disampaikan oleh penyelenggara kepada para petani kawasan atau sebaliknya menjadi tidak sampai dan cenderung sering terjadi kesalahpahaman. Terakhir yang dapat peneliti himbau adalah kajian tentang sarana dan prasarana penyelenggaraan program pertanian kawasan. Kajian mengenai sarana dan prasaran penting dilakukan sebagai penyangga kebutuhan saprodi bagi petani kawasan mengingat pola pertanian organik merupakan hal baru bagi petani sehingga pihak penyelenggara perlu memaksimalkan kesiapan sarana prasarannya. Kesiapan dari pihak penyelenggara sangat diperlukan oleh petani karena selama ini kebutuhan akan saprodi organik masih dilimpahkan pada pihak ketiga dengan sistem tender yang berkonsekuensi pada kualitas saprotan dan tidak aksesibel bagi petani sehingga sering terjadi keterlambatan distribusi serta tidak tepat waktu dengan waktu awal tanam yang harus menyesuaikan dengan musim dan kebutuhan pasar.

Maka dari itu kajian yang holistik dalam mengkaji penyelenggaraan kebijakan organik di Kota Batu tidak bisa hanya mengandalkan satu kaca mata sosial saja seperti yang telah dilakukan oleh peneliti. Perlunya melengkapi kajian-kajian yang menjadi himbauan bagi penelitian selanjutnya akan sangat membantu dalam mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan pertanian organik sejauh ini sehingga dapat dilakukan perbaikan atau ditiadakan jika memang didapati permasalahan-permasalahan yang terlalu beresiko bila kebijakan tetap diselenggarakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lily. 2011. *Teknologi Hijau dalam Pertanian Organik Menuju Pertanian Berkelanjutan*. Malang: UB Press
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Dewan Guru Besar IPB, 2010. *Merevolusi Revolusi Hijau*. Bogor: IPB Press
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Ilmu Politik: Ideologi dan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Li, Tania Murray. 2011. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri
- Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta, 2002, hlm 21.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung : PT. Raja Rosdakarya
- Mudloffir, Abdul Mughis. 2013. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol. 18, No. 1
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2015. *Antonio Gramsci. Negara dan Hegemoni*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Purwanto, Rudhy., dkk. 2012. *Merevolusi Revolusi Hijau: Pemikiran Guru Besar IPB*. Bogor: IPB Press
- Ratna. 2011. *Analisis Implementasi Pertanian Apel Organik Di Desa Bumiaji, Kota Batu*. Malang: Universitas Brawijaya
- Roidah. 2010. *Pemberdayaan Anggota Kelompok Federasi "Jaya Kusuma" Melalui Penerapan Pertanian Organik Dalam Program Pengembangan Pertanian Terpadu Secara Partisipatif Di Lahan Kering Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*. Malang: Universitas Brawijaya
- Sabatier, Paul. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, 1986, hlm. 21-48
- Salikin, A. Karwan. 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius

- Salim, Agus. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugito, dkk. 1995. *Sistem Pertanian Organik*. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Rajawali Pers

**Sumber internet:**

- Muiz, 2015. <http://suryamalang.tribunnews.com/2015/09/16/begini-kendala-utama-petani-organik-di-kota-batu> diakses pada 24 September 2016
- Sofi'I, Muhammad, 2014. <http://surabaya.bisnis.com/read/20140611/10/72127/program-pertanian-organik-di-batu-berjalan-lambat-ini-kendalanya> diakses pada 24 September 2016

**Sumber lain:**

- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
- Peraturan Wali Kota Batu Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Pertanian Organik
- Data monografi Desa Sumberbrantas tahun 2015





## LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

### Lampiran 1



**Gambar Wawancara dengan Informan (Mas Aan)**



**Gambar Wawancara dengan Informan (Pak Prawito)**



**Gambar Sosialisasi Petani dengan Tim Dinas**

Gambar Struktur Kelompok Tani



Lampiran 2

No.	Informan/ Status/ Waktu	Tema Pertanyaan	Data Reduksi	Interpretasi	Kategori /Tinjauan Pustaka
1	P. Yusuf: Kabid Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	<p>Kapan kebijakan organik dimulai pak?</p> <p>Apa yang melatarbelakangi digulirkannya kebijakan tersebut pak?</p>	<p>a. Itu dimulai tahun 2012 dengan sebutan batu go organik. Waktu itu masih percobaan di 5 desa, sekarang sudah berkembang menjadi 14 desa.(1A)</p> <p>b. Latar belakang kebijakan tersebut digulirkan adalah untuk peningkatan kawasan pariwisata pada sektor pertanian karena sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah kota batu untuk menjadikan Kota Batu sebagai salah satu sentra produk organik. Itu pertama, kedua untuk menyelamatkan lingkungan dengan menerapkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Maksudnya penerapan kebijakan ini berkaitan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian yg merusak ekosistem. Ketiga, untuk menghasilkan produk yang sehat bagi konsumen, karena bagaimanapun masyarakat sekarang mulai memperhatikan kualitas dari apa yang mereka konsumsi. Terakhir adalah harga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dengan tingkat jual produk yang bisa 2 sampai 3 kali lipat dibanding pertanian konvensional (1A)</p>	<p>a. Jargon “Batu Go Organik” memiliki tendensi bahwa pertanian kota batu sedang menuju tahapan organik meskipun implementasi awal kebijakan pertanian tersebut masih dalam tahap percobaan. Kendati demikian seiring berjalannya waktu program pertanian organik di kota batu telah mengalami perkembangan dengan diperluasnya jangkauan kawasan organik dari 5 desa percontohan/percobaaan menjadi 14 desa yang akan segera dirancang pelaksanaannya.</p> <p>b. digulirkannya kebijakan pertanian organik telah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan, dan telah mengikuti prinsip dasar dari penerapan pertanian berkelanjutan yang digagas oleh IFOAM. Tetapi yang menjadi catatan dalam hal ini adalah hadirnya program pertanian</p>	Latar Belakang Kebijakan

				organik pemerintah semata-mata merupakan inisiatif dari atas artinya tidak adanya permintaan atau tuntutan dari petani atau masyarakat setempat agaknya akan menjadi hambatan tersendiri pada tahap pelaksanaannya nanti. Alasan ini berdasar pada absennya antusias petani dalam hal keturutsertaan mereka merancang program pertanian yang sayogyanya menjadi domain mereka.	
2	P. Yusuf: Kabid Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	Apa perbedaan kualifikasi 5 wilayah yang bapak sebutkan di awal tadi? Proses penentuan nya seperti apa?	a. awal kita untuk launching organik itu alasan di 5 wilayah. Di 5 wilayah ini ekosistemnya mendukung. Jadi kalo misalkan di sumberbrantas itu kawasan yang kita kembangkan 10 ha itu dekat dengan sumber air. Walau pun nanti bukan dekat dengan sumber air kayak di desa Pendem. Nanti ada treatment-treatment sendiri untuk air ini. Jadi sebelum air masuk ke pertanian atau kawasan organik, kita lakukan treatment-treatment. Jadi lewat kolam-kolam untuk pemurnian. Kemudian yang terakhir kita kasih ikan yang rentan dengan bahan kimia, jadi kalau ikan ini tidak mati berarti insyaallah air yang mengalir ke petani sudah terbebas dari bahan kimia.	a. Alasan 5 penentuan kawasan percontohan organik sudah berdasarkan pada perhitungan dan karakteristik yang mendukung untuk keberhasilan program saat percobaan. Tetapi yang menjadi catatan adalah penunjukan titik lokasi merupakan ketentuan dari penyelenggara program. Sehingga petani yang berada di lokasi yang sudah ditentukan harus mengikuti implementasi kebijakan yakni	Kualifikasi penentuan wilayah kawasan percontohan organik



			(1A)	sebagai petani percontohan organik.	
		Apakah ada perbedaan komoditas di antara 5 desa yang dipilih tersebut?	b. Beda-beda. Dulu untuk di sumberbrantas itu, kita andalkan untuk komoditas kentang, wortel, dan sawi putih. Kemudian di tulungrejo ada brokoli, wortel juga ada. Kemudian untuk di desa pendem memang khusus untuk padi. Terus di sumberejo sayur daun. Di torongrejo ada bawang merah, prei, brokoli. (1A)	b. sebaran titik lokasi percontohan organik 5 desa juga dibedakan komoditas organik yang ditanam. Perbedaan komoditas di tiap lokasi merupakan kesepakatan dengan petani setempat berdasar pada produk unggulan yang biasa ditanam di masing-masing lokasi. Meskipun pemilihan komoditas atas dasar rundingan dengan petani setempat, tetapi tetap terdapat beberapa komoditas yang sengaja ditentukan oleh pemkot untuk ditanam para petani percontohan.	
		Untuk jenis komoditas tanam apakah ditentukan oleh dinas?	Bukan. Bukan itu dulu waktu sosialisasi itu kesepakatan dengan petani. Yang sudah terbiasa dikembangkan satu desa itu apa, unggulannya apa, itu yang kita pilih, bukan kita yang menentukan tapi dari bawah ke atas. Tapi ada juga dari atas tapi sedikit gitu loh. Untuk menambahkan ininya, apa eh jenis produknya itu. (1A)		
3	P. Yusuf: Kabid Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	Bagaimana mekanisme sosialisasi dan teknis penerapan kebijakan di lapangan?	a. Pertama dulu memang berat kita untuk merubah mindset petani untuk beralih dari kimia menjadi organik itu memang berat. Karena apa, ekosistem kita ini kan sudah terlanjur terkontaminasi oleh kimia. Tapi dengan jalan kita mulai bertahap-tahap, kita kurangi. Awalnya memang kita kurangi dulu, tidak langsung lepas kimia tidak tapi bertahap. Yang pertama	a. pemkot mengalami kesulitan dalam upaya mensosialisasikan penerapan pertanian organik pada petani percontohan. Kesulitan yang dialami pemkot terkait dengan alasan ekosistem pertanian yang ada	



			itu 25%, yg kedua 50% persen, 75% meningkat terus sampai lepas sama sekali. Itu kita caranya untuk meyakinkan petani itu kita bantu dengan saprodinya, bibit dan saprodi organiknya. Jadi diharapkan, memang kalau pertama berubah langsung ke organik itu tahun pertama itu produktivitasnya memang menurun 50%. Tapi dengan kita bantu untuk saprodinya petani tidak akan rugi, karena mereka sudah, biaya produksinya berkurang, dia tinggal tenaga kan gitu. Kemudian tahun kedua sampai lepas benar-benar itu. Kemudian tahun ketiga kita sudah melakukan sertifikasi organik, (1A)	terlanjur terkontaminasi bahan kimia, sehingga menjadi kendala bagi penyelenggara untuk kemudian mengambil langkah konversi lahan. Pertama dengan menerapkan bantuan saprodi pada petani dan menerapkan pertanian organik secara bertahap 25%, 50%, 75% sampai 100% lepas sama sekali. Baru masuk tahun ketiga kita lakukan sertifikasi. Selain itu, permasalahan juga dialami petani yang merasa implementasi perogram pertanian organik tidak serius dalam hal ini. Permasalahan yang dialami petani antara lain masih barunya pertanian organik untuk diterapkan petani setempat menggantikan pertanian konvensional yang biasa mereka terapkan, tidak adanya jaminan ganti rugi jika gagal, bantuan pemasaran dan juga sertifikasi.	
		Berapa kali sosialisasi yang dilakukan?	b. Pertama yang rutin itu dilakukan oleh penyuluh. Penyuluh itu di setiap desa kan ada. Itu kan mereka ada pertemuan rutin tiap bulan pada kelompok. Pada waktu penyuluhan tiap bulan ini, atau kadang-kadang malah ga tiap bulan, kadang-kadang setiap hari kegiatan kan ke lapangan. Itu yang sosialisasi langsung. Tapi yang diprogram oleh dinas dari waktu itu ya hampir beberapa kali, 4 kali ada. Dan setiap kita lakukan itu, sosialisasi, pelatihan. Sosialisasi itu kan bersifat satu arah-satu arah. Tapi kalau pelatihan, kita ada praktik ke lapangan melalui sekolah lapang, kemudian wis banyak wis mas, produknya kita bantu untuk	b. sosialisasi yang	

			pemasarannya. (1A)	dilakukan oleh dinas memang sudah terjadwal rutin sebulan 1 kali, diluar itu ada sosialisasi yang tidak rutin yakni piket atau tugas dari para penyuluh yang ditugaskan pada setiap desa. Selain itu juga ada pelatihan sekaligus praktik langsung melalui sekolah lapang.	
4	P. Yusuf: Kabid Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	Apakah ada indikator keberhasilan organik dari Pemerintah kota batu untuk penerapan pertanian organik?	a. Kalo dari kita sendiri indikator keberhasilannya, pertama sertifikasi organik. Yang kedua, petani yang ada di kota Batu ini sudah, kita kemarin itu ada kerjasama dengan unmu telah mengambil sampling tentang evaluasi pertanian organik di kota batu. Itu sudah hampir 90% mengerti pertanian organik itu. Mengerti ini dalam artian, mereka sudah itu tadi, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia untuk pertanian dan mengutamakan organik, pupuk organik, pupuk organik cair, agen hayati untuk menjaga ekosistemnya. (1A)	a. indikator yang ditetapkan oleh pemerintah kota batu melalui dinas pertaniannya dalam mengukur keberhasilan implementasi pertanian organik adalah dengan diperolehnya sertifikasi organik. Selain itu indikator kedua adalah jika petani yang ada di Batu sudah mengerti tentang pertanian organik. Meskipun dalam hal ini, arti dari indikator keduanya masih terlalu dini dan mengeneralisir pengetahuan petani tentang organik yakni hanya dari berkurangnya penggunaan bahan-bahan kimia tanpa memperhatikan faktor lain seperti kelangkaan	Indikator keberhasilan program dari pemerintah kota batu

				saprotan.	
5	P. Yusuf: Kabid Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	Apa sarana-prasarana yang disiapkan pemerintah kota batu untuk menunjang keberhasilan program?	a. Sarana-prasarananya kalo kita, yang sudah dibantu oleh dinas, itu ada irigasi selain hibah saprodi tadi loh ya, wujud jalan usaha taninya, terus apa namanya alsintannya (alat mesin pertanian) ada kontraktor, generator, terus ada APPO (Alat pengolah pupuk organik) juga ada. Untuk pasar, kita ada BUMDnya kota batu yaitu batu kota wisata resource, itu yang untuk membantu pemasarannya produk organik. Kemudian untuk yang rutin, yang dibantu oleh dinas ya itu nanti tiap minggu rencana ada ini di Amongtani spot nanti, kita suruh ijin berjualan itu. (1A)	a. sarana-prasarana yang sudah disediakan oleh pemkot batu dalam upaya menunjang implementasi pertanian organik sebagai berikut; hibah saprodi, alat mesin pertanian seperti traktor dan generator, Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), bantuan pemasaran yang difasilitasi oleh BUMD Kota Batu. Selain itu juga ada rencana bantuan rutin dari dinas yaitu ijin berjualan di Balai Kota Amongtani Spot.	Sarana dan prasarana yang disiapkan
6	P. Yusuf: Kabid Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	Mengenai tim penyuluhnya, apakah dari pihak dinas semua pak?	a. Iya dari dinas itu tiap desa kan ada penyuluh pertanian. Ada THL(tenaga harian lepas) juga dari pusat yang di, apa yang digaji dari pusat. Ada yg satu desa 2 orang, PPL dari dinas yang PNS, ada yang dari pusat THL itu. Itu yang memberi pendampingan selalu. (1A)	a. tim pelaksana atau penyuluh pertanian tidak semuanya dari pihak dinas tetapi ada juga yang dari pusat untuk melakukan pendampingan. Sedangkan dari dinas sendiri menempatkan penyuluh di setiap desa, ada yg 1 orang penyuluh perdesa ada yang 2 orang perdesa untuk memberi pendampingan terus.	Tim pelaksana program atau penyuluh lapangan
7	P. Yusuf: Kabid Organik	Bagaimana mekanisme pengalokas	Bukan subsidi lagi, tapi hibah itu. Kita bantu semua saprodinya, pakai SK(Surat	Mekanisme pengalokasiannya berdasar pada SK	Mekanisme pengalok

	Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	ian subsidinya pak?	Keputusan) Wali Kota, langsung dikasihkan. Ada itu mulai tahun kemarin, ada bantuan modal usaha, sampai sekarang 10 juta perkelompok, gapoktan 25 juta, berbentuk uang itu selain tadi saprodi, tunai langsung masuk rekeningnya ketua kelompoknya. (1A)	Wali Kota berupa hibah saprodi yang langsung dikasihkan ke petani. Selain itu tahun kemarin ada bantuan modal usaha sampai sekarang berupa 10jt perkelompok dan gapoktan 25jt, itu semua berbentuk uang yang langsung masuk ke rekening kelompok.	asian subsidi/hibah
8	P. Yusuf: Kabid Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	Apa pernah diadakan evaluasi pak? Berapa kali, dan bagaimana dilakukannya?  Evaluasi yang dilakukan itu berfokus pada bagian apa pak?	Setiap tahun ada evaluasi. Kita bekerjasama dengan Brawijaya kalo evaluasi, dengan unmu kalo sekarang tahun kemarin. Pendampingan, evaluasi kita selalu ada. Pendampingan yang secara rutin oleh PPL, PPT. (1A)  Evaluasinya ya terhadap keberhasilan tadi. Pertama tadi soal dampaknya, kemudian seberapa besar petani sudah mengurangi penggunaan pupuk kimia, kemudian produktivitasnya bagaimana, hasil panennya itu loh. Kemudian serangan penyakit-penyakit tanaman. Kemudian dari segi ekonomi petani juga, jadi banyak tolok ukurnya. (1A)	Distanhut melakukan evaluasi pelaksanaan program pertanian organik sekali setiap tahun bekerjasama dengan universitas. Selain evaluasi tahunan, sebenarnya ada model pendampingan yang lebih rutin dilakukan setiap bulannya oleh petugas penyuluh. Fokus dalam evaluasi yang dilakukan oleh distanhut terkait dengan keberhasilan program. Selain fokus keberhasilan sertifikasi, antara lain produktivitas, serangan penyakit, segi ekonomi petani dll.	Evaluasi kebijakan program
9	P. Yusuf: Kabid	Sejauh mana	Setelah dievaluasi itu meningkat terus. Itu tadi,	Prosentase keberhasilan	Prosentase



Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	prosentase keberhasilan program dari tahun ke tahun pak?	<p>dengan tolok ukur kita tadi. Pertama 5 kawasan, kemudian 9 kawasan, sekarang jadi 14. Kemudian tadi banyak sekali pihak swasta yang semakin berkembang, perusahaan swasta ada yang swadaya mandiri petani.</p> <p>Karena sekarang itu, intinya kan anu, dengan peningkatan ekonomi masyarakat, bukan kota batu saja ya, seluruh Indonesia khususnya jawa timur. Itu kalo mereka penghasilannya sudah tinggi, itu dia akan bukan hanya memikirkan uang tetapi memikirkan kesehatan. Padahal faktor utama kesehatan pertama adalah pola apa yang kita makan, kemudian pikiran kita, olahraga kita, lingkungan kita. Kan masih banyak faktor kesehatan macam-macam, yang selain faktor dari dalam diri kita. Dengan banyaknya kesadaran masyarakat akan kesehatan, maka permintaan terhadap produk-produk komoditas organik itu semakin meningkat. Sehingga akan memicu tadi, adanya pihak swasta yang ber-usaha di bidang pertanian organik. Tapi kalo kita percobaan kalo tidak untung kan ngga mungkin tambah berkembang kan. Kan akhirnya tambah berkembang. Di Giripurno itu barusan itu, itu mereka sudah menyuplai seluruh jawa timur. Akhirnya, semakin permintaan tinggi, akhirnya kebutuhan kan</p>	<p>program yang disampaikan oleh dinas setelah melakukan evaluasi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan yang terus-menerus. Seperti tolok ukur yang mereka gunakan adalah dari 5 kawasan perconthan awal kemudian meningkat menjadi 9 kawasan, dan sekarang jadi 14 kawasan. Selain itu banyak juga pihak swasta yang maupun swadaya mandiri petani yang turut serta ber-usaha di bidang pertanian organik. Antusias pihak-pihak terkait tidak lain karena adanya peningkatan permintaan pasar akan produk yang sehat. Hal ini tidak lain karena meningkatnya kesadaran masyarakat menengah ke atas dalam memperhatikan asupan yang sehat.</p>	keberhasilan
---	--	---	---	--------------



			meningkat, kebutuhan untuk memenuhi. Akhirnya pihak masyarakat petani atau swasta kan tertarik untuk bertani organik.(1A)		
10	P. Yusuf: Kabid Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	Kapan 5 desa percontohan awal itu disebut berhasil pak, maksudnya sebelum dikembangkan jadi 14 desa?	<p>Terhitung berhasil ya tahun ke tiga mereka sebagian besar sudah lepas jadi organik. Minimal itu sudah mengurangi pupuk pestisida kimia sintesis. Setelah itu kita baru tambah-tambah terus kawasannya. (1A)</p> <p>Tolak ukurnya kita, untuk RDKK (rencana dan kebutuhan kelompok) untuk pupuk pestisida, kimia itu dari tahun ke tahun berkurang. Karena semakin banyak yang menggunakan pupuk organik. Kan bertahap, ga bisa langsung 100% gabisa. Total seluruh kota langsung pure organik gitu, ngga. (1A)</p>	Keberhasilan 5 kawasan percontohan ditandai dengan berkurangnya penggunaan pupuk pestisida dan kimia sintesis. Progres keberhasilan yang dimaksud baru dapat dipastikan setelah berjalan 3 tahun dengan progres bertahap peningkatan penggunaan pupuk organik. Setelah itu distanhut secara bertahap juga telah menambah jumlah kawasan dari 5 kawasan percontohan menjadi 9, dan sekarang akan dikembangkan menjadi 14 kawasan. Namun demikian, agaknya pernyataan tersebut terlalu tergesa-gesa mengingat untuk dapat dikatakan berhasil harusnya indikator keberhasilan benar-benar diperjelas dan tidak hanya berdasar pada pengurangan penggunaan pupuk kimia saja, melainkan telah sampai pada tahap	Indikator keberhasilan kawasan percontohan awal

				sertifikasi. Hal ini karena penetapan sertifikat merupakan tolok ukur yg sementinya untuk program dikatakan berhasil. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa untuk merubah pertanian konvensional menjadi 100% organik susah untuk ditempuh secara cepat. Maka seharusnya, ini menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum melaksanakan pengembangan kawasan menjadi 14.	
11	P. Yusuf: Kabid Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	Kapan mulai ada bantuan sertifikasi pak?	Tahun kemarin, 2016. Karena kan kalau tanaman tahunan itu 3 tahun, tapi kalau tanaman musiman itu cukup 1 tahun. Apa itu namanya, konversi lahannya. Jadi mulai penilainnya itu mulai lepas dari kimia itu dihitung nol, itu 1 tahun ya, baru tahun kedua langsung bisa disertifikasi. Kalo tanaman buah kayak jeruk, apel, itu 3 tahun, atau minimal 1,5 tahun baru bisa disertifikasi. (1A)	Bantuan sertifikasi organik yang difasilitasi oleh distanhut baru terlaksana pada tahun 2016. Adanya jenjang waktu yang diperlukan dalam menkonversi lahan dari konvensional ke organik membutuhkan waktu paling tidak 1 sampai 1,5 tahun tergantung pada jenis komoditas yang ditanam. Penilaian konversi berhasil dihitung	Sertifikas i organik

				setelah lahan benar-benar murni organik sampai setahun, baru masuk tahun kedua dapat dilakukan sertifikasi organik.	
		Bagaimana mekanisme alur sertifikasinya?	..Sertifikasi organik itu bukan hanya proses produksinya di lahan saja, tapi juga meliputi proses administrasi, antara lain yaitu pencatatan, kemudian status tanahnya, luas tanahnya, sejarah lahan, ada general sistem CSnya, banyak sekali. Itu harus lengkap, itu wah dokumennya tebal itu. Kemarin yang 4 itu aja petani ga mampu, kita bantu dari tim di lapangan. Ada BPL (badan penyuluh lapang) dan staf kita dari dinas itu membantu untuk administrasinya itu tadi. Karena walaupun dia sudah bilang organik sampai ada bukti labnya, tetapi kalau catatan administrasi tadi tidak dipenuhi, itu juga tidak lolos. Karena administrasi tadi itu malah penilaian yang hampir 100% oleh LSOS (lembaga sertifikasi organik selolima), kurang lebih lembaganya ada 8 di Indonesia itu. Jadi LSO yang telah diakreditasi oleh KAN Kementerian Pertanian. Jadi pembagian region yang berhak melakukan sertifikasi. (1A)	Standar mekanisme organik tidak ditentukan sendiri oleh distanhut Batu melainkan oleh LSOS (Lembaga Sertifikasi Organik Selolima) sebuah lembaga yang telah diakreditasi oleh Kementerian Pertanian. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan sertifikat tidak hanya dari segi proses produksinya saja, melainkan meliputi proses administrasi seperti pencatatan, status tanah, luas tanah, sejarah lahan, general sistem CSnya. Semua dokumen tersebut harus lengkap. Jadi meskipun hasil lap produk telah 100% organik tetapi jika persyaratan administrasi kurang maka akan dianggap gugur sertifikasinya.	
12	P. Yusuf: Kabid Organik	Sejauh ini, ketika masih	Kendala utamanya dulu itu karena awal-awal tahun, awal-awal tahun organik	Kendala utama yang dialami distanhut adalah	Kendala utama percobaan

	Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	percobaan di 5 desa, apa kendala utama yang dihadapi pak?	kita, itu tadi sistemnya masih belum seimbang, jadi masih banyak mengandung kimia di tanah. Jadi produktivitasnya kita tahun pertama itu masih rendah. Kan nanti tahun pertama 50% tahun kedua sudah 70 sampai 90 persen, tahun ketiga sudah pulih lagi seperti normal. Itu dulu kan di target 10 ha, tapi sekarang ga, yg penting ada, untuk sekarang 2000 dulu, karena untuk 10 ha itu ternyata berat juga. Banyak orang itu sudah kita bantu saprodi bibit, tapi ya alurnya balik lagi tetep pakai kimia. Ya gimana, kejujuran petani juga susah. Tapi memang tidak semua petani, ada yang memang dia commit ada. Itu kan repot kalo banyak orang gitu, tapi tetep ada yang commit tetep sampai sekarang. (1A)	masalah konversi lahan yang berakibat pada menurunnya produktivitas lahan di tahun pertama. Hal ini mengingat strategi penerapan yang dipakai dinas adalah progresif 50% di tahun pertama, hingga 70-90% ditahun kedua. Hingga di tahun ketiga sudah pulih normal. Selain itu banyak petani yang sudah dibantu saprodi tetapi akhirnya kembali lagi memakai bahan kimia. Kejujuran petani juga menjadi permasalahan tersendiri bagi dinas, meskipun tidak semua petani demikian.	n kawasan organik
13	P. Yusuf: Kabid Organik Distanhut (1A) 27 Jan 2017 13.12 WIB	Bagaimana dinas bisa tahu apakah petani yang menanam organik adalah anggota dari kelompok tani? Atau apakah petani yang ingin menanam organik harus jadi	Kalo dari kita, itu harus gabung kelompok tani dulu. Tidak bisa kalau di luar kelompok tani. Tapi selain dari program pemerintah, memang ada petani-petani yang secara swadaya dan perusahaan-perusahaan yang mengembangkan pertanian organik. Misalkan yang sudah terbesar sejawa timur Herbal Orchit, terus PT. SYU di Giri Purno itu produsen terbesar ketiga organik. Kalo yang nomer 2 figur kota malang. Banyak yang juga individu, maksudnya yang tidak masuk kelompok tapi	Syarat untuk dapat mendapatkan hibah saprodi dari distanhut bagi petani yang akan menanam organik terlebih dahulu harus bergabung menjadi anggota kelompok tani, atau setidaknya membuat perhimpunan untuk dapat membentuk kelompok petani. Jadi bagi petani yang berada di sekitar kawasan organik dan	Status petani kelompok dan di luar kelompok tani dalam program kawasan organik.



		anggota kelompok terlebih dahulu untuk dapat subsidi atau hibah?	mereka mengembangkan sendiri juga banyak, sudah jadi perusahaan lah. Jadi sudah sampai nyuplai ke Surabaya, sejawat timur lah. (1A)	berminat untuk menanam organik harus terlebih dahulu bergabung atau swadaya membentuk kelompok.	
--	--	--	---	---	--

Nama Penyuluh: Mas A'an

Jabatan: Pendamping/ Penyuluh Pertanian Desa Sumberbrantas mulai 2010-sekarang

Tempat dan waktu: Kantor Balai Penyuluh Pertanian Batu/Senin 10:15 WIB

Note: P: Peneliti/Sago

J: Informan

P: tolong jelaskan awal mula pertanian organik di sumberbrantas dan dinamikanya?

J: kalo dulu pertanian organik mulainya tahun 2011, terus seiring berjalannya waktu kan banyak dinamikanya. Ada kegagalan dan lain sebagainya. Tahun 2011 kita mulai, tahun 2012 off karena ada sesuatu, terus 2013 mulai lagi. Jadi kita sumberbrantas itu mulai pertanian organik itu mulai 2011, 13, 14, 15, 16, dan sekarang. Nah goalnya, tahun ini kita sertifikasi organik.

Memang banyak dinamikanya, diantaranya ya kegagalan dan sebagainya. Sampai detik ini pun pemasaran masih belum efektif. Tahu sendiri kamu kan, sekarang tak tanya. Sekarang kalo masyarakat umum beli sayur milihnya yang organik atau yang konvensional? Konvensional kan pastinya. Itulah karakteristik masyarakat Indonesia. Pemahaman terkait produk-produk organik itu masih minim. Mereka kepinginnya gini, dengan uang sedikit kalo bisa beli bahan beli sayur itu dapet banyak gitu loh. Seperti itu karakternya, tapi mereka tidak akan berfikir bahwa dengan beli sedikit tapi sehat itu masih belum, yang sudah berfikir seperti itu adalah kalangan menengah ke atas. Mereka berani beli produk-produk yang organik bahkan yang ramah lingkungan dengan harga tinggi, itu yang berani itu menengah ke atas kalo menengah ke bawah orientednya itu dengan uang sedikit sayurnya itu maunya dapat banyak. Jadi pemahaman masih di situ dan kalangan menengah ke atas itu asupannya masih sedikit. Sekarang kita punya produk organik belum panen ini, pure organik itu, kita sudah melalui proses konversi, itu mereka bingung menjualnya. Jadi permasalahan di bawah itu tidak ada pasar, belum tertata.

Kalo kita ngomong organik, pasar harus jelas dulu. Di kala kita biaya operasionalnya diorganik itu ada kendala hal tak terduga terus tidak panen. Andai kata panennya 50% dari kebiasaan kita katakan, mereka seperti apa? Bingung juga toh. Sebelum kita melangkah ke organik tak beri gambaran dulu. Jadi kita memulai organik tahun 2011 pasar belum jelas dan settingan cara budidaya organik itu masih meraba-raba. Walaupun toh sekarang dosen, entah itu dosen unmu, UB, dan sebagainya ngomong gampang-gampang, toh kenyataan itu berbeda. Ini ada namanya prof indhar dari unmu ngomong "pertanian organik itu mudah", prakteknya dimana? Kita bingung. Katanya di banyuwangi ada, tetapi spesifik lokal itu tidak bisa disamakan gitu loh, contohnya gini, pertanian di Banyuwangi



akan berbeda dengan pertanian di batu, apa yang diterapkan di batu juga belum tentu dapat diterapkan di Banyuwangi dan sebaliknya, seperti itulah kendalanya. Katakanlah orang ngomong mudah-mudah-mudah, dikala ok mudah, tapi saat praktek lapangan belum tentu. Itu yang pertama.

Terus yang kedua, masalah pasar. Wiih kita punya pasar gini-gini-gini di sini ada di sana ada, oke kita layani. Sekarang saya punya wortel itu kalo panen 1 samapi 2 ton, siapa yang mau menyerap segitu? Wong saya telusuri pasarnya, permintaan 1 minggu itu 30-50 kilo, Itu permintaan dengan jenis tanaman yang berbeda. pusing gak? Sedangkan petani itu tidak mau ribet di situ, buat nata lahan itu. Petani kebiasaan hamparan, langsung loss. Sekarang produk-produk organik saya itu dijual ke tengkulak dengan konvensional. Kita nunggu pasar lama, jual konvensional. Asalkan mereka gak rugi terlalu jauh. Settingan saya cuma satu, biasanya mereka pakai kimia dengan produktivitas sekian misalnya 1 gawang=400m katakanlah keluar 1-2 ton maksimal, kita settingan organik baik nutrisi dan sebagainya itu keluar minimal 1 ton. Biar costnya itu maksimal. Kan sekarang dengan pemakaian konvensional kan pemakaiannya tinggi toh, jadi kita masuk organik itu kita menekan penggunaan kimia bahkan gak pakai itu kalo bisa panennya agak lebih jauh dari yang konvensional, hampir miriplah. Jadi meskipun itu dijual umum itu gak masalah. Karena selama ini kita jual umum, karena pasar belum siap. Kalo pasar belum siap mau gimana? Barang sudah ada.

P: siapa aja tadi yang akan disertifikasi dan kapan waktunya?

J: tahun ini, ada 3 petani yang akan disertifikasi. Pertama yang dikelola oleh kelompok, kedua di lahan miliknya pak joni, itu yang dikelola kelompok itu miliknya pak joni, yang ketiga di lahannya pak prawito. Jadi 3 lokasi. Memang dampak pertanian organik belum 100% mengembang, karena itu, oriented masyarakat mengah ke bawah itu masih kepinginnya dapat barang banyak dengan biaya yang sedikit. Sekarang saya mulai melalui pemahaman kelompok wanita, ayo bu kita sekarang berusaha konsumsi keluarga itu disuplai dengan tanaman kita sendiri, dengan cara pekarangan kita manfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Kalo disitu nanam tomat, lombok, dll itu budidayanya murni organik untuk mereka sendiri, seperti itu.

Saya termasuk fasilitator organik, saya dapat sertifikatnya. Jadi saya termasuk fasilitator organik plus inspektor lembaga sertifikasi organik selolima/lesos pernah denger gak. Saya dapat 2 sertifikat berkaitan dengan kompetensi.

P: tolong ceritakan secara detail alasan dikeluarkannya kebijakan pertanian organik, terdapat permasalahan apa saja dalam pertanian konvensional sebelumnya? Setelah pertanian organik dimulai sejak 2011 hingga sekarang terdapat kendala apa saja, tolong diceritakan secara rinci?

J: sebenarnya kalo kamu anak pertanian pasti kamu akan tahu yang namanya revolusi hijau. Revolusi hijau itu tahun 90an. Itu tahun 80an kita sebenarnya sudah organik kalo gak salah, itu dulu sudah ramah lingkungan bahkan organik sebelum revolusi hijau. Setelah revolusi hijau, mereka dikenalkan dengan pestisida pupuk kimia dan lain sebagainya, itu alasan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Masuk batu pun sudah bertahun-tahun, ya kira-kira 90an, 80an sudah masuk. Terus diibaratkan kita itu back to nature kembali ke dulu tahun 80an. Sekarang tahun 2010an itu proses mengawali pertanian organik, itu ada beberapa titik, 3 kalo gak 5 titik termasuk desa sumberbrantas. Nah seiring berjalannya waktu, memang awalnya pemerintah batu, gini loh kota batu itu

diibaratkan kota kecil dibandingkan kabupaten ada 33 kecamatan, di batu cuma 3 kecamatan junrejo, batu dan bumiaji, termasuk kota kecil. Kalo wisata kita sudah go internasional bahkan satu-satunya wisata kemarin difloorkan oleh walikota termasuk wisata gak ada yang bandingi itu batu. Batu masuk urutan kedua, tapi secara konsep menang. Dari 3 kecamatan dengan luasan yang kecil. Akhirnya pemerintah berfikir bagaimana memajukan pertanian. Kalo dari segi kuantitas kita kalah, kuantitas jumlah, misal kentang kita punya lahan sekitar 380ha dibandingkan dengan Tosari Bromo yang ribuan hektar. Dari segi kuantitas kita kalah, tapi kalo dari segi kualitas kita menang. Coba kalo kita beli kentang tosari dan beli kentang di sumberbrantas, sama-sama kentang berapa lama tahannya kalo tosari, dia gak sampai 1 bulan sudah busuk, kalo sumberbrantas saya sudah membuktikan sendiri kalo 2-3 bulan itu masih bertahan asal jangan kena air. Dari segi kualitas kita menang tapi dari kuantitas kita kalah karena terbatasnya lahan pertanian. Akhirnya pemerintah itu berfikir, punya konsep, bagaimana dengan luasan yang kecil, petaninya bisa makmur. Akhirnya pemerintah menghembuskan program namanya organik, yang notabene satu-satunya yang ada di indonesia itu 2010. Kamu buka reverensi pertanian organik pertama kali itu ada juga Bogor ada namanya yayasan Agato dengan konsep yayasan jadi buka dari petani lokal. Akhirnya batu memulai di tahun 2010 itu konsepnya masih meraba-raba, efeknya petani ada yang gagal panen ya kan. Karena settingan organik belum sempurna. Katakan gini, masih terlalu mendadak bagi petani karena bukan kebiasaan rutin para petani, karena itu gini, nutrisi organik itu harus tepat, akhirnya petani bingung. Kalo di pertanian organik, kita lepas dari kimia itu konversinya ke apa itu harus jelas dulu, kita lepas pestisida kimia kita konversinya untuk menutup pestisida kimia itu apa gantinya, harusnya pestisida organik, agen hayati dan sebagainya. Terus nutrisi, kita lepas dari pupuk kimia, itu gantinya apa harus jelas, karena kalo tidak jelas hancur pasti. Syukur nanam-nanam tok dibiarkan gak bisa, sakno dek'e jadi itu yang terjadi di tahun-tahun pertama. Terus mintanya, luasannya terlalu luas, waktu itu 10-15 hektar pertitik.

P: siapa yang menentukan titik atau kawasan organik?

J: "ini nanti off the record ya". Dinas. Jadi katakanlah, namanya pimpinan, bisa tidak bisa harus kamu laksanakan, akhirnya dilaksanakan. Nah hamparannya terlalu luas, jadi polemik, dan mintanya satu hamparan itu masalahnya. Contoh, saya minta hamparan itu 10 hektar, ok kita ambil 10 hektar, di dalamnya itu macem-macam orang karakteristik orang itu macem-macam, dinamikanya tinggi dan 1 hamparan ini ada yang tidak ikut kelompok tani. Kalo di luar kelompok tani saya sebenarnya tidak bisa menghandel begitu loh, akhirnya ya digebyah uyah bantuannya, pokok'e ndek hamparan iki dike'i. Dikala ada kegagalan, bengok iki. Siapa yang mau disalahkan? Katakan kamu kebiasaan panen sekian, terus kamu separoh saja bahkan gak panen, yang kamu salahkan siapa? Pasti yang melaksanakan, yg nyuruh, ya kan. Mbalek ke saya lagi. Itu awalnya, karena hamparan terlalu luas. Dikala mereka panen mau dibuang kemana, 10 hektar untuk kentang itu 25 ton, siapa yang mau menyerap 25 ton? Wis anggep 15 ton, siapa yang menyerap? Belum sawi, itu 60-70 ton. Belum wortel, wortel 30 ton, siapa yang mau menyerap? Itu hamparan terlalu luas, dan saprodinya itu kalo dihitung hitung itu tidak cukup. Saprodi bantuan dari dinas itu gak cukup, dan bantuan dari dinas itu cuma untuk 1 kali musim tanam, selanjutnya mereka suruh nyari sendiri.

Sedangkan waktu itu masa transisi jadi mereka yo bingung tah. Akhirnya mereka mbalek lagi (konvensional)

P: perbandingannya bantuan sprodi itu bagaimana? Adakah perhitungan tertentu dalam satuan luasan hektar lahan masing-masing petani?

J: ya dikasih gtu aja, gratis. Itu tidak sesuai dengan luasannya loh. Dengan luasan segitu, dinas cuma mengcover berapa, akhirnya yo ga cukup gitu loh. Jadi gak sebanding, ditambah itu cuma 1 kali musim tanam tok. Itulah yang menjadi dinamiknya, akhirnya mereka gagal panen, mereka minta kompensasi dinas, mbulet ae wis rame akhirnya.

Terus kalo kita ngomong organik, itu mulai on farm sampai off farm itu. On farm itu gini, benihnya itu harus organik, kan sulit beli organik. Soalnya di dalam kemasan benih pabrikan itu masih ada perlakuan kimia, fungisida. Jadi on farm itu mulai budidaya sampai panen itu harus jelas, sampai off farm pasarnya itu juga. Sekarang katakan 10 hektar, pasar itu loh durong onok posisine, saprodine mek mengcover separoh, itu tahun-tahun awal 2011, 2013, dan seterusnya pun seperti itu terulang.

Kalo konsep saya sendiri, kita pasti terbentur dengan kebijakan konsepnya. Sekarang kita gini, gausah muluk-muluk, kita setting organik bener-bener jadi dengan luasan sedikit dulu, sekalian kita cari pasar. Itu konsep saya. Daripada luas-luas tapi gak jadi. Ini sekarang saya luasan kurang lebih 3000 meter yang mau disertifikasi tidak sampai 1 hektar. Yang penting jadi dulu, sertifikat turun, sekalian kita cari pasar. Dikala pasar ini berkembang, kita perlebar luasannya, jadi enak gitu loh. Sekarang segini, pasar masih cari yo, dikala pasar ini melebar, asupannya nambah-nambah, kan pasar gak cuma 1, nah kita baru nambah luasan, deer pasar jelas. Nah ini pasar durong jelas, terus arep diguwak ningdi ya kan?

P: siapa saja (pakar pertanian) yang terlibat dalam pelaksanaan program organik?

J: kita sebenarnya brawijaya kita libatkan, tapi sebatas mana mereka bergerak gitu loh. Mereka bergerak cuma sebatas sosialisasi setelah itu evaluasi, terus lapangannya gimana. Mosok dibrukno karo penyuluh kan gak mungkin toh. Itu visi-misi kota e, tapi kenyataannya tim gak jalan gitu loh permasalahannya.

P: timnya siapa aja yang termasuk di dalamnya?

J: timnya buanyak dulu, ada teknisnya yang dari brawijaya, dari unmu, dinas juga saya termasuk. Lengkapnya data ada di dinas. Jadi selama ini pendampingan dibrukne ndek penyuluh. Walaupun toh endingnya jadi, itu hasilnya penyuluh bukan dari tim. Meskipun timnya banyak tapi kan gini, mereka cuma sebatas tim gitu loh. Turun ning lapang, kon dampingi ae, permasalahannya seperti apa bingung mesti. Mereka cuma sebatas sosialisasi, ngomong ya dosen kan tahu sendiri gini-gini-gini, selanjutnya selesai mereka, uangnya masuk mereka hehe, selesai, evaluasi terus. Evaluasi ditoto wisan, asal bapak senang. Jadi permasalahannya kompleks, akhirnya mbalek di penyuluh, yok opo sih kita seng bendino ketemu ya, yowis. Andai kata ada kesuksesan pertanian organik di wilayah saya, bukan dari mana-mana, karena kita yang nyetting bukan dari orang lain. Andai kata ini, sekarang kan konsultannya dari Unmu prof. indhar, andai kata dia buat tulisan jurnal, tak guyu, cari nanti kalo ada jurnal pertanian organik terus dia tulis ada desa sumberbrantas, tak guyu mek, an walaupun dia sekelas profesor. Dia gak turun, wong yang disuruh turun kan seperti kamu ini mahasiswanya, kalo dia sendiri yang turun saya akui pantas.



Sekarang gini, kita gak bahas pendampingan karena gak jalan. Saya itu sempet ngonsep pertanian organik itu harus jadi walaupun seperti apa. Saya ambilkan tiga titik itu, saya menyiapkan namanya PPAH (Pusat Pelayanan Agen Hayati) kalo kamu anak brawijaya tahu pasti, kalo kamu pertanian tapi. Itu tentang hama penyakit, jadi disitu kita ngembangkan mikro organisme untuk melawan organisme penyakit. Pupuk hayati, agen hayati, kita yang ngembangkan, dari saya. Eh ndilalah anak'e pak joni itu lulusan HPT pertanian, tak gandeng pisan. Jadi kita punya tim sendiri, selain itu kita berusaha untuk membuat pestisida nabati, tak ajarin semua. Jadi dikala kita sudah keluar dari kimia, konversinya jelas, saprodinya jelas sampai seperti itu. Sampai kemarin kita nyewa, nyewa lahan miliknya pak joni kita organikkan. Jadi di tiga titik tadi itu. Kesuksesan bukan dari tim(dinas), mbalek lagi. Ketika sukses, itu nanti pasti ada yang ngakui, terserah itu. Yang ngakui sopo? Ya yang berani ngakui, ya kan. Ya kita harus legowo ae wis, urusane wong akon-akon.

P: proses konversi itu sebenarnya seperti apa? Karena sudah dari 2011 tapi hingga sekarang kenapa belum nampak hasilnya? Tolong digambarkan dg jelas

J: ya banyak faktor masalahnya. Menurut saya pada kebijakan tidak salah karena sudah mengarah ke pertanian organik, pertanian berkelanjutan gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, pasar kan belum jelas. Gini wis, tak kek'i ben gambarane jelas, simple ae. Gini, petani itu gak usah dibantu ya, apapun gausah dibantu, tapi pasare jelasno sek. Contoh selama ini kan harga wortel atau kentang, kentang itu 6-7ribu sudah tinggi itu, wortel 10ribu itu sudah tinggi. Wis diundakno dari kentang 7ribu, rata-rata dibuat 12ribu wis, wortel 10ribu wis gaween 15ribu, pasare jelas sek tapi, mereka pasti akan berbondong-bondong sendiri. Tapi iki njaluk organik, gausah dibantu wis, iki loh wis buingung wis petani. Mereka akan cari tau cara bertanam organii dengan sendirinya pasti, belajar dewe. Wis talah saiki iku ngene ae, petani diajangi seng ombo, pasare dijelasno sek, gausah dikongkon mesti wis pindah organik dewe. Tapi kejadian sekarang kan pasar durong onok gitu loh, mereka wis kudu diorganik iku koyok opo, dibantu macem-macem. Adapun pasar siap, itu loh jumlahnya terbatas gitu loh. Sak minggu butuh 50kg, apane gak posing a tambah wong-wong. Ngature iku loh piye sak minggu iso ngetokne sak mono iku loh piye, ngono loh. Metak-metakno ikuloh wong-wong sek kangelan, gak terbiasa dengan caraseperti itu. **Yok opo terus, saiki tengkulak dewe butuhe lahan seng ombo, sedangkan pendampingan program sek durong jelas, kan yo repot.** Intine permasalahan poko ke iku, pasare.

Jadi gini, konversi iku seperti ini, butuh waktu dan beda-beda tergantung jenis komoditas tanamnya. Kalo sayur itu butuh 1 sampai 1,5 tahun, kalo untuk tanaman tahunan seperti jeruk dan lain sebagainya itu minimal 2-3 tahun, kalo untuk tanaman di polybag dikala dia sudah ganti tanah dengan perlakuan organik dia sudah asli gak butuh 1 tahun di polybag. Jadi tahapannya gini, konvensional-semi organik-konversi-organik.

P: apakah dampak negatif pertanian konvensional juga dirasakan di Sumberbrantas? Tolong ceritakan

J: yang pegang data pasti untuk itu dinas kesehatan, bahkan uji lab pada darah juga dilakukan, gak cuma air, tanah, dan produk pertanian. **Gini loh, residu itu ada yang rendah juga tinggi. Yang paling tinggi itu justru malah yang nyampur di air itu bukan yang ngompres (nyemprot). Makanya disarankan pakai masker.**

Contohnya ini, brokoli yang konvensional itu kalo perlakuannya pake konvensional itu meskipun dicuci gak akan bersih dari residu, kalo kentang tetep enak karena dikupas.

P: bagaimana cara mengetes residu pada lahan pertanian?

J: kalo disumberbrantas itu enak, karena air irigasinya pakai langsung dari sumbernya, jadi kontaminasinya minimal, yang bahaya malah yang lahannya berada di bawah sumberbrantas karena dibawah pakai air sungai. Kalo disumberbrantas nyemprot, airnya terbawa sungai yang dipakai lahan di pertanian di bawah sumberbrantas kan residu itu. Jadi perlakuan air disumberbrantas itu tidak banyak, malah hampir tidak ada. Kalo di bawah, harus pakai perlakuan air atau water treatment. Water treatment itu gini (ada keterangan gambarnya), jadi aliran pertama irigasi harus dibuat 2-3 kotak/kubangan kecil itu dialiri air irigasi terlebih dahulu, kedua kota dalam lahan tersebut diisi ikan, bisa juga dikasih tanaman azola atau bisa dengan enceng gondok (mampu menyerap kimia), kemudian dilihat jika ikannya hidup makan tidak ada kontaminasi atau residu, tetapi jika ikan mati maka dapat dipastikan residunya tinggi dan itu langsung dicoret tidak lolos organik.

P: bagaimana proses sertifikasi organik? Tolong jelaskan

J: pertama petani itu harus tahu SOP budidaya organik, petani harus punya pencatatan budidaya organik, mulai dari dia semi-konversi-hingga organik. Kemudian dia harus punya komitmen di pertanian organik karena kalo sampai dia ga punya komitmen nanti pada akhirnya dia akan berubah kembali ke konvensional lagi. Jadi SOP, tahu budaya, komitmen, saprodi organiknya tahu. Sebenarnya buanyak syaratnya tebal, ada di data file saya, nanti kapan2 saya kasihkan. Terus kalo dia sudah ada konsumen, bahkan transportasi pun harus masuk dalam pencatatan, supirnya ngrokok apa tidak, sampai sedetail itu. Paling tidak yang perlu disiapkan petani itu cuma SOP, SOI (standar organisasi internal), AFN, komitmen dalam kelompok itu ada dalam SOP, dan masih banyak lagi.

P: Apa beda tugas tim teknis dan penyuluh? Siapa yang pegang data tim teknis

J: Tim teknis itu sopo? Selama iki kan cuma sebatas naskah. Datanya ada di dinas, minta saja.

Nama: (Bpk.) Prawito

Jabatan: Anggota Kelompok

Lama jadi petani: 27 tahun

Status Pertanian Organik: Proposal pengajuan sertifikat organik

P: Peneliti/Sago

J: Informan

P: Sudah berapa lama menjadi petani pak?

J: sekitar 27 tahunan

P: Kapan mulai organik pak?

J: **sebenarnya kita kalo pure organik itu, tidak lah. Tapi kita itu pernah nyoba itu istilahnya kita kuatir pasarnya.** Kan kita ini kita nyoba berkomitmen, istilahnya luasan sedikit kisaran 800meter tapi kita komit, istilahnya organik pure. Terus kalo perlakuan secara apa ya, kimianya, itu siang yang konvensional itu, kita usahakan itu kita mengurangi penggunaan pestidida kimia serta pupuk-pupuk kimia kita kurangi. Istilahnya kita tetep menggunakan kimia tapi kita kurangi.

P: Berapa luasan lahan yang mau disertifikasi?



J: kisaran 800 meter

P: komoditas tanamnya apa?

J: brambang prei, buncis, kemarin itu lobak, terusan sawi putih, kentang, wortel.

P: apakah itu pure organik pak?

J: ya istilahnya pure lah, hanya kita amati, tidak kita semprot. Kemarin itu yang lobak itu istilahnya apa tidak nyemprot sama sekali malahan. Tidak pakai nyemprot pupuk kimia, pupuk organik pure. Kalo istilahnya lobak itu kita tanam tidak dimakan ulat itu wis tetep panen.

P: kapan mulai dikenalkan organik disini, pak?

J: 2002 kalo tidak 2003 itu.

P: kalo yang sudah ada bantuan hibah bibit dan pupuk itu tahun berapa?

J: 2011 apa 2012 ya, kurang lebih. Yang jelas ancer-ancernya antara 2011-2012 itu. Sebenarnya itu, kita itu mengenal organik itu sudah lama. Dulu itu kita sudah ada namanya istilahnya SLPHT (Sekolah lapang pengendalian hama terpadu) itu dengan menggunakan musuh alami. Kan istilahnya kita tidak menyemprot musuh alami daripada hama. Dan sudah dikenalkan tapi kan namanya beda dengan organik. Tahun 2004 apa 2002 itu sudah ada, itu kita sudah dikenalkan cara perlakuan, istilahnya kita tidak membunuh hama dengan pupuk kimia, tapi istilahnya kita berusaha membuat atau mengembangkan istilahnya musuh alami.

P: sebelum luasan 800meter yang akan disertifikat, berapa luasan awalnya pak?

J: itu dulu luasan 1600, sekarang ada butuhnya kita kurangi kisaran luasan 800 tadi.

P: apa alasannya dikurangi pak?

J: ya sebagian dibuat gudang, dibuat rumah. Jadi kita untuk, kebetulan dekat rumah jadi kita istilahnya, kita upayakan ini yang 800 kita upayakan organik.

P: Tolong ceritakan perbedaan organik dengan konvensional?

J: kalo misal kita itu wortel ya, kemarin yang kita coba wortel itu warnanya cerah merah terus rasanya masih mentah itu kalo kita bandingkan dengan yang konvensional itu khusus wortel itu renyah enak manis itu. Itu kalo wortel, kalo yang lain-lain itu saya kira butuh kita masak, saya kira hampir sama. Hanya kadang kalo yang konvensional itu kan kasat mata warnanya menarik bagus. Beda dengan organik, kalo organik kan gabisa cara yang bagus itu. Kalo untuk yang brambang prei itu ya hampir sama saja, buncis sama. Kalo yang saya tahu hanya wortel itu yang rasanya berbeda.

P: Apakah ada perbedaan keuntungan antara bertanam dengan konvensional dengan organik?

J: kalo saat ini kita rata-rata masih konsumsi sendiri yang organik itu sendiri, istilahnya tidak dikomersialkan. Tetangga minta ya monggo, wong istilahnya itu belum kita komersialkan.

P: jika sudah disertifikasi akan dijual kemana? Adakah bantuan dari dinas atau kelompok?

J: mungkin pak mo siap bantu kemarin, pak masyudi siap membantu produk organik. Istilahnya itu kan kalo program orgaik itu mintanya kontinu, itu yang kita kesulitan. Meskipun sedikit kan istilahnya tiap minggu ada tiap hari ada, semacam itu itu kelemahan kita yang belum berani itu. Dan kita juga was-was, kalo misalnya perlakuannya sama, harganya sama, ya lebih baik kita konvensional.

P: kemana hasil panen dijual untuk sementara ini pak?

J: ya ke pemborong, tengkulak sini. Contohnya kemarin lobak itu kita jual ke pasar, pasar bawah.

P: apakah ada perbedaan harga antara konvensional dan organik selama ini?

J: sama.

P: terus apa keuntungan pindah ke organik jika harganya sama pak?

J: makanya kita kan masih istilahnya kalo sudah. Kan informasinya semacam gini, kalo nanti kita sudah menangani luas, pasarnya jelas, harga itu katanya beda. Makanya kita itu, apa itu istilahnya belum merasakan dari hasil organik. Kita penjualan masih konvensional. Tapi kalo pak masudi sudah punya link untuk pasar organik.

P: apakah sampai saat ini pasarnya belum ada? Atau belum difasilitasi oleh dinas?

J: belum ada. Dari awal dulu belum ada. Makanya kita itu ragu-ragu, ya apa itu karena harganya sama saja. Kalo harganya itu selisih gitu, kemungkinan petani beda. Misalnya kita perlakukan secara organik ya, misalnya kentang, kentang itu kalo tidak dipupuk kimia, hasilnya juga jauh. Misalkan gini, kita perlakukan secara konvensional gitu.

P: tolong jelaskan lebih rinci perbedaan pola tanam organik dengan konvensional, dan alasan petani tetap pada pertanian konvensional karena harga jual yang masih sama?

J: kalo wortel itu tidak jauh beda ya, hasilnya sama mungkin selisihnya sedikit. Mungkin kita perlakuan, pengamatan kalo wortel itu secara tanam, nyemprot gitu 2-3 kali ditinggal sudah panen. Kalo organik kan kita terus ngamati, istilahnya kan kita apa namanya kapan nyemprot, tanaman butuh disemprot apa tidak kan gitu.

P: kalo organik apa juga disemprot ya?

J: ya disemprot, tapi obatnya khusus organik, ada pestisida organik dan lain-lain. Kalo kita menggunakan urine kelinci, setelah kita mix itu pertumbuhannya cepat, jadi daun itu wortel kentang itu cepat.

P: apakah ada selisih modal bertani konvensional dengan organik?

J: kalo kita itung-itung butuh banyak biaya yang konvensional, akan tetapi kalo kita itung-itung hasilnya itu lebih banyak yang konvensional. Misalnya untuk kentang itu ya, 1 gawang itu bisa 1 ton itu, kalo organik itu cuma 4 kwintal – 5 kwintal. Itu pun kecil-kecil gak besar-besar seperti konvensional dengan usia yang sama. Kita belum bisa menemukan formula untuk sementara ini untuk pembesaran organik kalium itu belum.

P: jika hasil panen sama-sama dijual di tengkulak dengan ukuran yang berbeda apakah harganya sama?

J: ya jelas beda. Mahalan yang konvensional daripada organik. Karena kalo yang konvensional itu nilainya dari ukurannya bukan kualitasnya, tapi dengan konvensional itu kita bisa menjaga kualitas ukuran dan warna produk dengan pemakaian pola obat yang berbeda gitu. Sementara yang organik belum menemukan formulanya.

P: Selain bapak yang sudah mau mengajukan sertifikasi, siapa lagi yang sudah berhasil pak?

J: belum berhasil. Ini itu masih rencana sertifikasi, kita mengajukan lahan 800 tadi untuk disertifikat karena sudah 1 tahun tidak digarap, tidak diapa-apain gitu. Jadi bero selama satu tahun, benar-benar dilepas dari kimia. Sementara ini ada 3 orang, selain saya ada pak joni, sama punya kelompok yang dikelola bersama.

P: kapan kelompok mulai mengelola pertanian organik?

J: sejak 2012an itu mulai ngelola. Dulu kawasannya lebih luas. Dulu itu anggotanya kurang lebih 22 orang, luasan 10 hektar, kita gak mampu, kita kurangi, anggotanya juga berkurang tinggal 12. Tapi kita tetep komitmen, kita istilahnya berusaha nanam organik tapi luasannya kita kurangi, yang jelas kita mau komitmen mau nanam beber-bener organik luasannya sedikit tapi pasti gitu.

P: siapa saja 12 orang yang bapak maksud tadi?

J: siapa aja ya dulu itu, saya, pak joni, pak masudi, pak agus, pak kaji to itu. Jadi kita semakin sedikit, berhubung kan kita termasuk kan gagal. Kita gagal itu karena pasarnya belum jelas. Jadi kita itu tidak berani itu karena, kalo sayur itu rata-rata mudah besar, apalagi kalo kentang, kita sudah susah-susah nanem, kita merawatnya sembrono, kita gulung tikar. Kalo kentang kan istilahnya modalnya luar biasa.

P: bisa tolong dijelaskan gambaran besaran biaya produksi kentang hingga panen pak?

J: misal kentang dengan luas lahan 1 hektar gitu ya. Modal itu minimal 70 juta. Untuk bibit yang tinggal nanam itu ya 1 hektar itu butuh 3 ton misalkan harga 15.000 itu wis 45 juta. Sewa tanah 1 hektar, 1 musim tanam itu kisaran 15-20 juta. Satu musim tanam itu kisaran 4 bulanan. Jika dikali setahun sewa tanah itu kisaran 50-60 juta. Belum pestisida. Itu pestisida kalo musim penghujan itu malah biayanya mahal kisaran 20-25 juta. Itu belum pupuk kandang, nyangkul, tenaga kerja dan lain-lain.

P: kalo untuk pupuk kandang dan lain-lain tadi bisa tolong diperinci lagi pak?

J: untuk pupuk kandang, rata-rata kisaran 300-350 ribu atau jika ditotal kisaran 7 juta. Untuk nyangkul 1 hektar itu kisaran  $3 \times 25 = 7,5$  juta. Pupuk kimia antara 7-7,5 juta kiasaran segitu. Luar biasa kan. Itu kalo bibit kentang harga sekarang 15.000, itu ada yang sampai 16.000.

P: untuk bibit apakah ada tingkatan kualitas yang membedakan harganya?

J: iya ada. Itu tadi yang punya saya itu kualitas standard itu G1, itu belum yang G2, yang G3, gak boleh segitu. Makanya kalo istilahnya nanam kentang itu seperti pengusaha gak bisa main-main karena modalnya sudah besar.

P: untuk hasil panen perbedaannya seperti apa pak antara konvensional dengan organik?

J: misalkan sekarang ini harga dapat penghasilan terendah untuk kentang itu misalkan 1 hektar itu hasilnya  $20 \text{ ton} \times 10.000 = 200$  juta, masih dapat segitu. Misalkan biayanya itu kisaran antara 70-100 juta kan masih ada sisa. Kadang ada kalo sampai buagus itu sampai 25-35 ton per-hektarnya.

P: apakah harganya itu stabil untuk kentang?

J: untuk tahun ini kebetulan stabil.

\*di sela-sela wawancara yang sedang berlangsung, ada kepala praktisi organik dinas (Bpk. Yusuf) yang datang dan menyela obrolan sementara waktu yang sekaligus saya sisipkan pertanyaan buat beliau. Berikut kutipan obrolannya:

P: berapa kisaran alokasi anggaran untuk pertanian organik kawasan pak?

J: kalo anggaran yang dulu awal-awal saya kurang tahu, kan sudah ganti pengurusnya.

P: apakah dinas memiliki rekam data tim teknis atau pelaksana implementasi organik di kawasan pak? Jika ada, apakah boleh diminta salinannya?

J: iya kalo dulu ada itu tim teknis. Kalo sekarang itu datanya tidak ada, kan sekarang itu kita limpahkan ke unibraw dan tahun ini unmuh. Dan sama evaluasi untuk tahun ini kerjasama sama unibraw. Jadi tim teknisnya yang sekarang itu tidak dari dinas.

Untuk data-datanya yang dulu itu sudah nggak ada hehe iya hilang, sudah gonta-ganti yang ngurusi itu dulu.

P: kisaran anggaran tahun ini berapa pak?

J: kalo yang tahun ini ada datanya, tapi DPAny jangan diminta. Tapi kalo cuma kisaran anggaran saja bisa itu datanya diminta. Kalo deskriptif aja bisa.

Tapi kan anu, misalkan di DPA itu ada sekitar 5,2 Milyar tapi untuk yang organik tidak sebesar itu, misalkan untuk saat ini itu organik 1,3 M itu aja yang untuk dibantukan ke kawasan. Anggaran ini untuk mendukung saja. Kurang lebih untuk tahun ini 1,3 alokasi hibah saprodi, sisanya kan untuk bantuan fisik ya berupa kompos, mesin dll. Kalo yang masuk ke kawasan ya 1,3M itu tadi.

P: apakah bisa minta salinan laporan kegiatan pertanian organik kawasan untuk 1-2 tahun ke belakang pak?

J: 2016 aja ya nanti mungkin di Hanik ada. Tapi itu nanti untuk anggaran tidak bisa diminta salinannya, kamu tulis aja deskriptif keterangannya bisa.

\*selesai ngobrol sampingan, petugas dinas pamit pulang semua ke pak prawito tuan rumah yang tempatnya digunakan untuk sosialisasi sertifikasi organik dinas.

Sekarang lanjut wawancara pak prawito lagi,

P: apakah harga 10.000 itu sudah paling rendah pak?

J: kalo harga terendah bisa 5000. Itu pas panen raya. Dadi pas masa panen sak jawa niku, kalimantas, Sulawesi panen, jadi permintaane sedikit terusan hasilnya mbludak.

P: pada bulan berapa panen raya berlangsung pak?

J: biasanya panen raya itu antara bulan 2 sampai bulan 5. Tapi kebetulan tahun ini harganya stabil yang nanam kentang hanya sedikit.

P: terus kalo hitung-hitungan jika menanam dengan cara organik seperti apa rinciananya? Tolong ceritakan

J: organik mungkin ya kalo penjualannya konvensional ya malah jauh. hasilnya mungkin bisa 10 ton untuk 1 hektarnya. Harganya mungkin kalo dijual secara konvensional mungkin di bawah 10.000 kan ukurannya lebih kecil, kan istilahnya pebeli itu sesuai ukuran. Kalo ukurannya agak kecil ya harganya turun. Kalo misalnyanya ukurannya lebih besar ya harganya juga tambah naik kan gitu. Disitu misalkan 10.000 gitu untuk harga yang dibawahnya itu mungkin antara 8000-9000 kalo harga rata-rata sekarang yang 10.000 itu.

P: apakah itu sudah termasuk perincian operasional seperti yang konvensional tadi seperti sewa tanah dan lain-lain tadi?

J: ya tetep sama. Mangkanya kita kan istilahnya penjualan kita istilahnya kalo penjualan organik misalkan 15.000 gitu, kita berani ngejar. Asalkan pasar berani ngasih harga segitu yang organik kita pasti berani.

P: saprodi yang dibantu dari dinas itu apa aja pak?

J: kalo untuk nyemprot itu hanya PDPF, terusan semacam pestisida nabati, pupuk padat, benih juga. Tapi kalo pestisidanya misalkan yang bantuan buat nyemprot itu ya kurang banyak itu. Kan hanya untuk stimulant aja.



P: berapa kira-kira bantuan dalam 1 musim tanam dari dinas itu?

J: istilahnya gini ya, kita tidak menutupi e.. bantuan ya. Kalo kita sudah dapat bantuan. Anggota kita misalkan 20 gitu, kita bagi istilahnya sama-rata meskipun istilahnya nanti kita perlakukan organik yang A-B-C gitu, yang C-D-E itu kita bagi rata meskipun tidak organik. Jadi istilahnya kita itu jaga, komitmen lah kita bondo sendiri nantinya.

P: jadi per-anggota kelompok tadi dapet berapa bantuan hibah biasanya?

J: kita itu dikasihnya 1 tahun hanya sekali, istilahnya apa ya, kita kemarin dapat bantuan benih kentang gitu. Kentang itu ditandurkan gitu, kita bener dapat benih sertifikat tapi mutunya kurang bagus. Beda kalo kita mengusahakan sendiri meskipun tidak sertifikat tapi kita tahu oh ini bibit bagus ini tidak. Kalo bibit didatangkan dari luar, ditenderkan, ya otomatis bibit yang didatangkan dari luar ya otomatis kualitasnya ya tidak terjamin, berkurang lah. Bibit bantuan ya tetap dipake, tapi ya rata-rata gagal. Akhirnya yang dipake ya yang masih bagus itu kita tanem lagi gitu, banyak yang busuk rata-rata yang bibit bantuan itu.

P: apakah ada ketentuan komoditas tanaman untuk bulan-bulan tertentu dalam setahun?

J: ya istilahnya gak pasti. Soalnya apa ya, disini tidak terpengaruh musim. Jadi istilahnya kita bisa mrediksi oh kalo bulan ini panennya sing apik harganya ini. Jadi kita tidak terpancang dengan bulan tahun ini harus nanem ini dibulan tertentu, tapi berubah berubah. Kita nanemnya disini macem-macem. Kita termasuk disini lahannya sedikit kisaran 350hektar, terus pemilik lahannya kan juga orang banyak, ya istilahnya yang luas hanya orang-orang tertentu, itu kita nanamnya macem-macem. Disini pasarnya deket-deket, banyak pasar disini, ada yang dijual ke karangploso, pasar batu, ada yang dibawa ke pacetan. Terus untuk wortel sama kentang kan kualitasnya paling bagus itu biasanya untuk kiriman ke Kalimantan. Jadi kita itu pasar-pasar itu untuk mutu sama kualitas itu kita pasarkan ke Kalimantan. Jadi kita untuk pasar-pasar yang pendek-pendek itu kita bisa jaga pasar harga, kita bisa ngatur, bisa mengendalikan.

P: tengkulaknya dari mana pak?

J: yang ngambil itu tengkulak, tapi orang-orang sini saja. Kita kenal semua. Terus kalo pada bulan-bulan tertentu kita nanamnya juga rotasi tidak monoton satu jenis tanaman terus. Gonta-ganti terus, gak nentu macem-macem. Jadi kita punya lahan di 3 lokasi itu dengan jenis tanaman yang beda-beda. Jadi misal di lahan 1 itu harganya jatuh, mungkin ditempat yang lainya lagi masih dapat untung.

P: apakah tidak ada fasilitas bantuan pemasaran dari dinas?

J: mboten.

P: jika tidak disiapkan pasar, bagaimana awalnya mengenalkan organik ke petani waktu itu pak?

J: mangkane iku, kalo organik kita istilahnya kita hanya gawang, ga berani ngomong hektar itu ga berani. Gawang itu kisaran luasan 400m persegi. Dulu kan kesepakatan 10 hektar, cuma pertama itu 22 hektar kita data itu kira-kira 2011-2012an gitu. Tak pikir 22 hektar itu dapat bantuan semua, ternyata yang dapet bantuan hanya pojok-pojok e tok. Jadi pemilik lahan yang 1 hektar itu dapet jatah sekian kilo-sekian kilo gitu biasanya. Jadi ga dapet semuanya. Akhirnya kita mikir wis kita longi jadi 10 hektar, saya mikir bakal dapet bantuan 10 hektar, eh ternyata tetep gak dapet. Akhirnya dikurangi lagi jadi gawangan itu.

P: siapa yang menentukan lahan buat lokasi kawasan organik?



J: waktu itu kesepakatan antara gapoktan sama dinas, kita plotnya kawasan organik, kita sepakati. Ternyata waktu itu gagal bibitnya jelek terusan tidak ada pendampingan. Wis petani nanduro organik tapi ndak ada pendampingan, jadi kita yok opo kate organik, ndak diajari. Pada waktu awal-awal slogan organik. Dan istilahnya waktu itu bantuannya hanya sedikit, tidak banyak. Tidak sampe separohnya. Waktu itu bantuannya hanya dapet 2 ton benih, niku kangge kawasan 10 hektar niku wau. 2 ton itu mungkin hanya buat 1 hektar kurang itu, paling ya kisaran luasan 7000meter persegi. Kalo hanya dapet 2 ton. Itu aja bibitnya jelek, apalagi bibitnya besar-besar, jadi lebih luasannya jadi berkurang untuk ditanami. Mungkin kalo bibitnya kecil luasannya jadi lebih banyak utnuk disebar. Biasanya kita dengan jarak yang sama dengan bibit yang besar, nah folumenya mungkin tambah berkurang.

P: untuk saat ini apakah bantuannya tetap sama atau ikut berkurang karena luasan diperkecil oleh kelompok?

J: ya malah berkurang, terus berkurang.

P: dasar apa yang digunakan untuk menghitung bantuan yang dialokasikan?

J: tidak tahu. Istilahnya bantuan itu semakin tahun dikurangi-dikurangi terus. Jadi barang tiba-tiba dating gitu aja. Kadang malah serba repot, itu kita sudah selesai tanam dan bantuannya baru datang. Bahkan benihnya sampe aus-lah. Kita kan petani tujuannya gini, pokoknya tanah ojo sampe kosong, mari tandur panen yo ditanduri maneh. Kadang kalo dinas kan menyesuaikan anggaran turun, jadi tidak sinkronnya kan seperti itu. Jadi opo karepe petani karo karepe pemerintah kan bertolak belakang.

P: apakah tidak dijalin komunikasi untuk menyesuaikan proses alokasi bantuan?

J: kadang apa ya, bantuan itu datangnya dadakan gitu loh. Setelah dating masih dilakukan pengecekan pengawasan terlebih dahulu, nah kita kan petani selak kesusu nandur. Wis olehe mek sak mono, dibagi yo gak roto. Yowis akhire kene golek dewe ning penangkar-penangkar.

P: bagaimana proses pendampingan saat awal dikenalkan organik hingga sekarang pak?

J: kalo pendampingan itu apa ya, dibentuk tim pendampingan. Istilahnya yo gak ada pendampingan, oh iki kudu ngene-ngene gak ada. Yo istilahnya penyuluhan gitu aja, nanti itu tetep aja istilahnya apa ya pengawasan tetep pengurus-pengurus kelompok organik, yo juga repot juga. Kan kita juga sama-sama sibuknya. Istilahnya dilematis.

Sebenarnya masalah utamanya itu di pasar mas, kalo pendampingan kulo kinten petanine iku kemampuane wis diatas rata-rata. Pasti mau pindah organik asal pasare enek. Pasarnya itu misalkan seperti kentang gitu dipatok 20.000-25.000/kg gitu mungkin petanine oh iki komitmen, wis tak tandorno sakmene, bendino pok jupok piro, ngotenloh. Dadi misale sementen sehari, seminggu sekian, seminggu 1 kwintal atau 5 ton gitu. Dadi petani berani lek wis diajangi pasar.

P: apakah selama ini belum ada pasar yang tersedia dan jelas?

J: belum ada. Istilahnya dinas itu ya cuma ngomong nanti saya jualkan, nanti saya bantu saya bawaan pengusaha yang bisa menyerap. Ya mek istilahnya sekedar ngomong. Ya kan dilematis kita

Sedangkan kan gini, kita untuk biaya tanam itu kan macem-macem jadi gabisa ngawur. Dari bibit, sewa tanah, pekerja, pupuk, dan lain-lain gitu. Jadi kalo kita main-main ya kita ruginya banyak, jadi serba dilematis petani itu. Jadi misal

kentang itu, kita wis seperti pengusaha, modalnya besar puluhan juta. Lah kalo pasarnya belum jelas, ya kita rugi total wis. Makanya sampe sekarang kita belum berani ya itu.



**UPAYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANIAN ORGANIK  
(Studi Pada Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Kawasan Pengembangan  
Desa Sumberbrantas Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama  
Sosiologi Lingkungan



Oleh:  
**Imam Bukhori**  
**115120100111021**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2018**

**UPAYA IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN PERTANIAN ORGANIK**  
**(Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Kawasan**  
**Pengembangan Desa Sumberbrantas Kota Batu)**

Oleh Imam Bukhori  
NIM 115120100111021

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Sarjana Pada Tanggal 05 Juli 2018

**Tim Penguji**

**Pembimbing I**



**Lutfi Amiruddin, S.Sos., M.Sc**

**NIK. 201304 860909 1 001**

**Pembimbing II**



**Wida Ayu Puspitosari, S.Sos., M.Si**

**NIK. 2016079 00404 2 001**

**Anggota penguji I**



**Anik Susanti, S.Pd., M.Si**

**NIK. 201405 86091612001**

**Anggota Penguji II**



**Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A.**

**NIK. 2017108709262001**

**Malang,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Unti Ludigdo. AK**  
**NIK. 196905 14199402 1 001**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Menyetujui Laporan Skripsi yang Berjudul

**UPAYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANIAN ORGANIK**

**(Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Kawasan  
Pengembangan Desa Sumberbrantas Kota Batu)**

Oleh Imam Bukhori

NIM 115120100111021

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Sarjana Pada Tanggal 05 Juli 2018

Pembimbing I



Lutfi Amiruddin, S.sos., M.Sc

NIK. 201304 860909 1 001

Pembimbing II



Wida Ayu Puspitosari, S.Sos., M.Si

NIK. 2016079 00404 2 001

Malang,

Ketua Jurusan Sosiologi



Anif Fatma Chawa, M.Si., Ph.D

NIP. 19740308 200501 2 001



## PERNYATAAN ORIGINALITAS


**Nama : Imam Bukhori**

**NIM : 115120100111021**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul Upaya Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi Pada Implementasi Kebijakan Organik di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang,  
Yang Membuat Pernyataan



Imam Bukhori  
NIM. 115120100111021

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA PRIBADI:**

Nama : Imam Bukhori  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun Bango RT 002/ RW 15 Desa Payaman  
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 17 Desember 1991  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Tinggi/ Berat Badan : 167/58kg  
Kesehatan : Baik  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. HP : 085785563538  
e-mail : imambukhori1712@gmail.com

**Pendidikan Formal:**

1998-2004 : MI Miftahul Ulum Bango, Payaman Solokuro  
2004-2007 : MTS Roudlotul Muta'abbidin Payaman Solokuro  
2007-2010 : MA Roudlotul Muta'abbidin Payaman Solokuro  
2011-2018 : S1 Sosiologi Universitas Brawijaya

**Kemampuan:**

- Mengerti dan dapat mengoperasikan MS word, offoce, excel, power point.
- Mengerti bahasa inggris secara pasif (Toefl Score 457)

# UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini sengaja di buat sebagai tanda syukur peneliti atas perjuangannya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi kepada mereka yang sangat luar biasa:

*Setiap individu adalah kumpulan jamak dari orang lain yang ada di sekelilingnya dan bertautan pada setiap ruang-waktu.*

1. Alhamdulillah Ya Allah yang selalu menuntun dan memberi jalan dalam setiap kesulitan dan menjadikan kemudahan itu datang, masio dusoku wakeh.
2. Pak Lutfi dan Ibu Wida, pembimbing terbaik setelah 3 kali ganti pembimbing. Terima kasih atas saran, masukan baik dalam segi tulisan maupun teknik penulisan dan solusi yang diberikan di setiap kebuntuan dalam menyelesaikan setiap bab dan atas ketersediannya meluangkan waktunya untuk bimbingan.
3. Ibu Anik Susanti dan Ibu Dewi Rahayu sebagai dosen penguji, terima kasih telah memberikan sensasi dan kelulusan serta revisi berharganya sehingga sampai berakhirnya ujian skripsi saya masih harus berjuang demi perbaikan.
4. Emakku Sumardiyah dan Bapakku Ngateman yang terus mengingatkan, memarahi dan menangisi anak bandelnya untuk menyelesaikan skripsi hingga wisuda karena semakin lama kuliah maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran SPP. Kasih sayang dan dukungan materi yang diberikan hingga pada akhirnya karya kecil ini yang bisa kupersembahkan sementara.
5. Adikku Hafidhul Kafi, calon hafidz quran yang sekarang udah hafal 15 juz. Ojo koyo Kakakmu sing durhakane kenemenen.
6. Kepala Dusun Jurangkuali, yang memperbolehkanku menjadikan Dusun Jurangkuali sebagai tempat penelitian skripsi.
7. Dosen-dosen Sosiologi Universitas Brawijaya yang dari semester satu hingga semester akhir mengajari banyak hal tentang sosiologi Bu Nike, Bu Anif, Bu Ifah, Bu Titi, Bu Ucca, Mbak Asti, Pak Arief, Pak Imron, Pak Indhar, Pak Lutfi, Pak Amex, akan ilmunya yang diberikan sebagai bekalku dalam menata masa depan.

8. Keluarga Kontrakan Gurami terima kasih atas persahabatan yang akan terus terjaga (Mas Bowi, Mas Idam, Thomsin, Ucli, Febri, Mbah dan Ayah). Ora Gojlokan, Ora Penak.
9. Teman-teman Kelompok KKN, Ika, Keceng, Agnes, Arbi, Anis, Lia, Fetty, Supir dan Arif. Selama hampir 2 bulan kebersamaan hingga sampai aku ujian kompre kalian udah pada menikah dan punya anak.
10. Sobat Ngopi at King Coffee, Supir aka Wijaya, Galih aka Usul, Ifan, Mbah aka Adenda, Febri, Debyo, Jemblung aka Ryan, Chino, Deni aka Denok, Andi, Potel aka Prihat, Triaqi dan Mas Mubin owner.
11. Sobat Sanctuary, Ucil, Febri, Wardah, Ninda aka tuhan, dan Jemblung yg sudah sedia menampung kawan homelessnya
12. Teman-teman angkatan 2011.

Somefolk said that, there is no words can erase what happend in the last fifty years.

*Semoga skripsi ini menjadi monumen penyesalan saya atas kebaikan kedua orangtua dan keluarga.*

(Imam Bukhori S.Sos, 2018)



## ABSTRAK

**Imam Bukhori (2018). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Upaya Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi Pada Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Dusun Jurangkuali, Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)***  
**Pembimbing: Lutfi Amiruddin dan Wida Ayu Puspitosari**

---

Penelitian ini membahas mengenai praktik implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Batu pada implementasi kebijakan pertanian organik dalam Perwali Batu Tahun 2014 sebagai upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana praktik berjalannya kekuasaan pada upaya pemerintah kota mengimplementasikan kebijakan demi tercapainya pertanian berkelanjutan dan menjadikan Batu sentra produk organik.

Penelitian ini menggunakan konsep tentang penerapan atau implementasi kebijakan publik untuk menganalisis praktik implementasi antar pihak penyelenggara dengan sasaran kebijakan dalam upayanya mentransformasi petani konvensional untuk beralih menjadi petani organik di kawasan pengembangan atau percontohan Dusun Jurangkuali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan secara *purposive sampling*, yaitu informan utama, dan informan tambahan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika praktik implementasi oleh pihak penyelenggara atas petani sasaran dalam upaya mentransformasi pertanian konvensional menjadi organik diwujudkan dalam strategi-strategi pemberdayaan untuk mempengaruhi dan merubah pola tanam serta pola pikir petani di kawasan pengembangan. Praktik implementasi tersebut dapat digambarkan melalui adanya mekanisme teknisalisasi permasalahan dan normalisasi model *top-down* pihak penyelenggara demi tercapainya target menjadikan Batu sentra produk organik. Namun pada pelaksanaan di kawasan pengembangan terdapat dinamika yang memunculkan kendala-kendala tercapainya tujuan yang diharapkan pihak penyelenggara. Terdapatnya dinamika ketika pelaksanaan menandakan kurangnya kesiapan pihak penyelenggara dan hanya mendasarkan strategi perencanaan secara sepihak sehingga menimbulkan permasalahan antara petani dan petugas pelaksana. Evaluasi dan strategi normalisasi yang dilakukan juga tetap tidak membuahkan hasil dan malah melahirkan dimensi permasalahan baru. Selain itu strategi hibah dan subsidi serta sarana prasarana penunjang yang disiapkan tidak menjamin petani melakukan alih tanam ke pola organik seperti yang diharapkan akan tetapi mengkombinasikan keduanya dengan berbagai alasan masing-masing baik ekonomi maupun kritik atas penerapan alokasi, tidak maksimalnya sarana-prasarana penunjang dan pendampingan dari pihak penyelenggara.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Pertanian Organik, dan Kawasan Pengembangan atau Percontohan.



## ABSTRACT

**Imam Bukhori (2018). Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences. The Practices Implementation of Organic Agriculture Policy (A study at Implementation of Organic Agriculture Policy at Jurangkuali Orchard, Sumberbrantas Village, Bumiaji Sub-District, Batu). Supervised: Lutfi Amiruddin and Wida Ayu Puspitosari.**

---

The research discusses about the practices implementation of organic agriculture policy in Batu City Regulation Years 2014. This policy effort's is to create the sustainable agriculture. The objectives of the study focused to find out and to analyze how's work practices of implementation at the effort of city government to apply their policy to reach sustainable agriculture and to made Batu City into organic product center as their policy goal.

The research applies a concept of implementation to analyze the pactice of govern between the executor side (city government) and the object of policy in effort to transform convensional farmer into organic farmer in developing or specimen area at Jurangkuali orchard. The researcher applies qualitative research method. Observations, interviews, and documentations have been used to collect the data. In addition, purposive sampling is used to determine the selection of informants, the primary and secondary.

The research finds the presence of practices of govern by the executor side over object of policy in effort to transform conventional agriculture into organik has been formed into empowerment strategies to influence dan change the plant pattern as well as mind pattern in developing or specimen area. Practice of implementation can be describe through existence of the problems technical mechanism and the normalization of top-down concept by the executor side to achieve their goal. But, at that time, there are conditions that bringing out obstacles to achieve the government goal. These obstacles indicated lack prepared by the government and base on unilateral plan accordingly with the result that cause set of promlems between farmer and the implementer official. Evaluation and normalization strategy that was done yet not successful instead of cause another problem. Beside that, bequest and subsidy and tool-infrastucture support did not guarantee the way the farmer changed their pattern plant into organic just like the policy concept. The farmer chooses to combine between conventional and organic plant pattern with ther own reason base on situation and condition.

**Keywords:** Implementation Policy, Organic Agriculture, and Developing or Specimen Area.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Di Kawasan Percontohan Dusun Jurangkuali, Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu”. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan tugas akhir dalam memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan, dukungan, bimbingan, serta pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua, saudara-saudara serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan berupa materi maupun nonmateri.
2. Bapak Lutfi Amiruddin, M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi pertama serta Ibu Wida Ayu Puspitosari, S. Sos., M. Si. selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang telah sabar membimbing, mengajari, dan memberikan banyak masukan serta selalu menyediakan waktu ditengah kesibukan untuk penulis berkonsultasi.
3. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Yusuf, Bapak Aan, dan Bapak Prawito selaku subyek penelitian informan, baik informan utama maupun informan pendukung yang telah meluangkan waktu kepada peneliti dan telah banyak membantu dalam penelitian skripsi.
5. Bapak Jhonny selaku Ketua Kelompok Tani Organik Dusun Jurangkuali yang sudah mengijinkan peneliti melakukan penelitian skripsi di Dusun Jurangkuali.
6. Para penulis buku, penulis artikel, peneliti yang penelitiannya dijadikan sebagai penelitian terdahulu pada skripsi ini, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan sangat terbuka, agar isi dari skripsi ini dapat lebih bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	 8
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kajian Konsep .....	14
2.2.1 Konsep Implementasi .....	14
2.2.2 Pertanian Organik dan Konvensional .....	19
2.4 Skema Kerangka Pemikiran .....	25
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	 29
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	29
3.2 Lokasi Penelitian .....	29
3.3 Fokus Penelitian .....	31
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Jenis dan Sumber data .....	35
3.7 Teknik Analisis Data .....	35
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	 41
4.1 Kondisi Umum Dusun Jurangkuali Desa Sumberbrantas .....	41
4.2 Kondisi Umum Pertanian Desa Sumberbrantas sebelum dan sesudah menjadi Kawasan Percontohan Organik .....	47
4.3 Deskripsi Informan .....	53
 <b>BAB V</b> .....	 59
5.1 Peraturan Pemerintah Kota Batu Tentang Kebijakan Pertanian Organik .....	59
5.1.1 Mekanisme Implementasi Kebijakan Organik Sebagai Upaya Transformasi Pertanian Di Kota Batu .....	63
5.2 Dinamika Implementasi Kebijakan Organik dan Permasalahannya Di Kawasan Percontohan Sumberbrantas .....	69

5.3 Dimensi Permasalahan yang Timbul Pasca Implementasi Kebijakan Organik Di Kawasan Percontohan Desa Sumberbrantas .....	91
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	96
6.1 Kesimpulan.....	96
6.2 Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2. Informan Penelitian.....	36
Tabel 3. Luas Daerah Dan Tata Guna Lahan Desa Sumberbrantas .....	42
Tabel 4. Potensi Hortikultura desa Sumberbrantas .....	43
Tabel 5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	44
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	46
Tabel 7. Klasifikasi Kawasan Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah .....	52
Tabel 8. Daftar Anggota kelompok Petani Kawasan Percontohan Sumberbrantas .....	62





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	26
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Foto

Lampiran 2. Lampiran Transkrip Wawancara

